KAMUS ISTILAH
BIDANG PEKERJAAN UMUM

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK
2008

KAMUS ISTILAH
BIDANG PEKERJAAN UMUM

SAMBUTAN MENTERI

Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penerbitan buku "Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum" sebagai wujud kerja cerdas dari semua pihak yang berhasil menuangkan gagasan sederhana menjadi produk yang bermanfaat. Buku yang memuat definisi atau pengertian berbagai istilah bidang pekerjaan umum yang sering digunakan, memang kita perlukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Apalagi, kita maklumi bersama bahwa lingkup tugas bidang pekerjaan umum sangat luas, sehingga berimplikasi pada beragamnya istilah-istilah yang digunakan.

Sebagaimana dimaklumi, pengertian dari istilah tersebut sebenarnya sudah ada, tetapi tersebar di berbagai peraturan perundangan yang ada. Bahkan, kami sendiripun yang setiap hari berkecimpung dalam bidang pekerjaan umum, sering mengalami kesulitan untuk menunjukan apa definisi dari istilah yang seolah-olah sudah sangat akrab ditelinga kita, apalagi masyarakat awam yang sama sekali tidak pernah terlibat.

Oleh karenanya, kami menyebut ini sebagai upaya sederhana namun cerdas. Sederhana, karena buku ini memuat kompilasi definisi berbagai istilah bidang pekerjaan umum yang sebenarnya sudah ada di berbagai peraturan perundangan. Cerdas, karena buku ini memuat definisi istilah tersebut dalam satu kemasan dokumen yang utuh, handy dan dilengkapi tambahan ilustrasi yang diharapkan dapat memperjelas makna dari suatu istilah.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh pihak yang mendukung selama proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Kami memaklumi bahwa sekeras dan secerdas apapun kita bekerja dalam mewujudkan karya nyata, pasti tidak akan luput dari adanya kesalahan atau ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan Tim Penyusun agar terbuka dan akomodatif terhadap saran, masukan dan koreksi dari pengguna Buku Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum ini. Semua ini tentunya merupakan hal yang sangat positif bagi penyempurnaan selanjutnya agar menambah nilai manfaat atas terbitnya buku ini.

Sebagai penutup, kami mengharapkan agar buku ini dapat menjadi rujukan alternatif bagi seluruh pemangku kepentingan bidang pekerjaan umum, tidak hanya di lingkungan internal PU, tetapi juga bagi instansi sektor terkait, pemerintah daerah, para mitra kerja Departemen PU, media masa dan masyarakat luas. Akhirnya, kami mengucapkan selamat menikmati dan memanfaatkan buku ini dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, November 2008
Menteri Pekerjaan Umum

DJOKO KIRMANTO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas perkenan-Nya kami telah berhasil menyelesaikan dan menerbitkan edisi pertama buku "Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum". Buku ini memuat materi tentang daftar istilah bidang pekerjaan umum yang sering digunakan berikut definisi atau pengertiannya yang sebagian dilengkapi dengan ilustrasi untuk memperjelas definsi atau pengertian istilah tersebut. Selain itu, buku ini juga memuat daftar singkatan dan akronim berikut kepanjangannya.

Sebagaimana dimaklumi bersama, lingkup tugas bidang pekerjaan umum sangat beragam dan luas, mencakup bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang serta tugas pendukung administrasi pemerintahan lainnya seperti perencanaan pembangunan, pengawasan, pengelolaan aset, pengembangan sumber daya manusia dsb. Luasnya ruang lingkup bidang pekerjaan umum ini tentunya berimplikasi pada banyaknya peristilahan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas keseharian maupun pengambilan kebijakan publik terkait. Meskipun, definisi ataupun pengertian istilah-istilah bidang pekerjaan umum sebenarnya sudah ada di dalam berbagai peraturan perundangan maupun dokumen-dokumen NSPM lainnya, namun tersebar, sehingga tidak semua pihak, baik internal Departemen PU maupun para pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat luas, bisa mengakses dan bahkan memahami semua istilah tersebut dengan cepat.

Penerbitan Buku ini adalah jawaban kebutuhan untuk mendapatkan informasi tentang definisi atau pengertian istilah PU tersebut dengan cara yang lebih cepat karena dikemas dalam satu dokumen utuh. Penyusunan buku ini dilakukan dengan cara kompilasi berbagai definisi atau pengertian istilah bidang pekerjaan umum yang tersebar di berbagai dokumen Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan dokuman terkait lainnya. Tentunya tidak semua istilah dapat dicantumkan dalam buku karena kami hanya memilih istiliah-istilah yang sering dan umum digunakan dalam pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum sehari-hari dengan pertimbangan definisi atau pengertian istilah lainnya dapat diakomodasikan dalam juknis masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa buku ini tidak akan terbit tanpa adanya kontribusi dari seluruh unit di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan, bantuan dan kontribusi yang telah diberikan.

Sebagai penutup, kami berharap buku ini dapat menambah alternatif informasi bagi masyarakat awam yang tertarik dengan kiprah Departemen Pekerjaan Umum. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh seluruh seluruh pemangku kepentingan bidang pekerjaan umum, tidak hanya di lingkungan internal PU, tetapi juga instansi sektor terkait, pemerintah daerah,media masa dan mitra kerja Departemen PU. Mengingat adanya berbagai kendala, kami menyadari bahwa buku edisi pertama ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan dan koreksi bagi penyempurnaan selanjutnya.

Jakarta, November 2008

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

6 ISTILAH UMUM

18 SUMBER DAYA AIR

42 BINA MARGA

68 CIPTA KARYA

124 PENATAAN RUANG

148 SINGKATAN

ISTILAH UMUM

A

Adaptasi Perubahan Iklim
Tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Upaya ini bertujuan untuk : (1) mengurangi kerentanan sosial-ekonomi dan lingkungan yang bersumber dari perubahan iklim, (2) meningkatkan daya tahan (*resilience*) masyarakat dan ekosistem, (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (mengentaskan kemiskinan). (Sumber: 23)

Akuntabilitas Kinerja
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Sumber: 24)

Amortisasi
Dalam terminologi keuangan berarti penghapusan secara berangsur-angsur dari sejumlah uang setelah jangka waktu tertentu. Dalam terminologi fiskal berarti pengurangan nilai dari aset tertentu. Dalam terminologi teknik berarti waktu yang diharapkan dari penggunaan suatu aset. (Sumber: 16)

Anggaran
Sejumlah biaya yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan tugas umum pemerintahan.
(Sumber: 20)

Aset
Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
(Sumber: 3)

Asuransi *Mortgage*
Asuransi yang menjamin pengembalian pinjaman ke bank jika terjadi *default* terhadap suatu KPR. Tujuannya adalah menjamin likuiditas bank dan terbebasnya debitur KPR bila terjadi *default*, dan sisa cicilan akan ditutup oleh pihak asuransi. (Sumber: 16)

B

Badan Layanan Umum (BLU)
Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Sumber: 1)

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
Badan yang bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil. Badan ini melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Dibentuk melalui Keppres 14 tahun 2007 tentang BPLS. (Sumber: 8)

Bagan Akun Standar
Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
(Sumber: 3)

Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer*)
Pengusahaan infrastruktur, misalnya jalan tol dimana Badan Usaha berkewajiban untuk membangun jalan tol dan/atau fasilitas, termasuk pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu serta berhak menarik biaya pemakaian layanan dari pengguna untuk mengembalikan modal investasi, biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar, dan setelah berakhirnya Perjanjian Pengusahaan harus diserahkan kepada Pemerintah tanpa penggantian biaya apapun. (Sumber: 2)

Bantuan Teknis (dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Technical Assistance* atau TA)
Bantuan modal, tenaga ahli, dsb dari luar negeri untuk melancarkan usaha negara yang sedang berkembang. (Sumber: 19)

Barang Milik Negara (BMN)
Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Sumber: 14)

Belanja Barang
Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
(Sumber: 3)

Belanja lain-lain
Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. (Sumber: 3)

Belanja Mengikat
Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus selama 1 tahun dan harus dialokasikan oleh kementrian Negara/ lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan. (Sumber: 3)

Belanja Modal
Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.
(Sumber: 3)

Belanja Pegawai
Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum bestatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. (Sumber: 3)

Belanja Tidak mengikat
Belanja yang dibutuhkan secara insidentil (tidak terus menerus) dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan.
(Sumber: 3)

D

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Dokumen pelaksanaan anggaran yang berusaha menghimpun seluruh perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada saat ini baru menghimpun seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran Rutin (DIK), anggaran pembangunan (DIP), dan kegiatan yang dibiayai PNPB (DIKS). Penganggaran terpadu diharapkan dapat dilaksanakan pada akhir masa transisi. (Sumber: 20)

Dana Dekonsentrasi
Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
(Sumber: 14)

Dana Tugas Pembantuan
Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. (Sumber: 14)

Data Literal = Non Spasial = Numerik
- Berbentuk grafik dan teks atau numerik
- Berwujud nomor (angka), bersifat angka / sistem angka. (Sumber: 17)

Data Spasial
- Berkenaan dengan ruang atau tempat.
- Dikenal sebagai geospasial atau informasi geografi.
- Data spasial dapat menunjang sistem sebagai upaya dalam menghasilkan informasi tertentu sesuai dengan kebutuhannya.
- Terdiri dari lokasi eksplisit suatu geografi yang diset ke dalam bentuk koordinat.
  (Sumber: 17)

Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. (Sumber: 14)

E

E-Procurement
Kegiatan penyelenggaraan pengadaaan barang dan jasa melalu media elektronik (mencakup informasi dan komunikasi) yang berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi. (Sumber: 9)

Eskalasi Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak pengadaan barang dan jasa pemborongan sebagai akibat kenaikan harga BBM. (Sumber: 7)

Evaluasi
Penilaian terhadap suatu kegiatan yang membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai pada kurun waktu tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran dan indikator tertentu. (Sumber: 16)

K

Kebijakan
Arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan. (Sumber: 25)

Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)
Komite yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas untuk:
a. Merumuskan strategi dalam rangka koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur;
b. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur oleh Menteri Terkait dan Pemerintah Daerah;
c. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*) dalam percepatan penyediaan infrastruktur;
d. Menetapkan upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur. (Sumber: 22)

Kontrak Operasi dan Pemeliharaan
Pengusahaan infrastruktur dimana Badan Usaha berkewajiban untuk memberikan jasa layanan operasi dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu untuk mengoperasikan atau mendukung pengoperasian suatu infrastruktur. (Sumber: 2)

Kontrak Perencanaan dan Pembangunan (*Design and Build Contract*)
Suatu kontrak dimana pemilik proyek mempersiapkan program kebutuhannya dan perencanaan dasar (*basic desain*), kemudian memilih suatu badan yang bertindak sebagai arsitek, perencana dan kontraktor pelaksana dalam satu kontrak untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Selama pelaksanaan pekerjaan, pemilik proyek akan memeriksa apakah perencanaan dan konstruksi telah memenuhi kriteria yang telah disyaratkan. (Sumber: 4)

Kontrak Tahun Jamak
Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. (Sumber: 5)

Kontrak Tahun Tunggal
Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. (Sumber: 5)

Kontrak Tim Pembangunan (*Building Team Contract*)
Suatu kerjasama sementara dimana, pemilik proyek, konsultan perencana dan kontraktor bekerja sama dalam suatu proses pembangunan. Kontraktor biasanya tidak dipilih melalui suatu seleksi dan kontraktor menghitung biaya konstruksi berdasarkan perkiraan biaya secara terbuka. (Sumber: 4)

Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Skema Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. (Sumber: 18)

L

LAKIP
Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibuat secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan Departemen/ Lembaga pemerintah non Departemen, masing-masing menteri/ pemimpin lembaga pemrintah Non departemen menyampaikannya kepada Presiden dan wakil presiden dengan tembusan kepada menteri negara bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara serta kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan. (Sumber: 24)

Lembaga
Organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. (Sumber: 25)

Laporan Barang Milik Negara (BMN)
Laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut. (Sumber: 14)

M

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Keluarga/rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp 1,5 juta per bulan (Sumber: 20)

Misi
1. Suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyatan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal

instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. (Sumber: 24)
2. Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan isi. (Sumber: 25)

Mitigasi Perubahan Iklim
Serangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan pengurangan emisi gas-gas rumah kaca (GRK) ke atmosfir yang berpotensi menipiskan lapisan ozon. Upaya mitigasi terutama difokuskan untuk 2 (dua) sektor yaitu (1) sektor kehutanan sebagai sumber mekanisme *carbon sink* (pemeliharaan hutan berkelanjutan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pencegahan *ilegal logging*, pencegahan kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan), (2) sektor energi untuk mengurangi emisi GRK yang berasal dari pembangkitan energi, transportasi, industri, perkotaan dan lahan gambut. (Sumber: 23)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. (Sumber: 25)

P

Pagu Indikatif
Perkiraan jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan, sebagai acuan dalam penyusunan RENJA-KL. (Sumber: 20)

Pagu Sementara
Batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR-RI terhadap kebijakan umum dan prioritas anggaran. Pagu Sementara digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL Sementara. (Sumber: 20)

Pagu Definitif
Batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR-RI terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pagu Definitif digunakan sebagai acuan dalam penyesuaian RKA-KL Sementara menjadi RKA-KL definitif. (Sumber: 20)

Panitia Pengadaan Tanah (P2T)
Panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. (Sumber: 12)

Pembangunan Nasional
Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. (Sumber: 25)

Pengadaan Tanah
Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. (Sumber: 12)

Perencanaan
Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (Sumber: 25)

Perencanaan Strategik
Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitung potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/ sasaran, dan program yang realitis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. (Sumber: 24)

PKPD PU (Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum)
Kegiatan yang dilakukan Departemen Pekerjaan Umum untuk memberikan penilaian, pembinaan sekaligus apresiasi secara obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, kepada Pemerintah Daerah terhadap komitmen serta prestasinya dalam penyelengggaraan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
(Sumber: 29)

Program
Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
(Sumber: 25)

Program Kementerian/Lembaga/ Satuan/Kerja Perangkat Daerah
Sekumpulan rencana kerja suatu kementerian/lembaga atau kesatuan kerja perangkat daerah.
(Sumber: 25)

Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah
Sekumpulan rencana kerja terpadu antar-kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.
(Sumber: 25)

Program Lintas Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sekumpulan rencana kerja beberapa kementerian/lembaga atau beberapa satuan kerja perangkat daerah.
(Sumber: 25)

R

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (RAKORBANGPUS)
Merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional dalam Rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan menyempurnakan rancangan awal RKP tahunan dan pagu indikatif tahunan per kementerian dan lembaga sebagai bahan penyiapan rencana kerja (RENJA) kementerian/lembaga tahunan. Selanjutnya penyempurnaan tersebut akan dilakukan melalui forum konsultasi yang intensif antara masing-masing kementerian/lembaga dengan Bappenas dan Depkeu, serta dilakukan dengan daerah melalui Musrenbangnas. (Sumber: 26)

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 25)

Rehabilitasi
Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. (Sumber: 13)

Rekonstruksi
Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. (Sumber: 13)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL)
Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. (Sumber: 10)

Rencana Kerja Kementrian Negara/ Lembaga (Renja-KL)
Dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga atau Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra- KL)
Dokumen perencanaan Kementerian / Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Merupakan dokumen rencana kerjasama pembangunan infrastruktur di kabupaten/ kota yang bersifat terpadu dan lintas sektoral. RPIJM dimaksudkan bukan untuk menggantikan fungsi RPJMD akan tetapi RPIJM merupakan dokumen teknis kelayakan program untuk rencana pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) Kabupaten/Kota yang disusun dengan keterpaduan penanganan fisik dan bukan fisik dan investasi jangka menengah (5 tahun). (Sumber: 28)

S

Sasaran
Penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. (Sumber: 24)

Satuan Kerja
Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. (Sumber: 14)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. (Sumber: 14)

Satuan 2
Dokumen anggaran yang memuat rincian alokasi pagu anggaran per Program dan Unit Eselon I Iingkup Kementerian/ Lembaga Negara. (Sumber: 20)

Satuan 3
Dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per Program, berdasarkan Unit Eselon I , dan Iingkup Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga Negara. (Sumber: 20)

Sektor Strategis
Sektor yang mempunyai kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. (Sumber: 28)

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
Sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. (Sumber: 14)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. (Sumber: 14)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.
(Sumber: 25)

Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan.
(Sumber: 11)

Strategi
Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. (Sumber: 25)

T

Tugas Pembantuan
Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. (Sumber: 14)

Tujuan
Penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. (Sumber: 24)

U

Uang Ganti Kerugian Tanah (Ganti Kerugian)
Pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari pelepasan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. (Sumber: 15)

V

Visi
1. Cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. (Sumber: 24)
2. Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. (Sumber: 25)

SUMBER:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91 / PMK. 06 / 2007. Tentang Bagan Akun Standar
4. Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak, Departemen Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.Ol/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko Atas Penyediaan Infrastruktur
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 /PMK.06/2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
9. Pusat Data dan Informasi Publik, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2007tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
16. Glossary Perkim 2002
17. Pusdata, Dep. PU
18. Website Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha (www.sentraukm.com)
19. Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.pusatbahasa.diknas.go.id)
20. Website Direktorat Jenderal Perbendaharaaan Departemen Keuangan RI (www.perbendaharaan.go.id)
21. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2004 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
22. Peraturan Presiden No 42 tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
23. Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim (RAN-MAPI) Bidang Pekerjaan Umum, Departemen Pekerjaan Umum, Republik Indonesia
24. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
25. UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
26. BAPPENAS
27. Kepmen Kimpraswil No 217/KPTS/M/2002. Tentang: KSNPP (Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perum dan Perkim)
28. Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya
29. Buku Panduan PKPD PU, 2007

ISTILAH UMUM

SUMBER DAYA AIR

A

Abrasi
Hempasan atau penggerusan oleh gerakan air, dan butiran kasar yang terkandung di dalamnya. (Sumber: 28)

Agradasi Sungai
Peninggian dasar sungai akibat pengendapan. (Sumber: 28)

Air
Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. (Sumber: 1)

Air Baku
Air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. (Sumber: 45)

Air Permukaan
Semua air yang terdapat pada permukaan tanah. (Sumber: 1)

Air Tanah
Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. (Sumber: 1)

Aliran Sungai
Gerakan air yang dinyatakan dengan gejala dan parameter dengan ukurannya. (Sumber: 16)

Alokasi Air Sementara
Alokasi yang dihitung berdasarkan perkiraan ketersediaan air yang dapat diandalkan (debit andalan) dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna air yang sudah ada. (Sumber: 1)

Alur Sungai
Alur tempat mengalirnya aliran sungai. (Sumber: 16)

Angka Kebutuhan Nyata Jaringan Irigasi
Besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi. (Sumber: 2)

Audit Pengelolaan Irigasi
Kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi.
(Sumber: 5)

B

Badan Air
Kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan, suhu, dsb, misal sungai, rawa, danau, laut, dan samudra.
(Sumber: 46)

Banjir
Aliran yang relatif tinggi, dan tidak tertampung lagi oleh alur sungai atau saluran. (Sumber: 17)

Banjir Lokal
Banjir yang mengganggu fungsi jalan kabupaten/kota bandara lokal, jalan kereta api lintas, sentra produksi pangan lokal, kawasan industri dan perdagangan skala kecil,kawasan strategis kabupaten/kota lainnya (tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota). (Sumber: 45)

Banjir Nasional
Banjir yang mengganggu fungsi jalan nasional, bandara Internasional dan nasional, jalan kereta api lintas provinsi, sentra produksi pangan nasional, kawasan industri dan perdagangan skala besar, kawasan strategis nasional lainnya (tanggung jawab pemerintah).
(Sumber: 45)

Banjir Rata-Rata Tahunan
Besar debit banjir dari jumlah rangkaian banjir maksimum tahunan dibagi tahun kejadian. (Sumber: 17)

Banjir Regional
Banjir yang mengganggu fungsi jalan provinsi, bandara nasional/lokal, jalan kereta api lalu lintas kabupaten, sentra produksi pangan provinsi / lokal, kawasan industri dan perdagangan skala sedang, kawasan strategis provinsi lainnya (tanggung jawab pemerintah provinsi).
(Sumber: 45)

Bangunan Bagi
Bangunan yang berfungsi untuk membagi air. (Sumber: 2)

Bangunan Bagi Sadap
Bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier. (Sumber: 2)

Bangunan *Intake*
Suatu bangunan pada bendung yang berfungsi sebagai penyadap aliran sungai, mengatur pemasukan air dan sedimen serta menghindarkan sedimen dasar sungai dan sampah masuk ke intake.
(Sumber: 34)

Bangunan Pelengkap
Bangunan yang melengkapi jaringan utama seperti talang, bangunan silang, terjunan, dan lain-lain.
(Sumber: 28)

Bangunan Pembilas
Bangunan yang berfungsi untuk membilas sedimen. (Sumber: 28)

Bangunan Pengaman
Bangunan untuk mencegah kerusakan konstruksi, misal bangunan pelimpah samping, pembuang silang, dsb.
(Sumber: 28)

Bangunan Pengatur Muka Air
Bangunan yang berfungsi mengatur/mengontrol ketinggian muka air di saluran primer dan sekunder sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan kepada bangunan sadap tersier. (Sumber: 45)

Bangunan Pengelak
Bangunan untuk mengelokkan arah aliran sungai, antara lain bendung.
(Sumber: 28)

Bangunan Peredam Energi Bendung
Struktur dari bangunan di hilir tubuh bendung yang terdiri dari berbagai tipe, bentuk dan di kanan kirinya dibatasi oleh tembok pangkal bendung dilanjutkan dengan tembok sayap hilir dengan bentuk tertentu, yang berfungsi meredam energi air akibat pembendungan, agar air di hilir bendung tidak menimbulkan penggerusan setempat yang membahayakan struktur.
(Sumber: 34)

Bangunan Sadap
Bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.
(Sumber: 2)

Bangunan Sungai
Bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai.
(Sumber: 7)

Bangunan Suplesi
Bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai. (Sumber: 45)

Bantaran Sungai
Lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
(Sumber: 7)

Base Flow
Aliran dasar sungai yaitu aliran yang terjadi akibat pergerakan air permukaan.
(Sumber: 26)

Bendung
Bangunan melintang alur sungai yang berfungsi untuk meninggikan muka air.
(Sumber: 21)

Bendung Tetap
Bendung yang tidak bisa dioperasikan untuk meniadakan pembendungan air.
(Sumber: 21)

Bendung Gerak
Bendung yang bisa melayani operasi untuk meniadakan pembendungan air.
(Sumber: 21)

Bendung Gerak Pintu
Bendung gerak yang terbuat dari pintu sebagai sarana operasi pembendungan air. (Sumber: 21)

Bendung Karet
Bendung gerak yang terbuat dari tabung karet yang mengembang sebagai sarana operasi pembendungan air.
(Sumber: 21)

Bendung Karet Isi Udara
Bendung karet yang menggunakan udara sebagai media pengisi tabung karet. (Sumber: 21)

Bendung Karet Isi Air
Bendung karet yang menggunakan air sebagai media pengisi tabung karet. (Sumber: 21)

Bendung Pembagi Banjir
Bendung yang dibangun di percabangan sungai untuk mengatur muka air sungai, sehingga terjadi pemisahan antara debit banjir dan debit rendah sesuai dengan kapasitasnya. (Sumber: 34)

Bendung Penahan Pasang
Bendung yang dibangun di bagian sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, antara lain untuk mencegah masuknya air asin. (Sumber: 34)

Bendung Penyadap
Bendung yang digunakan sebagai penyadap aliran sungai untuk berbagai keperluan seperti untuk irigasi, air baku, dan sebagainya. (Sumber: 34)

Bendungan
Setiap penahan buatan, jenis urugan atau jenis lainnya, yang menampung air atau dapat menampung air baik secara alamiah maupun buatan, termasuk pondasi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. (Sumber: 18)

Bronjong Kawat
Struktur kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng yang pada penggunaannya diisi batu-batu untuk pencegah erosi yang dipasang pada tebing-tebing, tepi-tepi sungai, yang proses penganyamannya menggunakan mesin. (Sumber: 13)

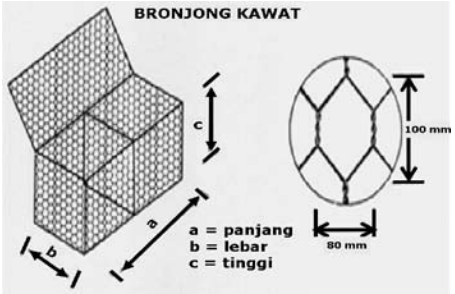

Gambar 1.02 Bronjong Kawat

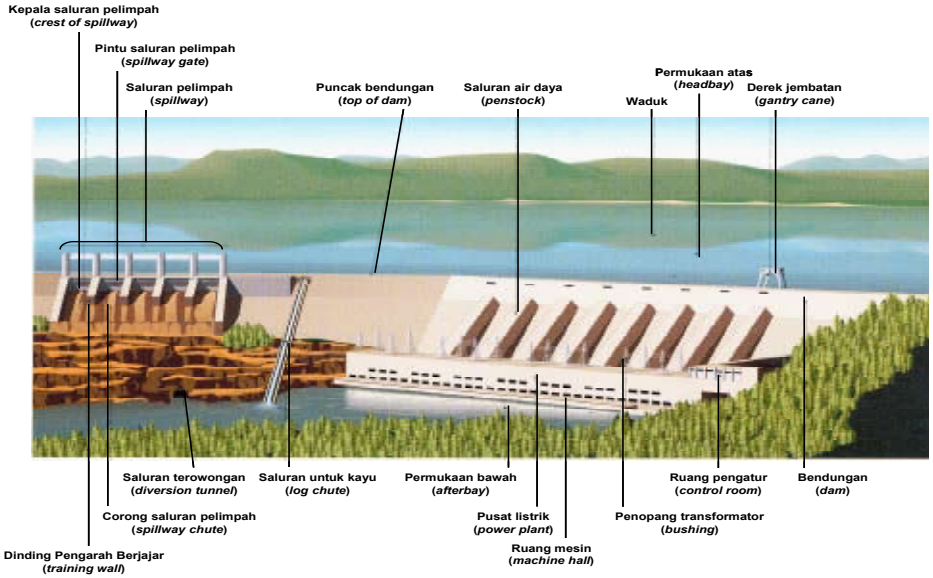

Gambar 1.01 Bendungan (Sumber : 47)

C

Cekungan air tanah
Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. (Sumber: 1)

Check Dam
Bendungan kecil yang dibangun dalam sebuah saluran atau alur air yang kecil untuk mengurangi kecepatan aliran sungai, meminimkan pencarian saluran dan mempromosikan endapan sedimen. (Sumber: 42)

Curah hujan
Banyaknya hujan yang tercurah (turun) di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. (Sumber: 46)

D

Daerah Aliran Sungai (DAS)
Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan di wilayah tersebut ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (Sumber: 1)

Daerah Irigasi
Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. (Sumber: 2)

Daerah Irigasi Kabupaten/Kota
Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. (Sumber: 2)

Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota
Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi. (Sumber: 2)

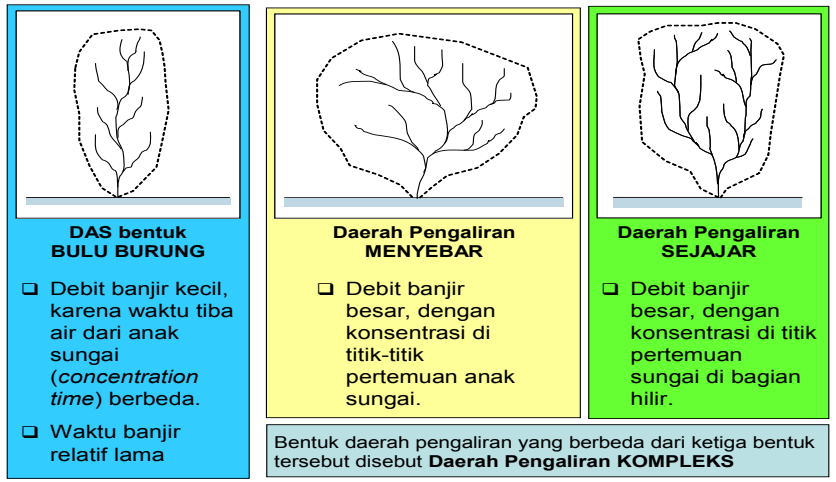

Gambar 1.03 Geometri DAS (Sumber : 48)

Daerah Irigasi Lintas Provinsi
Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara.
(Sumber: 2)

Daerah Irigasi Lintas Negara
Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu negara. (Sumber: 2)

Daerah Irigasi Strategis Nasional
Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 10.000 ha yang mempunyai fungsi dan manfaat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan nasional.(Sumber: 2)

Daerah Tangkapan Air
Suatu daerah yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa punggung-punggung bukit atau gunung yang menampung air hujan yang jatuh diatasnya dan kemudian mengalirkannya melalui anak sungai dan sungai ke laut atau ke danau.
(Sumber: 30)

Danau
Bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. (Sumber: 7)

Daya Air
Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. (Sumber: 1)

Daya Dukung Sumber Daya Air
Kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. (Sumber: 1)

Daya Tampung Air dan Sumber Air
Kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. (Sumber: 1)

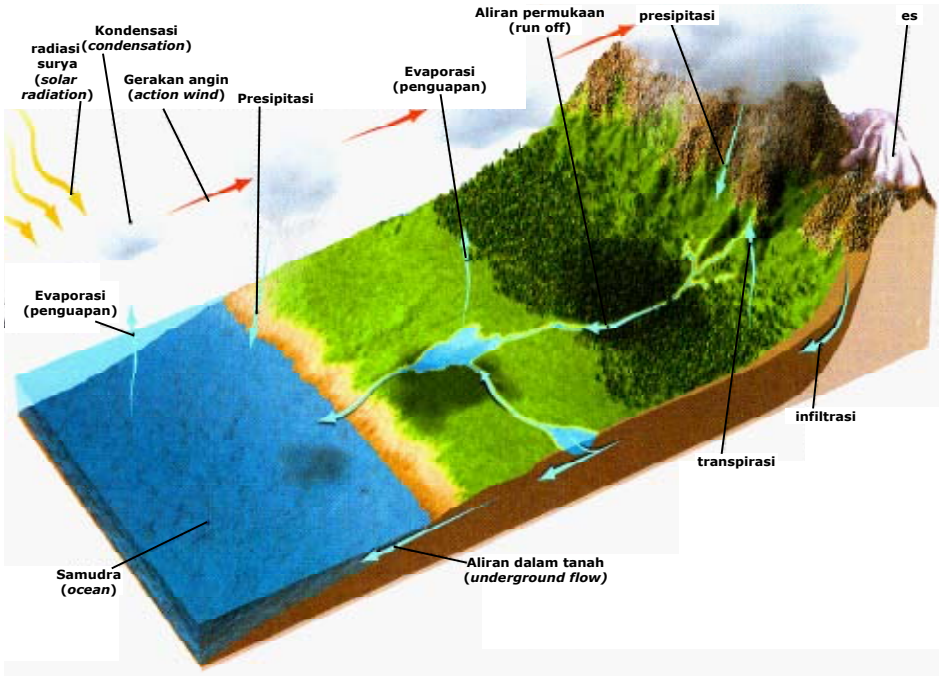

Gambar 1.04 Daur Hidrologi (Sumber : 47)

Daya Rusak Air
Daya air yang dapat merugikan kehidupan.
(Sumber: 1)

Debit Aliran
Volume air yang mengalir melalui penampang melintang sungai atau saluran dalam satuan waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan Liter/detik atau m^3/detik. (Sumber: 22)

Debit Aliran Dasar
Aliran bawah permukaan ditambah aliran yang berasal dari air tanah.
(Sumber: 17)

Debit Aliran Permukaan
Air yang masuk ke dalam sungai melalui permukaan tanah dan bawah permukaan.
(Sumber: 17)

Debit Banjir Maksimum Tahunan
Debit aliran sesaat dengan puncak hidrograf tertinggi selama satu tahun pencatatan. (Sumber: 17)

Debit Banjir Rencana
Debit maksimum dari suatu sungai, atau saluran yang besarnya didasarkan kala ulang tertentu. (Sumber: 17)

Debit Desain
Besarnya debit banjir maksimum yang ditentukan berdasarkan kala ulang, faktor keamanan, ekonomi, dan sosial.
(Sumber: 17)

Debit Rencana
Debit untuk perencanaan suatu bangunan air. (Sumber: 28)

Debit Puncak
Debit yang terbesar pada suatu periode tertentu. (Sumber: 28)

Degradasi Sungai
Penurunan dasar sungai akibat penggerusan. (Sumber: 28)

Dewan Sumber Daya Air
Lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, dan dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain. (Sumber: 10)

Dewatering
Usaha pengeringan dengan berbagai cara, misal pemompaan. (Sumber: 28)

E

El Nino
Fenomena perubahan cuaca di daerah pantai utara Peru dan Ekuador yang terjadi pada setiap beberapa tahun, menyebabkan menghangatnya suhu permukaan Samudra Pasifik, dan berdampak luas pada perubahan cuaca di beberapa bagian dunia. (Sumber: 40)

Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa
Serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan air secara optimal dan pelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa. (Sumber: 6)

Eksploitasi Sungai
Usaha pengaturan dan pengalokasian sumber daya air dan sumber daya alam lainnya yang berada di sungai untuk tujuan pendayagunaan secara optimum.
(Sumber: 7)

Embung/Waduk Lapangan
Tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan. (Sumber: 5)

Erosi
Pengikisan permukan atau struktur tanah oleh aliran air, gletser, angin dan gelombang laut. (Sumber: 44)

Evaporasi
Proses fisik dimana air bertransformasi menjadi benda gas. Dalam irigasi, penguapan adalah uap air yang hilang dari tanah dan permukaan air.
(Sumber: 42)

F

Flood Forecasting (Perkiraan Banjir)
- Prediksi dari suatu keadaan banjir yang akan terjadi dimasa depan (waktu, kedalaman, pengeluaran dll) adalah terkait dengan informasi

terkini. Prediksi dari waktu banjir berdasarkan analisa data meteorologi suhu, misalnya arah gerakan badai, curah hujan awal, kelembaban udara, pergerakan suhu, angin dll. Analisa atas informasi semacam itu yang terkait dengan tanggap keadaan arus dan sifat utama dapat memberikan suatu alasan pemberian peringatan bahaya bencana banjir. Akumulasi dan analisa data yang cepat, penyebaran dari tanda peringatan, adalah penting bagi kehandalan dari suatu prakiraan banjir.

- Ilmu pengetahuan mengenai prakiraan ketinggian air, pengeluaran air, waktu timbulnya banjir dan masa banjir, khususnya puncaknya luapan banjir disuatu titik khusus di sungai, yang merupakan dampak dari curah hujan dan/atau salju yang mencair dan berdasarkan kondisi meteorologi dan hidrologi. Tujuan dari prakiraan banjir adalah untuk mendapatkan waktu curah hujan yang sebenarnya dan data arus melalui gelombang mikro, sistem radio, atau jaringan komunikasi satelit, memasukkan data melalui program penelusuran aliran arus dan luapan curah hujan, dan memprakirakan laju arus banjir dan ketinggian air untuk suatu kurun mulai dari lingkup beberapa jam sampai dengan beberapa hari kedepan, tergantung pada skala dari terjunan/percikan air. (Sumber: 44)

Flood Warning
Peringatan dini akan adanya banjir. (Sumber: 7)

Forum Koordinasi Daerah Irigasi
Sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi. (Sumber: 2)

G

Gambut
Tanah yang terdiri dari sisa-sisa tanaman yang telah busuk. (Sumber: 24)

Garis Sempadan Jaringan Irigasi
Batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan. (Sumber: 2)

Garis Sempadan Sungai
Garis batas kiri kanan saluran yang menetapkan daerah yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan saluran. (Sumber: 7)

Gorong-Gorong
Bangunan air yang dibangun di tempat-tempat dimana saluran melewati bawah bangunan (jalan, rel kereta api dan lain-lain). (Sumber: 45)

Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Air yang dilakukan oleh seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait *(Stake Holder)* yang bertujuan untukmengembalikan keseimbangan siklus hodrologi pada seluruh wilayah DAS kritis di seluruh Indonesia. (Sumber: 29)

Groin
Struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai, dan bahan konstruksinya umumnya kayu, baja, beton (pipa beton), dan batu. (Sumber: 35)

Groundsill
Bangunan pemecah arus. (Sumber: 25)

H

Hak Guna Air
Hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. (Sumber: 1)

Hak Guna Usaha Air
Hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. (Sumber: 1)

Hak Pakai Air
Hak untuk memperoleh dan memakai air. (Sumber: 1)

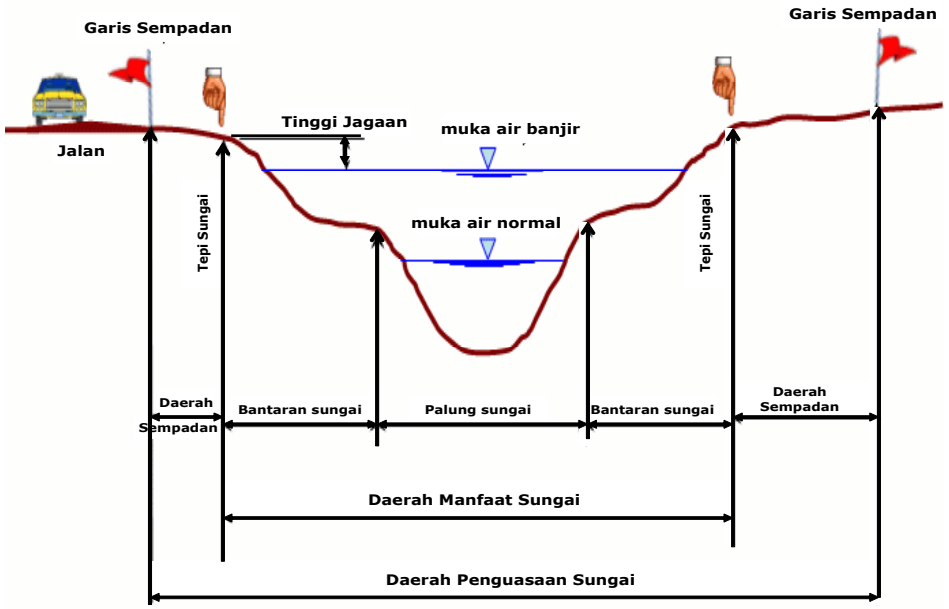

Gambar 1.05 Garis Sempadan Sungai (Sumber : 49)

Hilir
Bagian sungai sebelah muara. (Sumber: 46)

Hujan Buatan
Istilah yang digunakan oleh instansi BPPT dalam pelaksanaan pekerjaan modifikasi cuaca yang bertujuan mempercepat proses jatuhnya curah hujan di tempat tertentu. (Sumber: 22)

Hulu
Bagian atas (sungai dsb). (Sumber: 46)

Hutan Bakau
Komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, berfungsi sebagai tempat wisata dan penghasil kayu, peredam gelombang dan angin badai, pelindung erosi, penahan lumpur dan penangkap sedimen. (Sumber: 39)

I

Infiltrasi
Rembesan air melalui celah batuan. (Sumber: 32)

Inspeksi Rutin Jaringan Irigasi
Pemeriksaan jaringan irigasi yang dilakukan secara rutin setiap periode tertentu (10 atau 15 hari sekali) untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi. (Sumber: 12)

Intensitas Hujan
Tinggi curah hujan dalam periode tertentu, dinyatakan dalam satuan mm/jam. (Sumber: 17)

Intrusi Air Laut
Perembesan air laut ke dalam lapisan tanah yang menuju ke daratan, sehingga terjadi percampuran air laut dengan air tanah. (Sumber: 46)

Irigasi
Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang

pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. (Sumber: 2)

Irigasi Pompa
Irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa maupun tenaga penggerak sejenis beserta dengan perlengkapannya. (Sumber: 9)

Izin Prinsip Alokasi Air
Penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi, dan memuat persyaratan antara lain peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya. (Sumber: 2)

J

Jalan Inspeksi Jaringan Irigasi
Jalan sepanjang saluran irigasi dan pembuang untuk keperluan inspeksi. (Sumber: 28)

Jalur Limpasan *(Spillway)*
Sebuah jalur atau jalan air untuk membuang kelebihan air
Sebuah pekerjaan yang lebih pada bendungan atau hilir dari bendungan pada punggung samping, dalam bentuk sebuah pipa terbuka atau tertutup.
(Sumber: 44)

Jaringan Irigasi
Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. (Sumber: 2)

Jaringan Irigasi Desa
Jaringan irigasi yang dibangun, digunakan, dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
(Sumber: 2)

Jaringan Irigasi Primer
Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, yang dilengkapi dengan saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap lainnya.
(Sumber: 2)

Jaringan Irigasi Sederhana
Jaringan irigasi yang mempunyai bangunan semi permanen, dan tidak mempunyai alat pengukur dan pengontrolan aliran, sehingga aliran tidak dapat diatur dan diukur. Pembangunan dan atau penyempurnaannya biasanya mendapatkan bantuan pemerintah. Namun pengelolaan dan pengoperasiannya dilakukan oleh aparat desa. (Sumber: 34)

Jaringan Irigasi Sekunder
Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
(Sumber: 2)

Jaringan Irigasi Semi Teknis
Jaringan irigasi yang memiliki sedikit bangunan permanen. Dan hanya satu alat pengukur aliran yang biasanya ditempatkan pada bandungan bendung. Sistem pemberian air dan sistem pembangunan air tidak mesti sama sekali terpisah. Pengaliran air ke sawah yang dapat diatur, tetapi banyaknya aliran tidak dapat diukur. Pembagian air tidak dapat dilakukan dengan seksama.
(Sumber: 34)

Jaringan Irigasi Teknis
Jaringan yang sudah memisahkan antara sistem irigasi, pembuang, dan jaringan tersier.
(Sumber: 28)

Jaringan Irigasi Tersier
Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
(Sumber: 2)

Jaringan Reklamasi Rawa
Keseluruhan saluran baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan pelengkapnya, yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian, dan penggunaan air. (Sumber: 6)

K

Kantong Lumpur
Bangunan untuk mengendapkan dan menampung lumpur yang pada waktu tertentu dibilas. (Sumber: 28)

Kapasitas Pompa Air
Daya pompa air yang dapat mengalirkan sejumlah debit air dalam satuan waktu. (Sumber: 20)

Kapasitas Tampungan Waduk
Kemampuan suatu waduk menampung sejumlah air sampai pada tinggi normal. (Sumber: 23)

Karakteristik Saluran
Data saluran berupa debit, kemiringan talut, dan sebagainya. (Sumber: 28)

Kavitasi
Terjadinya tekanan lebih kecil dari 1 atm, yang mengakibatkan gelembung-gelembung udara pada permukaaan badan bendung, menimbulkan lubang-lubang karena terlepasnya butiran-butiran agregat dari pemukaan konstruksi.
(Sumber: 28)

Kawasan Lindung Sumber Air
Kawasan yang memberikan fungsi lindung pada sumber air, misalnya daerah sempadan sumber air, daerah resapan air, dan daerah sekitar mata air.
(Sumber: 1)

Keandalan Air Irigasi
Kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.
(Sumber: 2)

Keandalan Prasarana Irigasi
Kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal. (Sumber: 2)

Kecepatan Aliran
Laju aliran air untuk menempuh lintasan air pada satuan waktu tertentu.
(Sumber: 19)

Kedalaman Sungai/Saluran Terbuka
Jarak yang diukur ke arah vertikal dari muka air ke dasar sungai/saluran terbuka.
(Sumber: 15)

Kelas Air
Peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. (Sumber: 4)

Ketahanan Pangan
Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. (Sumber: 3)

Kolam Tandon Air
Tempat penampungan air, dalam kondisi cukup jernih dan mempunyai temperatur antara 20o – 30o. (Sumber: 20)

Komisi Irigasi Antarprovinsi
Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi lintas provinsi. (Sumber: 2)

Komisi Irigasi Kabupaten/Kota
Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota. (Sumber: 2)

Komisi Irigasi Provinsi
Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait. (Sumber: 2)

Komisi Irigasi Kabupaten/Kota
Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota. (Sumber: 2)

Konservasi Lahan
Usaha pemanfaatan lahan dalam usaha tani dengan memperhatikan kelas kemampuannya dan dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air agar lahan dapat digunakan secara lestari. (Sumber: 30)

Konservasi Rawa
Pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasar pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber dari dan/atau meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya. (Sumber: 6)

Konservasi Sumber Daya Air
Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. (Sumber: 1)

L

La Nina
Fenomena mendinginnya suhu air laut di daerah Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang terjadi setiap beberapa tahun dan berdampak pada perubahan cuaca di beberapa bagian dunia. (Sumber: 40)

Lahan Sawah Pasang Surut
Lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (Sumber: 29)

Lahan Potensial Sawah
Bagian dari luas potensial yang dapat dijadikan sawah, yang kondisinya masih berbentuk hutan semak-semak, padi ladang, dikurangi luas potensial. (Sumber: 45)

Lahan Kritis
Lahan yang keadaannya membahayakan stabilitas dan kelangsungan tata air serta alam lingkungan, atau lahan pertanian yang sudah tidak lagi subur untuk ditanami. (Sumber: 29)

Lahan Potensial Kritis
Tanah-tanah yang masih produktif bila diusahakan untuk usaha pertanian, tetapi bila dalam pengelolaannya tidak menggunakan kaidah-kaidah konservasi tanah, maka tanah akan rusak dan cenderung menjadi lahan semi kritis atau lahan kritis.
(Sumber: 30)

Lahan Semi Kritis/Hampir Kritis
Tanah-tanah yang kurang produktif akibat terjadinya erosi, tetapi masih dapat diusahakan untuk usaha pertanian, namun demikian produktivitasnya relatif rendah. (Sumber: 30)

Longsoran lumpur ***(mudflow)*** **Longsoran tanah** ***(earthflow)*** **Longsoran batu** ***(rockslide)***

Gambar 1.06 Longsor (Sumber : 47)

Lereng
Sisi (bidang, tanah) yang landai atau miring. (Sumber: 46)

Limpasan Tanggul
Aliran yang melewati tanggul/tebing sungai. (Sumber: 28)

Longsor
Suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula (sehingga terpisah dari massa yang mantap), karena pengaruh gravitasi, serangan arus, gempa, dan lain-lain, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi. (Sumber: 14)

Luas Minimal Daerah Irigasi
Perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar satu hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. (Sumber: 2)

Luas Lahan Rencana (Luas Lahan Baku) Irigasi
Luas bersih dari suatu daerah irigasi, yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irigasi. (Sumber: 45)

Luas Potensial
Bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan skunder) telah selesai dibangun. (Sumber: 45)

M

Meandering
Aliran sungai yang berkelok-kelok dan berpindah-pindah, akibat sedimentasi. (Sumber: 28)

Modifikasi Cuaca
Upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca, seperti kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan. (Sumber: 1)

Morfologi Sungai
Bentuk dan keadaan alur sungai sehubungan dengan alirannya.
(Sumber: 28)

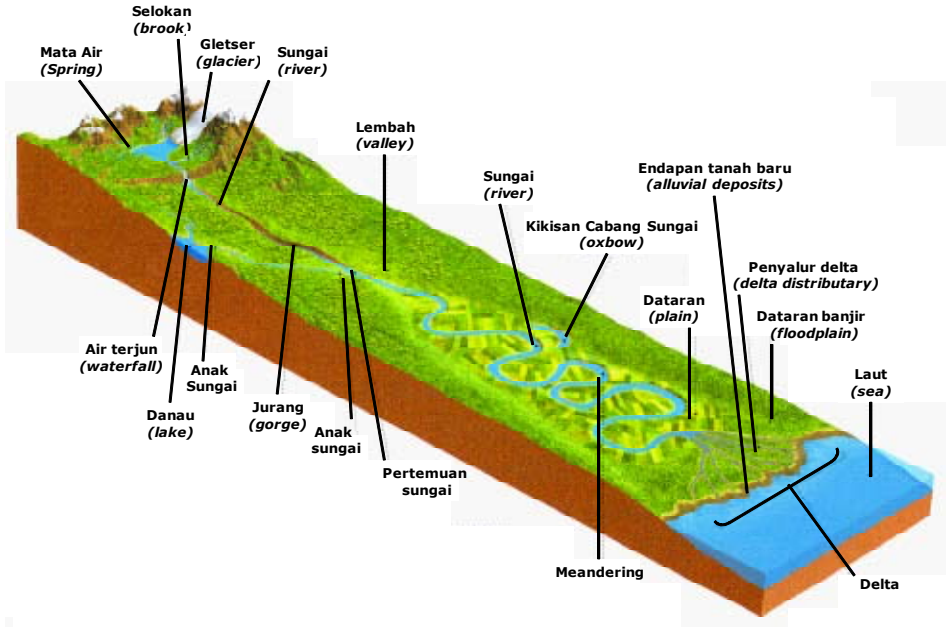

Gambar 1.07 Meandering (Sumber : 47)

N

Neraca Air
Keseimbangan air, membandingkan air yang ada, air hilang dan air yang dimanfaatkan. (Sumber: 28)

Normalisasi Saluran
Tindakan mengembalikan kondisi saluran (dimensi maupun garis sempadan) yang ada ke kondisi awal sesuai perencanaan. (Sumber: 46)

O

Operasi Sumber Daya Air
Kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. (Sumber: 1)

Operasi Jaringan Irigasi
Upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. (Sumber: 2)

P

Palung Sungai
Cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu. (Sumber: 7)

Pasang Surut Laut
Gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara laut, matahari, dan bulan. (Sumber: 43)

Pemanasan Global *(Global Warming)*
Fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca *(greenhouse effect)* yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitrooksida (N_2O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. (Sumber: 31)

Pembagian Air Irigasi
Kegiatan membagi air di bangunan bagi maupun bangunan sadap dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder. (Sumber: 2)

Pembuangan Air Irigasi/Drainase
Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu melalui saluran pembuangan. (Sumber: 2)

Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi
Usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi yang dilaksanakan secara berkala. (Sumber: 12)

Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. (Sumber: 2)

Pemeliharaan Sumber Daya Air
Kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. (Sumber: 1)

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
Usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi yang dilaksanakan setiap waktu.
(Sumber: 12)

Pemeliharaan Sungai
Usaha-usaha yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sungai sebagai sumber daya, serta untuk menjamin kelestarian fungsi bangunan sungai. (Sumber: 7)

Penampang Basah Sungai/Saluran Terbuka
Penampang melintang sungai/saluran terbuka yang dibatasi oleh dasar sungai dan muka air. (Sumber: 15)

Penataan Ulang Sistem Irigasi
Pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.
(Sumber: 2)

Pencetakan Sawah
Kegiatan mengubah fungsi areal tanah bukan sawah menjadi sawah beririgasi. (Sumber: 8)

Pendayagunaan Sumber Daya Air
Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. (Sumber: 1)

Penelusuran Jaringan Irigasi
Kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi. (Sumber: 2)

Pengamanan Jaringan Irigasi
Upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami. (Sumber: 11)

Pengaturan Air Irigasi
Kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi. (Sumber: 2)

Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani
Segala usaha pendayagunaan air pada petak-petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan arela pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya. (Sumber: 9)

Pengelolaan Aset Irigasi
Proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin. (Sumber: 2)

Pengelolaan Jaringan Irigasi
Kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. (Sumber: 2)

Pengelolaan Sumber Daya Air
Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
(Sumber: 1)

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
Pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antar sektor dan antar wilayah administrasi. (Sumber: 1)

Pengelolaan Sumber Daya Air Berwawasan Lingkungan
Pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.
(Sumber: 1)

Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan
Pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. (Sumber: 1)

Pengembangan Daerah Rawa
Pematangan dan pemanfaatan lahan tanah di daerah-daerah rawa antara lain untuk pertanian. (Sumber: 45)

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
Penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
(Sumber: 11)

Pengembangan Jaringan Irigasi
Pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. (Sumber: 2)

Pengembangan Sungai
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sungai sebesar-besarnya tanpa merusak keseimbangan sungai dan lingkungannya. (Sumber: 7)

Pengendalian Daya Rusak Air
Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. (Sumber: 1)

Pengendalian Sungai
Upaya untuk lebih memantapkan aliran sungai sepanjang tahun, guna memperoleh kemanfaatan sungai sebesar-besarnya, dan mengurangi/meniadakan daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya. (Sumber: 7)

Pengguna Jaringan Irigasi
Pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri. (Sumber:2)

Penggunaan Air Irigasi
Kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. (Sumber: 2)

Peningkatan Jaringan Irigasi
Kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. (Sumber: 2)

Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa
Peningkatan kemampuan pelayanan dari tingkat pelayanan yang telah dicapai sebelumnya. (Sumber: 6)

Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)
Suatu fenomena alam turunnya permukaan tanah yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan, beban bangunan yang berlebihan, konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta pengaruh gaya-gaya tektonik. (Sumber: 33)

Penyediaan Air Irigasi
Penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. (Sumber: 2)

Perbaikan Jaringan Irigasi
Usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran dan/atau bangunan irigasi secara parsial. (Sumber: 12)

Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi
Kegiatan penanggulangan yang berupa perbaikan dan bersifat darurat akibat suatu bencana agar saluran dan/atau bangunan dalam satu sistem jaringan irigasi dapat segera berfungsi.
(Sumber: 12)

Perencanaan Sumber Daya Air
Suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. (Sumber: 1)

Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Suatu proses perancangan pemeliharaan jaringan irigasi sebelum pelaksanaan pemeliharaan dimulai yang meliputi inspeksi, survei, desain, dan penyusunan program. (Sumber: 12)

Perkolasi
Gerakan air dalam tanah dengan arah vertikal ke bawah. (Sumber: 28)

Perlindungan Sungai
Upaya pengamanan sungai terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia dan alam.
(Sumber: 7)

Pertanian Rakyat
Budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga. (Sumber: 1)

Petak Irigasi
Petak lahan yang memperoleh air irigasi. (Sumber: 5)

Petak Primer
Petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer. (Sumber: 2)

Petak Sekunder
Petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. (Sumber: 2)

Petak Tersier
Kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier. (Sumber: 2)

Pintu Air Otomatis
Pintu air yang dapat membuka dan menutup secara otomatis akibat perbedaan tinggi muka air di hulu dan di hilir bangunan. (Sumber: 24)

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
Kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (Sumber: 1)

Polder
Cekungan tanah alami atau kolam buatan yang digenangi air dan dikelilingi tanggul, tinggi rendah air diatur oleh sejumlah parit yang bermuara di induk parit, dan pada induk parit terdapat mesin pompa untuk membuang air yang berlebihan. (Sumber: 46)

Pos Duga Air
Bangunan di sungai yang dipilih untuk mengamati tinggi muka air secara sistematik agar dapat berfungsi untuk menentukan debit.
(Sumber: 16)

Prasarana Sumber Daya Air
Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. (Sumber: 1)

Prinsip Satu Sistem Irigasi Satu Kesatuan Pengembangan dan Pengelolaan
Dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
(Sumber: 2)

R

Rawa
Lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. (Sumber: 6)

Rawa Lebak/rawa non pasang surut/ rawa pedalaman
Rawa yang terletak jauh dari pantai sehingga tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. (Sumber: 41)

Rawa Pasang Surut
Tanah rawa yang datar dan rendah melintang oleh saluran interlace dan tidal sloughs dan biasanya tergenang saat pasang. (Sumber: 42)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. (Sumber: 2)

Rehabilitasi Lahan
Kegiatan pemulihan kemampuan sumberdaya lahan pertanian yang telah mengalami degradasi lahan.
(Sumber: 30)

Rehabilitasi Rawa
Pengembalian kemampuan pelayanan jaringan reklamasi rawa seperti keadaan semula. (Sumber: 6)

Reklamasi Rawa
Upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas. (Sumber: 6)

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
Hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air. (Sumber: 1)

Revetment
Batu atau material lain yang digunakan untuk memperkuat dinding, dll.
(Sumber: 40)

Rip-Rap
Susunan bongkahan batu alam atau blok-blok beton buatan dengan ukuran dan volume tertentu yang digunakan antara lain sebagai tambahan peredam energi di hilir bendung dan sebagai lapisan perisai untuk mengurangi kedalaman penggerusan setempat dan untuk melindungi tanah dasar di hilir peredam energi bendung. (Sumber: 34)

S

Saluran Irigasi Air Tanah
Bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi. (Sumber: 2)

Saluran Primer
Saluran utama dari jaringan reklamasi rawa yang berfungsi baik untuk pembuangan maupun pemberian air. (Sumber: 6)

Saluran Sekunder
Cabang utama dari saluran primer rawa yang berfungsi untuk pembuangan maupun pemberian air. (Sumber: 6)

Saluran Suplesi
Saluran pembawa yang berfungsi membawa/mengalirkan air yang disuplesikan ke saluran pembawa atau ke sungai. (Sumber: 45)

Saluran Tersier
Cabang saluran sekunder yang berfungsi baik sebagai pembuangan maupun pemberian air. (Sumber: 6)

Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional)
Sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran melalui sistem jaringan irigasi melalui sistem jaringan irigasi.
(Sumber: 45)

Seawall
Dinding banjir yang berfungsi sebagai pelindung/penahan terhadap kekuatan gelombang. (Sumber: 42)

Sedimen Abrasif
Sedimen yang terdiri dari pasir keras dan tajam bersama dengan aliran dapat menimbulkan erosi pada permukaan konstruksi. (Sumber: 28)

Sedimen Dasar
Sedimen pada dasar sungai/saluran. (Sumber: 28)

Sedimen Layang
Sedimen di dalam air, yang melayang karena gerakan air.
(Sumber: 28)

Sedimentasi
Proses dimana sedimen yang terjadi karena penghambatan pada aliran air terdeposit pada saluran air, saluran pembuangan terbuka atau pada pipa pembuang. (Sumber: 44)

Siphon
Bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi yang melewati bagian bawah saluran pembuang, cekungan, anak sungai atau sungai. (Sumber: 45)

Sistem Drainase Makro
Jaringan drainase yang mengumpulkan air buangan dari jaringan drainase mikro dan menyalurkannya ke sistem pembuang alamiah terdekat seperti sungai, danau, dan (Sumber: 38)

Sistem Drainase Mikro
Jaringan drainase yang melayani suatu kawasan perkotaan yang telah terbangun (luas tipikal sekitar 10 Ha) seperti perumahan, kawasan perdagangan, industri, pasar, atau komplek pertokoan.
(Sumber: 38)

Sistem Irigasi
Prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
(Sumber: 12)

Subak
Masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi dibidang tata guna air ditingkat usaha tani. (Sumber: 45)

Sudetan
Alur baru yang dibuat di luar alur sungai lama untuk keperluan-keperluan pengelakan aliran, penurunan muka air banjir, dan pembangunan bendung. (Sumber: 28)

Sumber Air
Tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
(Sumber: 1)

Sumber Daya Air
Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. (Sumber: 1)

Sumur Air Tanah Dalam
Sarana penyediaan air bersih berupa sumur dalam yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman muka air minimal 7 meter dari permukaan tanah dan kedalaman dasar lebih dari 30 meter. (Sumber: 27)

Sumur Pemeriksaan
1. Sebuah sumur yang tidak dipompa dan digunakan untuk mengamati peningkatan permukaan air di bawah tanah atau permukaan piezometrik.
2. Sumur yang digunakan untuk mengamati suatu hasil, tetapi umumnya pada kondisi yang berbahaya, seperti gangguan pada kandungan air asin atau polutan yang terdapat pada air tanah. (Sumber: 42)

Sungai
Tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. (Sumber: 7)

T

Talang Air
Bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi yang melewati bagian atas saluran pembuang, cekungan, anak sungai atau sungai. (Sumber: 45)

Tanggul Banjir
Konstruksi untuk mencegah terjadinya banjir di belakang tanggul tersebut.
(Sumber: 28)

Tanggul Sungai
Sebuah bendungan rendah atau dinding yang menyeberangi sebuah sungai untuk menaikan tingkat hulu. (Sumber: 44)

Tata Air
Susunan dan letak air, yaitu semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah (tidak termasuk dalam pengertian ini air terdapat di laut). (Sumber: 45)

Tata Pengairan
Susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu. (Sumber: 45)

Tebing Sungai
Sisi alamiah sungai yang membatasi pengaliran sungai pada ketinggian air normal. (Sumber: 45)

Terasering
Bangunan konservasi tanah yang dibuat sejajar garis kontur yang dilengkapi saluran peresapan, saluran pembuangan air (SPA) serta tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi. (Sumber: 30)

Terowongan
Saluran yang membawa air menembus bukit-bukit dan medan yang tinggi, yang pada tempat-tempat tertentu diperkuat dengan pasangan. (Sumber: 45)

Tetrapod
Salah satu jenis konstruksi pemecah gelombang *(Break Water).* (Sumber: 36)

Tinggi Muka Air (*Water Level*)
Elevasi permukaan air pada suatu penampang melintang sungai terhadap suatu titik elevasi tertentu.
(Sumber: 22)

W

Waduk
Wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. (Sumber: 7)

Waduk Kaskade
Beberapa waduk yang dibangun pada satu sungai yang sama dan biasanya beroperasi dalam satu sistem integrasi. (Sumber: 23)

Wilayah Sungai
Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. (Sumber: 1)

Wilayah Pantai
Wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. (Sumber: 37)

Z

Zona Pemanfaatan Sumber Air
Ruang pada sumber air (waduk, danau, rawa, atau sungai) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budidaya. (Sumber: 1)

SUMBER:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1991 Tentang Rawa
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1991 Tentang Sungai
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 1980 tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 32 / PRT / M / 2007 Tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
13. SNI 03-0090-1999 Tentang Spesifikasi Bronjong Kawat
14. SNI 03-3441-1994 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Pelindung Tebing Sungai dari Pasangan Batu
15. SNI 03-2819-1992 tentang Metode Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka dengan Alat Ukur Arus Tipe Baling-Baling
16. SNI 03-2526-1991 tentang Metode Pemilihan Lokasi Pos Duga Air di Sungai
17. SNI 03-2415-1991 tentang Metode Perhitungan Debit Banjir
18. SNI 03-1731-1989 tentang Tata Cara Keamanan Bendungan
19. Revisi SNI 03-3409-1994 Tentang Tata Cara Pengukuran Kecepatan Aliran Pada Uji Model Hidraulik Fisik (UMH-Fisik) Dengan Alat Ukur Kecepatan Aliran Tipe Tabung Pilot
20. Revisi SNI 03-3965-1995 Tentang Tata Cara Pembuatan Model Fisik Sungai Dengan Dasar Tetap
21. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. Pd T-09-2004-A tentang Perencanaan Bendung Karet Isi Udara
22. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. Pd T-20-2004-A tentang Monitoring dan Evaluasi Hasil Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dalam Rangka Pengisian Waduk
23. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. Pd T-21-2004-A tentang Pengoperasian Waduk Kaskade Berpola Listrik-Listrik Multiguna
24. Adhi Widjaja, dkk. 1997. Pengelolaan Tanah dan Air di Lahan Pasang Surut. Proyek Penelitian Pengembangan Pertanian Rawa Terpadu-ISDP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. www.pustaka-deptan.go.id
25. Anonim. 2003. "*Section Groundsill*" Progo Diperbaiki Maret . www.indomedia.com
26. Anonim. 2005. Kalau Pemkab Magelang Jual Air ke Yogyakarta. www.digilib.ampl.or.id
27. Anonim. 2008. Sumur Dalam. www.dimsum.its.ac.id
28. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. Pedoman / Petunjuk Teknik dan Manual Irigasi (Standar Perencanaan Irigasi).
29. Departemen Kehutanan
30. Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian. 2007. Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu (PUKLT). www.pla.deptan.go.id
31. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. 2007. Pemanasan Global. www.geo.ugm.ac.id
32. Hindarko. 2002. Manfaatkan Air Tanah tanpa Merusak Kelestariannya. ESHA. Jakarta
33. Kelompok Keilmuan Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Pemantauan Penurunan Tanah (Land Subsidence) di Kota-Kota Besar dengan GPS. www.geodesy.gd.itb.ac.id
34. Mawardi, Erman dan Momed. Mohd. 2002. Desain Hidraulik Bendung Tetap untuk Irigasi Teknis. ALFABETA. Bandung
35. Penyusunan Arahan Pemanfaatan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan) Ditjen Tata Ruang, 2007
36. Pusat Komunikasi Publik Departemen Pekerjaan Umum. 2006. Pulau Nipah Prioritas Tinggi untuk Dikembangkan. www.penataanruang.net
37. Sampurno. Pengembangan Kawasan Pantai Kaitannya dengan Geomorfologi. Proceeding Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global. Departemen Geologi Institut Teknologi Bandung
38. Soenarno. 2004. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Banjir dan Drainase Perkotaan. www.air.bappenas.go.id
39. Wahyundari, I Gusti Ayu Putu. 2007. Bahaya Abrasi dan Penanggulangannya. www.baliprov.go.id
40. Wehmeier, Sally. 2005. Oxford Advanced Learner's Dictionary.7th edition.Oxford University Press.New York
41. Website Staf Akademik Universitas Gajah Mada (www.bws.staff.ugm.ac.id)
42. Kamus Intranet Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (wrdc.net)
43. Webiste Wikipedia Indonesia (www.id.wikipedia.org)
44. Kamus Teknik Multibahasa ICID (*International Commission on Irrigation and Drainage*) tentang Irigasi dan Drainase
45. Website Departemen Pekerjaan Umum (www.pu.go.id)
46. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (www.pusatbahasa.diknas.go.id)
47. Corbell, Jean-Claude dan Archambault Ariane. 2007. The Visual Dictionary with Definitions. QA International Canada
48. Bahan Rapat Panitia Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tata Ruang.2007. Kawasan Berbentuk Hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS)
49. Website Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur (www.dpuairjatim.org)
50. Website Universitas Negeri Malang (www.malang.ac.id)

BINA MARGA

A

Agregat
Sekumpulan butir – butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya berupa hasil alam atau buatan. (Sumber: 38)

Agregat Halus
Pasir alam sebagai hasil disintegrasi secara alami dari batu atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar 5 mm. (Sumber: 31)

Agregat Kasar
Kerikil sebagai disintegrasi alami dari batu atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 5 mm – 40 mm. (Sumber: 33)

Air Agresif
Air yang mengandung zat/bahan yang dapat merusak beton. (Sumber: 36)

Air Agresif Sedang
Air yang mengandung air limbah industri, air payau dan air laut. (Sumber: 36)

Air Agresif Kuat
Air yang mengandung garam-garam agresif minimal 1500 ppm.
(Sumber: 36)

Aksesibilitas
Jumlah panjang jalan disuatu wilayah dalam satuan kilometer dibagi dengan luas wilayah tersebut dalam satuan kilometer persegi. (Sumber: 3)

Alinyemen Horizontal Jalan
Proyeksi garis sumbu jalan pada bidang horizontal. (Sumber: 33)

Alinyemen Vertikal Jalan
Proyeksi garis sumbu jalan pada bidang vertikal yang melalui sumbu jalan.
(Sumber: 35)

Angka Ekuivalen Beban Gandar Sumbu Kendaraan
Angka yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh lintasan beban gandar tunggal kendaraan terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh satu lintasan beban standar sumbu tunggal seberat 8,16 ton (18.000 lb). (Sumber: 34)

Aspal
Material bersemen berwarna coklat gelap ke hitam yang unsur utamanya adalah bitumen yang muncul di alam atau diperoleh dari pemrosesan petroleum. (Sumber: 47)

Aspal Buton (ASBUTON)
Aspal alam yang ada di pulau Buton (Indonesia), berbentuk serbuk sampai bongkahan yang terdiri atas campuran antara mineral dan bitumen.
(Sumber: 28)

Aspal Cair
Aspal hasil dari pelarutan aspal keras dengan pelarut berbasis minyak. (Sumber: 38)

Aspal Keras
Aspal hasil destilasi yang bersifat viskoelastis sehingga akan melunak dan mencair bila mendapat cukup pemanasan dan sebaliknya. (Sumber:38)

Aspal Polimer
Aspal keras yang dimodifikasi dengan polimer. Aspal polimer terdiri atas aspal plastomer dan elastomer. (Sumber: 28)

Audit Keselamatan Jalan
Suatu bentuk pengujian formal dari suatu ruas jalan yang ada dan yang akan datang atau proyek lalu lintas, atau berbagai pekerjaan yang berinteraksi dengan pengguna jalan, yang dilakukan secara independen, oleh penguji yang dipercaya di dalam melihat potensi kecelakaan dan penampilan keselamatan suatu ruas jalan. (Sumber: 33)

B

Badan Jalan
Meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. (Sumber: 39)

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
Badan yang dibentuk oleh menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada menteri. (Sumber: 1)

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)
Berbentuk perseroan terbatas yang didirikan khusus untuk membuat, menandatangani, serta melaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol. (Sumber: 10)

Bahu Jalan
Bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi atas, pondasi bawah, dan permukaan. (Sumber: 39)

Balok Girder
Balok di antara dua penyangga (pier atau abutment) pada jembatan yang berfungsi untuk menopang struktur diatasnya lantai jembatan. Balok yang berfungsi mendukung balok – balok lainnya yang lebih kecil dalam suatu konstruksi, umumnya merupakan balok I, tetapi bisa juga berbentuk box, atau bentuk lainnya. (Sumber: 47)

Balok Pondasi
Bagian bawah dari struktur bangunan bawah yang berfungsi melimpahkan beban dan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan bawah ke pondasi.
(Sumber: 29)

Bangunan Atas Jembatan
Bagian dari konstruksi jembatan yang berfungsi sebagai pemikul langsung beban lalu lintas yang melewatinya. (Sumber: 15)

Bangunan Bawah Jembatan
Bagian dari konstruksi jembatan yang berfungsi sebagai pemikul dari beban bangunan atas yang selanjutnya diteruskan kepada pondasi.
(Sumber: 15)

Bangunan Pelengkap Jalan
Bangunan yang menjadi bagian dari jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknik antara lain jembatan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran tepi jalan. (Sumber: 8)

Beban Sumbu Standar
Beban sumbu kendaraan yang dianggap mempunyai daya rusak sama dengan satu satuan, yaitu sebesar 18.000 lbs (8,16 ton) dengan konfigurasi *Single Axe-Dual Wheels*. (Sumber: 26)

Beton (Tidak Bertulang)
Campuran antara semen portland atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan membentuk massa padat. (Sumber: 36)

Beton Bertulang
Beton yang ditulangi besi baja dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang disyaratkan, kedua bahan tersebut bekerja bersama-sama dalam menahan beban.
(Sumber: 36)

Beton Normal
Beton yang menggunakan agregat alami dan mempunyai bobot isi 2200 – 2500 kg/m^3. (Sumber: 36)

Beton Pra Tegang
Beton bertulang yang telah diberikan tegangan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam beton akibat pemberian beban yang bekerja. (Sumber: 36)

Beton Pra Cetak
Beton yang dicetak di pabrik dan dipasang di lapangan. (Sumber: 47)

Bitumen
Sejenis substansi pengikat berwarna gelap atau hitam (Padat, semi – padat atau viskous), alami atau manufaktur, terdiri atas hidrokarbon bermolekul berat, diantaranya tar, asphaltene, malthene, dll. (Sumber: 47)

E

Elevasi Jalan
Titik ketinggian jalan yang umumnya di ukur dari finished grade titik bahu dalam atau pada as jalan terhadap suatu referensi ketinggian.
(Sumber: 47)

Epoxy
Bahan perekat untuk menyambung struktur beton yang mempunyai kekuatan

lebih besar dari kekuatan beton. (Sumber: 34)

F

***Falling Weight Deflectometer* (FWD)**
Alat untuk mengukur kekuatan struktur perkerasan jalan yang bersifat non-destruktif. (Sumber: 32)

Faktor Daya Rusak Jalan
Perbandingan antara daya rusak akibat muatan sumbu yang ada dan daya rusak oleh beban standar. (Sumber: 28)

G

Gandar
As mobil – kendaraan yang menjadi penopang semua beban dan tempat bertumpunya roda kendaraan. (Sumber: 47)

Garis Putus-Putus
Marka pembatas dua lajur jalan yang menunjukkan bahwa mendahului diperkenankan. (Sumber: 23)

Garis Utuh
Garis tidak terputus, memiliki panjang garis dan selang antara (interval) yang konsisten. (Sumber: 39)

H

Hambatan Samping
Segala gangguan lalu lintas di tepi jalan antara lain pejalan kaki, pedagang kaki lima, parkir. (Sumber: 3)

I

Indeks Permukaan
Angka yang dipergunakan untuk mnyatakan ketidakrataan dan kekokohan permukaan jalan yang berhubungan dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. (Sumber: 32)

***International Roughness Index* (IRI)**
Kerataan permukaan jalan yang dinyatakan dengan jumlah perubahan vertikal permukaan jalan untuk setiap satuan panjang jalan (mm/km). (Sumber: 3)

J

Jalan
Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (Sumber: 1)

Jalan Akses
Akhir dari jalur landai, tempat bertemu dengan tempat masuk jalan raya. (Sumber: 23)

Jalan Arteri
Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. (Sumber: 1)

Jalan Arteri Primer
Jalan arteri yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. (Sumber: 3)

Jalan Arteri Sekunder
Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. (Sumber: 3)

Jalan Bebas Hambatan
Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan. (Sumber: 1)

Jalan Desa
Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. (Sumber: 1)

Jalan Kabupaten
Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. (Sumber: 1)

Jalan Kecil
Jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 5,5 (lima setengah) meter. (Sumber: 1)

Jalan Kerikil
Jalan yang permukaannya terbuat dari lapisan yang diperkeras. (Sumber: 17)

Jalan Khusus
Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. (Sumber : 1)

Jalan Kolektor
Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. (Sumber: 1)

Jalan Kolektor 1
Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi. (Sumber: 7)

Jalan Kolektor 2
Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota. (Sumber: 7)

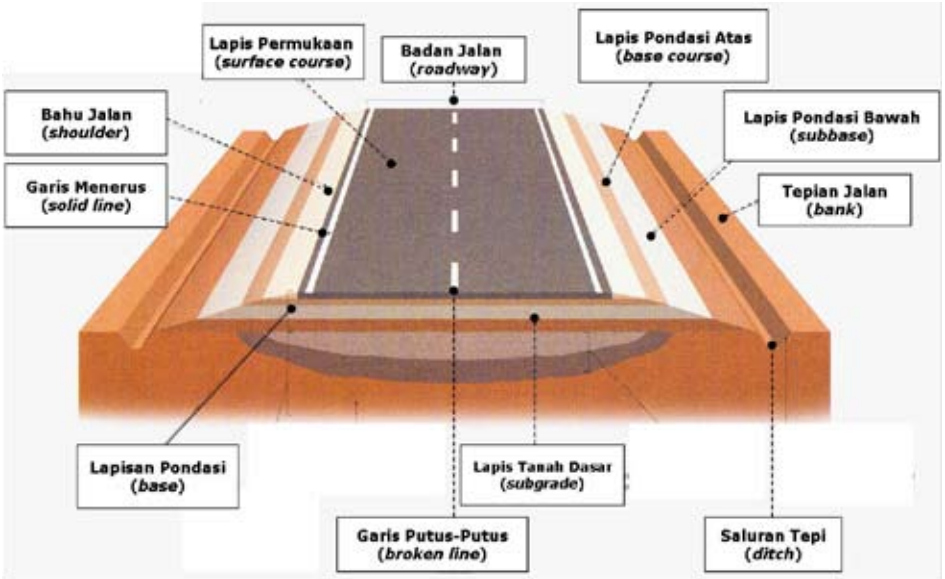

Gambar 2.01 Bagian-bagian Jalan (Sumber : 23)

Jalan Kolektor 3
Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota.
(Sumber: 7)

Jalan Kolektor Primer
Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. (Sumber: 3)

Jalan Kolektor Sekunder
Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga kolektor. (Sumber: 3)

Jalan Kota
Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. (Sumber: 1)

Jalan Layang
Jalan yang berada di atas permukaan tanah. (Sumber: 6)

Jalan Lingkar
Istilah bagi semua jalan yang melingkari pusat suatu kota; pada kota yang sangat besar terdapat jalan lingkar dalam, lingkar tengah dan lingkar luar; fungsinya adalah agar kendaraan di dalam kota dapat mencapai bagian kota tertentu tanpa harus melalui pusat kota atau bagian kota lainnya atau untuk mempercepat perjalanan dari satu sisi kota ke sisi lainnya. (Sumber: 21)

Jalan Lingkungan
Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. (Sumber: 1)

Jalan Lingkungan Primer
Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. (Sumber: 3)

Jalan Lingkungan Sekunder
Jalan menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. (Sumber: 3)

Jalan Lokal
Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. (Sumber: 1)

Jalan Lokal Primer
Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. (Sumber: 3)

Jalan Lokal Sekunder
Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. (Sumber: 3)

Jalan Mantap
Jaringan jalan dengan kondisi kemampuan pelayanan mantap, merupakan hasil penanganan akhir program pembinaan jalan sampai dengan tingkat struktur secara merata (Sumber: 17)

Jalan Nasional
Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. (Sumber: 1)

Jalan Penghubung
Jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada.
(Sumber: 6)

Jalan Poros
Jalan yang menghubungkan masing-masing stasiun permukiman atau lingkungan perumahan. (Sumber: 17)

Jalan Poros Perumahan
Jalan yang menghubung masing-masing satuan pemukiman atau lingkungan perumahan. (Sumber: 17)

Jalan Provinsi
Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. (Sumber: 1)

Jalan Raya
Jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah. (Sumber: 1)

Jalan Sedang
Jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar paling sedikit 7 (tujuh) meter. (Sumber: 1)

Jalan Setapak
Jalan dipakai khusus untuk pejalan kaki biasanya menghubungkan kampung satu dengan lainnya/didaerah pegunungan (Sumber: 17)

Jalan Strategis Kabupaten
Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten. (Sumber: 1)

Jalan Strategis Nasional
Jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan. (Sumber: 1)

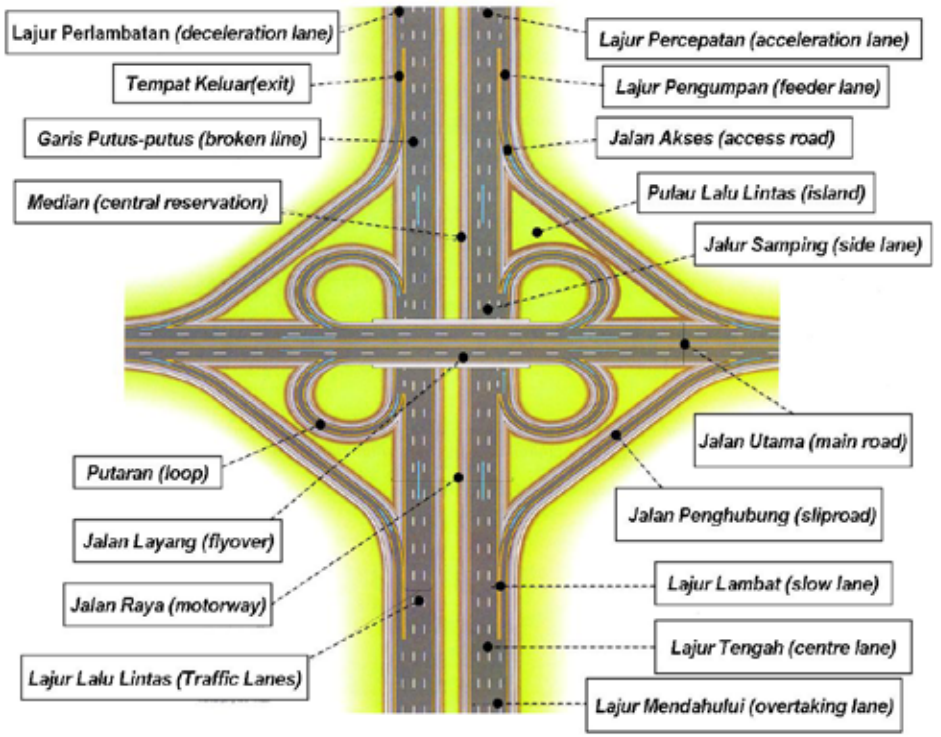

Gambar 2.02 Simpang Susun Semanggi (Sumber : 23)

Jalan Strategis Provinsi
Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; untuk jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas jalan provinsi dan jalan nasional. (Sumber: 1)

Jalan Tol
Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. (Sumber: 1)

Jalan Tol Trans Jawa
Jalan tol yang menyusuri Pesisir Utara Jawa mulai dari Merak – Jakarta – Cirebon – Semarang – Solo – Ngawi – Kertosono – Mojokerto – Surabaya. (Sumber: 41)

Gambar 2.03 Jalan Tol Transjawa (Sumber : 41)

Jalan Tanah
Jalan yang belum diperkeras dan masih terdiri atas lapisan tanah biasa. (Sumber: 17)

Jalan Tidak Mantap
Jaringan jalan dengan kondisi kemampuan pelayanan tidak mantap, merupakan hasil penanganan program pembinaan jalan sampai dengan tingkat struktur pondasi (*base curse*) atas, atau jalan yang semula kondisinya mantap, pada saat tertentu melalui penurunan kemampuan tingkat pelayanan yang bersifat tidak linter lagi (Sumber: 17)

Jalan Umum
Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. (Sumber: 1)

Jalur
Bagian jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas. (Sumber: 39)

Jalur Bis
Jalur khusus untuk lintasan bis dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi umum (massa), yaitu mempersingkat waktu perjalanan dan biaya transportasi. (Sumber: 6)

Jalur Cepat
Bagian Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas dengan kecepatan tinggi. (Sumber: 6)

Jalur Lambat
Bagian jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan lambat. (Sumber: 6)

Jalur Pejalan Kaki
Jalur jalan yang diperuntukkan sebagai tempat orang bergerak dengan berjalan kaki, biasanya merupakan bagian dari jaringan jalan di wilayah kota. (Sumber: 6)

Jalur Pemisah
Daerah yang memisahkan arah lalu lintas pada suatu ruas atau segmen jalan. (Sumber: 6)

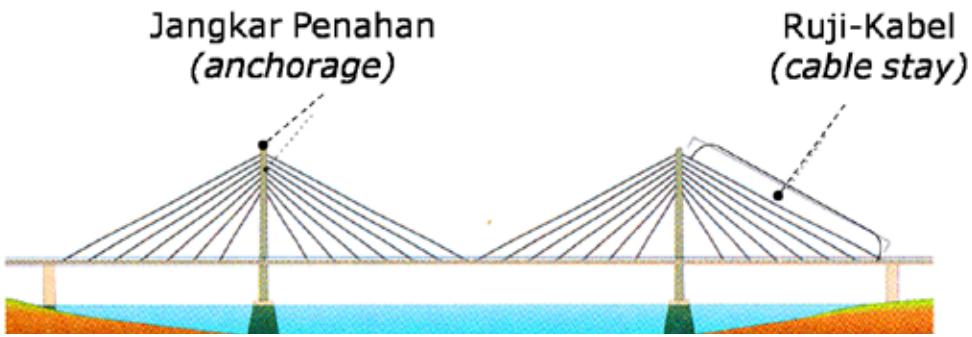

Gambar 2.04 Jembatan Beruji Kabel (Sumber : 23)

Gambar 2.05 JORR II (Jakarta Outer ring Road II) (Sumber: 41)

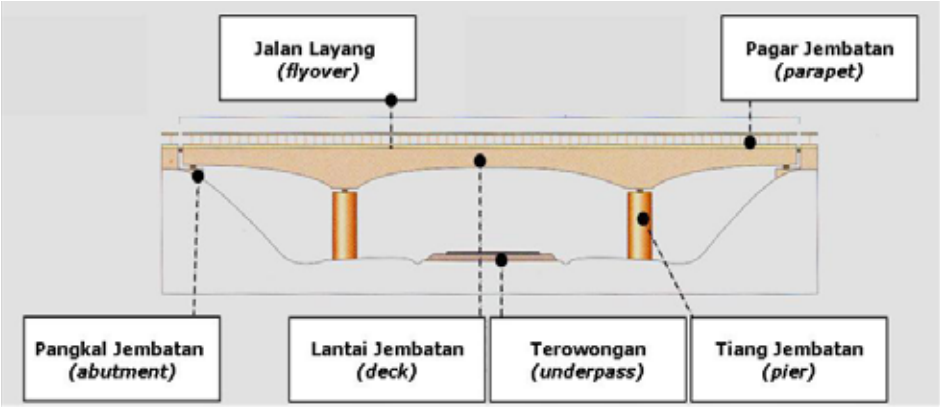

Gambar 2.06 Jembatan Balok (Beam Bridges) (Sumber : 23)

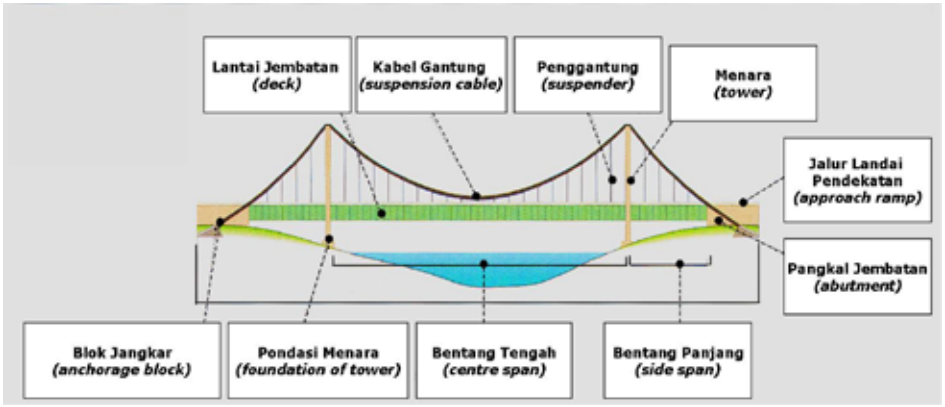

Gambar 2.07 Jembatan Gantung dengan Suspensi (*Suspension Bridge*) (Sumber : 23)

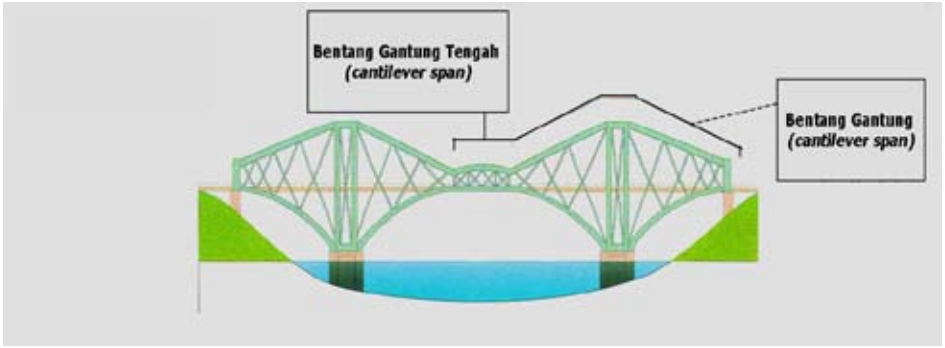

Gambar 2.08 Jembatan Gantung Cantilever (*Cantilever Bridge*) (Sumber : 23)

Jalur Penghubung
Suatu ruas Jalan yang pendek; berperan sebagai penghubung antara ruas jalan dan melayani arus. (Sumber: 6)

Jalur Samping
Jalan yang dibangun sejajar sepanjang jalur lalu lintas menerus yang dimaksudkan sebagai akses pada lahan sekitar atau jalan kolektor/lokal yang harus terpisah oleh jalur lalu lintas menerus oleh struktur fisik seperti kereb atau pagar pelindung. (Sumber: 40)

Jembatan
Bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penguhubung dua ujung jalan yang terputus oleh sungai, saluran, lembah dan selat, atau laut, jalan raya dan jalan kereta api. (Sumber: 27)

Jembatan Angkat (*Lift Bridge*)
Jembatan yang lantainya diangkat oleh suatu sistem kabel. (Sumber: 23)

Jembatan Apung
Jembatan yang lantainya menumpu pada sejumlah ponton yang dapat dilepaskan untuk membuka jembatan.
(Sumber: 23)

Jembatan Ayun
Jembatan yang lantainya berputar mengelilingi suatu sumbu vertikal. (Sumber: 23)

Jembatan Bailey
Jembatan baja, seringkali bersifat sementara, yang komponen rangka standarnya memudahkan untuk pemasangan dalam waktu singkat. (Sumber: 23)

Jembatan Balok (*Beam Bridge*)
Jembatan yang lantainya tersusun dari satu atau beberapa balok yang didukung tiang sepanjang ruang bebasnya.
(Sumber: 2)

Jembatan Beruji Kabel (*Cable-Stayed Bridges*)
Jembatan yang lantainya didukung pada beberapa titik dengan ruji yang menumpuk pada satu atau lebih menara.
(Sumber: 23)

Jembatan Gantung dengan Suspensi (*Suspension Bridge*)
Jembatan yang lantai jembatan panjangnya tergantung pada kabel penahan beban yang didukung menara dan dijangkar ke tanah pada kedua ujung jembatan. (Sumber: 23)

Jembatan Gantung dengan Kantilever (*Cantilever Bridge*)
Jembatan yang dua bentang utamanya memanjang ke arah satu sama lain dan mendukung suatu bentang pendek yang menahan beban lebih sedikit.
(Sumber: 23)

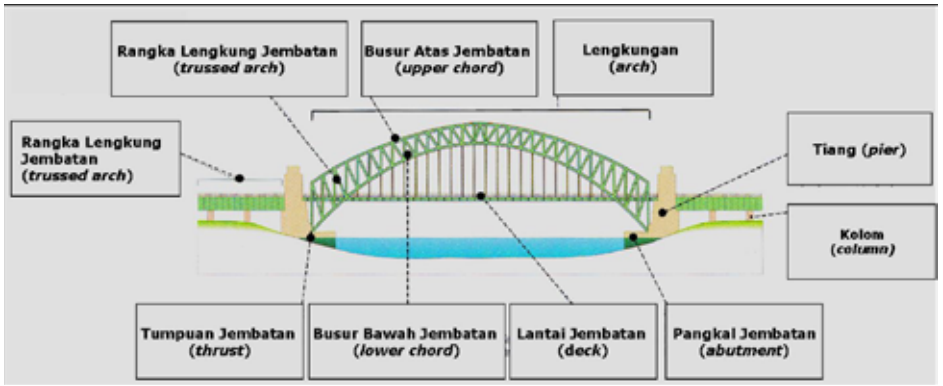

Gambar 2.09 Jembatan Lengkung (Arch Bridges) (Sumber : 23)

Jembatan Jungkit Daun Ganda
Jembatan yang terdiri atas dua bentang yang tersambung satu sama lain di tengah jembatan dan berputar terhadap suatu sumbu vertikal pada tiap pangkal jembatannya. (Sumber: 23)

Jembatan Jungkit Daun Tunggal
Jembatan yang lantainya diangkat dengan sesuatu mekanisme beban penyeimbang. (Sumber: 23)

Jembatan Lengkung
Jembatan yang lantainya didukung penggantung dan terpasang pada suatu lengkung yang menghasilkan gaya diagonal pada tumpuan lateral. (Sumber: 23)

JORR I (Jakarta Outer Ring Road I)
Atau Jalan Lingkar Luar Jakarta I adalah jalan tol yang melingkar mulai dari Tanjung Priok – Cakung – Cikunir – Taman Mini - Veteran – Ulu Jami (tol Serpong) – Kebon Jeruk (Tol Jakarta – Tangerang) - (Tol Jagorawi) – Penjaringan (Tol Sedyatmo). (Sumber: 41)

JORR II (Jakarta Outer ring Road II)
Atau Jalan Lingkar Luar Jakarta I, berada di luar JORR I yang dimulai dari Cilincing (JORR I) – Cibitung (Tol Jakarta – Cikampek) – Cimanggis (Tol Jagorawi) – Cinere (Tol Depok – Antasari) – Serpong (Tol Serpong) – Kunciran (Tol Jakarta – Tangerang) – Rawabokor / Cengkareng (Tol Sedyatmo). (Sumber: 41)

K

Kepala Jembatan
Bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung jembatan berfungsi sebagai pemikul seluruh beban ujung luar bentang, pinggir, dan gaya-gaya lainnya, serta melimpahkannya. (Sumber: 27)

Kereb
Bagian dari jalan berupa struktur vertikal dengan bentuk tertentu yang digunakan sebagai pelengkap jalan untuk memisahkan badan jalan dengan fasilitas lain, seperti jalur pejalan kaki, median, separator, pulau jalan, maupun tempat parkir. (Sumber: 13)

Kerusakan Dini
Kerusakan struktur perkerasan jalan lebih cepat dari umur layanan rencana (*design life*). (Sumber: 26)

Konsesi Jalan Tol
Izin pengusahaan jalan tol yang diberikan Pemerintah kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar. (Sumber: 2)

Kuat Tekan Beton
Besarnya beban per satuan luas, yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu, yang dihasilkan oleh mesin tekan. (Sumber: 25)

L

Lajur
Bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor. (Sumber: 39)

Lajur Lalu Lintas
Bagian dari jalur tempat lalu lintas bergerak, untuk satu kendaraan. (Sumber: 14)

Lajur Lambat
Lajur lalu lintas paling tepi untuk kendaraan berkecepatan lambat. (Sumber: 23)

Lajur Mendahului
Lajur lalu lintas bagian tengah untuk kendaraan berkecepatan lebih tinggi mendahului lalu lintas lain. (Sumber: 23)

Lajur Pengumpan
Awal dari lajur percepatan sejajar dengan lajur lalu lintas. (Sumber: 23)

Lajur Percepatan
Lajur yang disediakan untuk percepatan kendaraan pada saat akan masuk ke jalur lalu lintas dengan kecepatan tinggi. (Sumber: 39)

Lajur Perlambatan
Lajur yang disediakan untuk perlambatan kendaraan pada saat akan keluar dari jalur lalu lintas dengan kecepatan tinggi. (Sumber: 39)

Lajur Tengah
Bagian jalan yang dibatasi marka, masing-masing menampung sekelompok memanjang lalu lintas. (Sumber: 23)

Lajur Tunggu
Lajur khusus sebelum bukaan separator yang berfungsi sebagai tempat kendaraan menunggu sebelum melakukan perpindah jalur. (Sumber: 14)

Land Capping
Pembagian resiko yang adil antara Pemerintah dan investor (operator) yang bertujuan untuk memberikan kepastian investasi. Dalam hal ini Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan instrumen *land capping* dimana Pemerintah akan menanggung perubahan harga tanah di atas 110% dari nilai yang disepakati dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). (Sumber: 18)

Land Freezing
Pembekuan lahan sepanjang koridor tol pasca penetapan kebijakan pembangunan dilakukan pemerintah. (Sumber: 18)

Land Fund
Dana talangan bergulir yang dikelola Badan Layanan Umum/BLU untuk membantu kerja investor pada tahap awal investasi/bilamana terjadi kelambatan (*delay*). Dengan model *'prepaid'* ini, dana talangan harus dikembalikan secara bertahap kepada Pemerintah pada saat jalan tol telah beroperasi. (Sumber: 18)

Land Price
Penetapan harga tanah oleh auditor independen. (Sumber: 18)

Lantai Jembatan (*deck*)
Sekumpulan komponen yang menyusun struktur yang menyangga laju lalu lintas jembatan. (Sumber: 23)

Lapis Asbuton Agregat (LASBUTAG)
Campuran yang terdiri atas agregat kasar, agregat halus, asbuton, bahan peremaja, dan *filler* (bila diperlukan) yang dicampur, dihamparkan, dan dipadatkan secara dingin. (Sumber: 32)

Lapis Aspal Beton (LASTON)
Lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri atas agregat kasar, agregat halus, *filler*, dan aspal keras yang dicampur, dihamparkan, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. (Sumber: 32)

Lapis Tipis Aspal Pasir (LATASIR)
Lapis penutup permukaan perkerasan yang terdiri atas agregat halus atau pasir atau campuran keduanya, dan aspal keras yang dicampur, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas pada temperatur tertentu. (Sumber: 28)

Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN)
Lapis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal keras dengan cara disemprotkan diatasnya dan dipadatkan lapis demi lapis dan jika akan digunakan sebagai lapis permukaan perlu diberi laburan aspal dengan batu penutup. (Sumber: 32)

Lapis Permukaan
Bagian perkerasan yang paling atas. (Sumber: 32)

Lapis Pondasi
Bagian perkerasan yang terletak antara lapis permukaan dan lapis pondasi bawah (atau dengan tanah dasar bila tidak menggunakan lapis pondasi bawah). (Sumber: 32)

Lapis Pondasi Bawah
Bagian dari konstruksi perkerasan di bawah lapis pondasi atas untuk mendukung dan menyebarkan beban ke lapis tanah dasar dibawahnya. (Sumber: 35)

Lebar Bahu
Ruang disamping jalur lalu lintas, direncanakan sebagai ruang untuk kendaraan sekali – sekali berhenti, pejalan kaki dan kendaraan lambat. (Sumber: 42)

Lebar Perkerasan
Bagian permukaan jalan yang dipakai untuk lalu lintas kendaraan. (Sumber: 20)

Leger Jalan
Dokumen yang memuat data dan informasi mengenai perkembangan suatu ruas jalan. (Sumber: 8)

M

Marka Jalan
Suatu tanda yang berupa garis, simbol, angka, huruf atau tanda-tanda lainnya yang digambarkan, berfungsi sebagai penuntun/pengarah pengemudi selama perjalanan. (Sumber: 16)

Median
Bagian dari jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dengan bentuk memanjang sejajar jalan, terletak di sumbu/tengah jalan, dimaksudkan untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah. (Sumber: 14)

Mobilitas
Jumlah panjang jalan disuatu wilayah dalam satuan kilometer dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut dalam satuan ribuan jiwa. (Sumber: 3)

Muatan Lebih
Muatan sumbu kendaraan yang melebihi dari ketentuan seperti yang tercantum pada peraturan yang berlaku (PP 43 Tahun 1993). (Sumber: 26)

Muatan Sumbu Terberat (MST)
Beban maksimum sumbu kendaraan bermotor yang diijinkan yang harus didukung oleh jalan. (Sumber: 43)

O

Oprit
Badan jalan di belakang kepala jembatan. (Sumber: 27)

P

Pangkal Jembatan (*abutment*)
Bangunan bawah jembatan yang terletak pada kedua ujung jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban pada ujung bentang dan gaya – gaya lainnya yang didistribusikan pada tanah pondasi. (Sumber: 44)

Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan. (Sumber: 2)

Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah
Kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. (Sumber: 3)

Pemakai Jalan
Orang atau badan hukum yang mempergunakan jalan, baik bagian yang diperkeras maupun yang tidak diperkeras. (Sumber: 17)

Pembangunan Jalan
Kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. (Sumber: 1)

Pembinaan Jalan
Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. (Sumber: 1)

Pemegang Hak atas Tanah
Orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah yang sudah terdaftar atau bersertifikat atau atas tanah bekas milik adat yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. (Sumber:1)

Pemeliharaan Berkala
Kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana (Sumber: 3)

Pemeliharaan Jalan Tol
Upaya yang dilakukan terhadap sebagian atau seluruh unsur jalan, dengan tujuan untuk mempertahankan, memulihkan atau meningkatkan kondisi jalan agar tetap dalam batas-batas standar pelayanan minimal jalan tol.
(Sumber: 6)

Pemeliharaan Rutin
Kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. (Sumber: 3)

Pemisah Jalur
Separator yang selanjutnya disebut dengan pemisah jalur adalah bagian dari jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dengan bentuk memanjang sejajar jalan, dimaksudkan untuk memisahkan antara jalur yang berbeda fungsi. (Sumber: 14)

Pemisah Luar
Bagian badan jalan yang dipergunakan untuk memisahkan arus kendaraan cepat dengan arus kendaraan lambat.
(Sumber: 20)

Pemisah Tengah
Bagian dari badan jalan yang dipergunakan untuk memisahkan arus kendaraan dua arah. (Sumber: 20)

Penanganan Darurat
Penanganan yang dilakukan untuk memulihkan secepatnya kondisi jalan yang mengganggu kelancaran lalulintas dan/atau membahayakan pengguna jalan yang diakibatkan oleh kejadian tak terduga. (Sumber: 6)

Pengadaan Tanah
Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. (Sumber: 3)

Pengaturan Jalan
Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. (Sumber: 1)

Pengawasan Jalan
Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
(Sumber: 1)

Pengguna Jalan Tol
Setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang membayar tol. (Sumber: 5)

Pengusahaan Jalan Tol
Kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha. (Sumber: 11)

Peningkatan Jalan
Penanganan guna memperbaiki pelayanan jalan agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan, terdiri atas peningkatan struktur dan peningkatan kapasitas. Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur. (Sumber: 3)

Penyedia Jalan Tol
BUJT dan/atau institusi lain yang berhubungan dengan penyediaan jalan tol. (Sumber: 6)

Penyelenggara Jalan
Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. (Sumber: 1)

Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. (Sumber: 1)

Penyesuaian Tarif Tol
Evaluasi tarif tol yang dilakukan setiap 2 tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi sesuai dengan formula : Tarif = tarif lama (1 + inflasi). BPJT merekomendasikan hasil evaluasi tersebut kepada Menteri. Penetapan pemberlakuan penyesuaian tarif tol dilakukan oleh Menteri.
(Sumber: 2)

***Performance Based Maintenance Contract* (PBMC)**
Kontrak pemeliharaan jalan berdasarkan kinerja (mutu pelayanan) dan jangka waktu (umumnya multi years) yang ditetapkan. (Sumber: 26)

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
Perjanjian, termasuk lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya (bila ada), yang dibuat antara pemerintah dan perusahaan jalan tol yang menjadi dasar untuk menyelenggarakan pengusahaan jalan tol. (Sumber: 9)

Perlengkapan Jalan
Sarana untuk mengatur keselamatan, kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas antara lain perangkat lalu lintas, pengaman jalan, rambu jalan, jembatan penyeberangan, kotak komunikasi, dan tempat pemberhentian angkutan umum (Sumber: 8)

Persimpangan
Pertemuan 2 jalan atau lebih yang bersilangan. (Sumber: 45)

Persimpangan Sebidang
Pertemuan dua ruang jalan atau lebih dalam satu bidang, antara lain simpang tiga dan simpang empat. (Sumber: 3)

Persimpangan Tidak Sebidang
Persimpangan dimana dua ruas jalan atau lebih saling bertemu tidak dalam satu bidang tetapi salah satu ruas berada diatas atau dibawah ruas jalan yang lain. (Sumber: 22)

Pilar Jembatan
Bangunan bawah yang terletak diantara kedua kepala jembatan, berfungsi sebagai pemikul seluruh beban pada ujung-ujung bentang dan gaya-gaya lainnya, serta melimpahkannya ke pondasi.
(Sumber: 15)

Pondasi
Bagian struktur bangunan pelengkap jalan yang berfungsi memikul serta melimpahkan seluruh beban dan gaya-

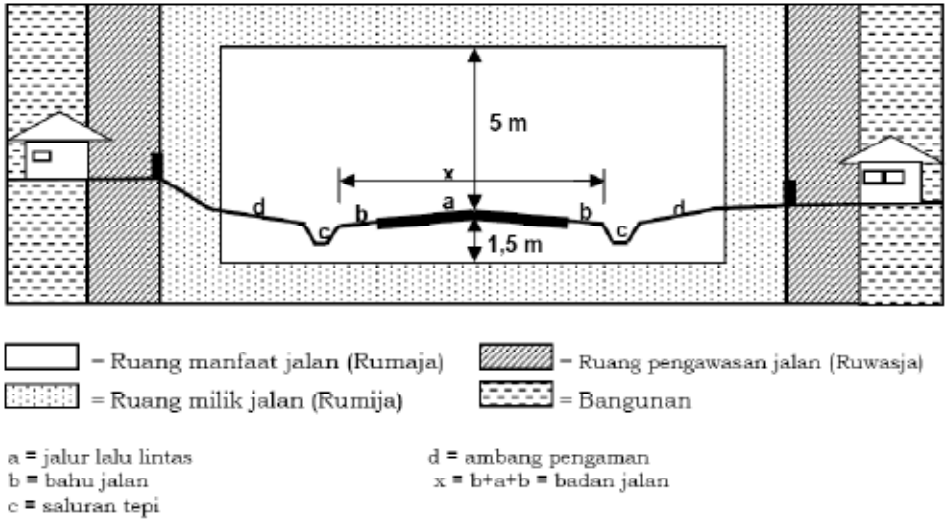

Gambar 2.10 Gambar Bagian-Bagian Jalan (Sumber: 3)

gaya yang diperhitungkan ke lapisan tanah pendukung. (Sumber:29)

Pondasi Tiang Pancang
Tiang-tiang pondasi yang dimasukkan kedalam tanah dengan cara ditumbuk atau ditekan dan berfungsi sebagai pemikul seluruh beban jembatan serta melimpahkannya ke lapisan tanah pendukung tidak termasuk cerucuk dan sejenisnya. (Sumber: 15)

Ponton
Struktur berongga berisi udara yang mendukung laintai jembatan.
(Sumber: 23)

Pozolan
Bahan yang mengandung silika amorf apabila dicampur dengan kapur dan air akan membentuk benda padat yang keras dan bahan yang tergolong pozolan adalah tras, semen merah, abu terbang dan bubukan terak tanur tinggi.
(Sumber: 36)

Pulau Lalu Lintas
Bagian dari persimpangan yang ditinggikan dengan kereb, yang dibangun sebagai pengarah arus lalu lintas serta merupakan tempat bagi pejalan kaki pada saat menunggu kesempatan menyeberang jalan. (Sumber: 46)

Putaran
Lengkung yang melayani gerakan berubah arah dari satu jalan raya ke jalan raya lain. (Sumber: 23)

R

Rangka Lengkung Jembatan
Batok lengkung yang terdiri dari dua busur yang dihubungkan oleh suatu jaringan penopang segitiga sempurna. (Sumber: 23)

Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
Kumpulan rencana ruas-ruas jalan nasional beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
(Sumber: 3)

Rehabilitasi Jalan
Kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. (Sumber: 2)

Road Users Cost
Biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jalan untuk menempuh suatu perjalanan, yang antara lain terdiri ata biaya bahan bakar, oli, dll. (Sumber: 47)

Ruas Jalan Tol
Bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh BUJT tertentu. (Sumber: 6)

Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA)
Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
(Sumber: 1)

Ruang Manfaat Jalan Tol
Suatu ruang sepanjang jalan tol yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya; dan badan jalan yang meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar dari ruang manfaat jalan dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.
(Sumber: 6)

Ruang Milik Jalan (RUMIJA)
Sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan, yang dibatasi oleh batas ruang milik jalan, yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. (Sumber: 6)

Ruang Milik Jalan Tol
Ruang sepanjang jalan tol yang meliputi ruang manfaat jalan tol dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan tol.
(Sumber: 2)

Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA)
Ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. (Sumber: 1)

Ruang Pengawasan Jalan Tol
Ruang sepanjang jalan tol yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar ruang milik jalan tol yang penggunaannya berada di bawah pengawasan Menteri.
(Sumber: 2)

S

Semen Hidrolik
Semen yang mengeras dalam air.
(Sumber: 31)

Semen Portland
Semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling telak semen portland yang terutama terdiri dari kalsium silikat hidrat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan satu atau lebih bentuk kristal senyawa Kalsium Sulfat. (Sumber: 31)

Semen Portland-Pozolan (SPP)
Campuran semen portland dengan pozolan antara 15-40 % berat total campuran dan kandungan Si02 + A1203 + Fe203 dalam pozolan minimum 70%. (Sumber: 36)

Semen Portland Tipe I
Semen portland yang umum digunakan tanpa persyaratan khusus. (Sumber: 36)

Semen Portland Tipe II
Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. (Sumber: 36)

Semen Portland Tipe III
Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan awal yang tinggi. (Sumber: 36)

Semen Portland Tipe IV
Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan panas hidrasi yang rendah. (Sumber: 36)

Semen Portland Tipe V
Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap sulfat.
(Sumber: 36)

Simpang Susun (*Interchange*)
Struktur penghubung beberapa jalan atau beberapa jalan bebas hambatan agar tidak bertemu pada bidang yang sama. (Sumber: 23)

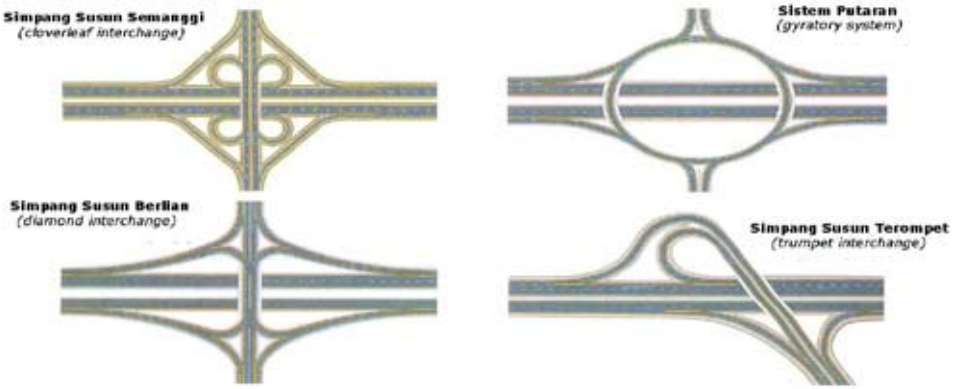

Gambar 2.11 Macam-macam simpang Susun (Sumber : 23)

Simpang Susun Berlian (*Diamond Interchange*)
Simpang susun yang menghubungkan suatu jalan dengan jalan bebas hambatan yang membutuhkan lampu lalu lintas untuk gerakan-gerakan belok kiri ke dan dari jalan atau jalan layang.
(Sumber: 23)

Simpang Susun Semanggi (*Cloverleaf Interchange*)
Simpang susun dengan empat cabang yang lengkungnya digunakan untuk belok kanan dan penghubung lurusnya untuk belok kiri. (Sumber: 23)

Simpang Susun Terompet (*Trumpet Interchange*)
Simpang susun yang menghubungkan suatu ujung jalan, menggunakan hanya satu lantai. (Sumber: 23)

Sistem Jaringan Jalan
Satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
(Sumber: 1)

Sistem Jaringan Jalan Primer
Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. (Sumber: 1)

Sistem Jaringan Jalan Sekunder
Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. (Sumber: 1)

Sistem Pengumpulan Tol
Sistem yang digunakan dalam pengumpulan tol dan terdiri dari sistem tertutup yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang keluar dan sistem terbuka yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang masuk atau gerbang keluar (Sumber: 11)

Sistem Pengumpulan Tol Terbuka
Sistem pengumpulan tol yang kepada pemakainya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang tol.
(Sumber: 2)

Sistem Pengumpulan Tol Tertutup
Sistem pengumpulan tol yang kepada pemakainya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang ke luar.
(Sumber: 2)

Sistem Putaran
Simpang susun yang terdiri atas empat jalur landai yang terhubung satu sama lain sehingga membentuk jalan satu arah. (Sumber: 23)

Sumuran
Struktur bangunan yang dimasukkan ke dalam tanah sampai kedalaman tertentu, mempunyai bentuk penampang bundar, segi empat atau oval dimana ratio panjang dan lebar lebih kecil dari 4. (Sumber: 27)

T

Tanah Dasar
Permukaan tanah semula atau permukaan galian atau permukaan tanah timbunan yang dipadatkan dan merupakan permukaan tanah dasar untuk perletakan bagian-bagian perkerasan lainnya. (Sumber: 32)

Taper
Bagian dari lajur jalan yang menyerong yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas pindah lajur. (Sumber: 14)

Tarif Tol
Tarif yang dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi. (Sumber: 2)

Terowongan (*Underpass*)
Bagian jalan yang dibuat lebih rendah sehingga memungkinkan lalu lintas dapat melintasi bagian bawah jalan lain. (Sumber: 23)

Terowongan Angkutan
Terowongan yang dibuat untuk keperluan angkutan barang, seperti : terowongan stasiun pembangkit listrik dengan tenaga air, terowongan penyediaan air, terowongan untuk saluran air kotor, terowongan untuk angkutan di dalam daerah industri / pabrik. (Sumber: 37)

Terowongan Batuan (*Rock Tunnel*)
Terowongan yang dibuat langsung pada batuan masif dengan cara pemboran atau peledakan. (Sumber: 37)

Terowongan Dongkrak (*Jack Tunnel*)
Terowongan yang banyak dipakai untuk melintasi jalan raya atau kereta api, diperlukan pada kondisi tanah yang relatif baik. Dibuat dengan cara mendongkrak segmen demi segmen dan penggalian dilakukan secara manual. (Sumber: 37)

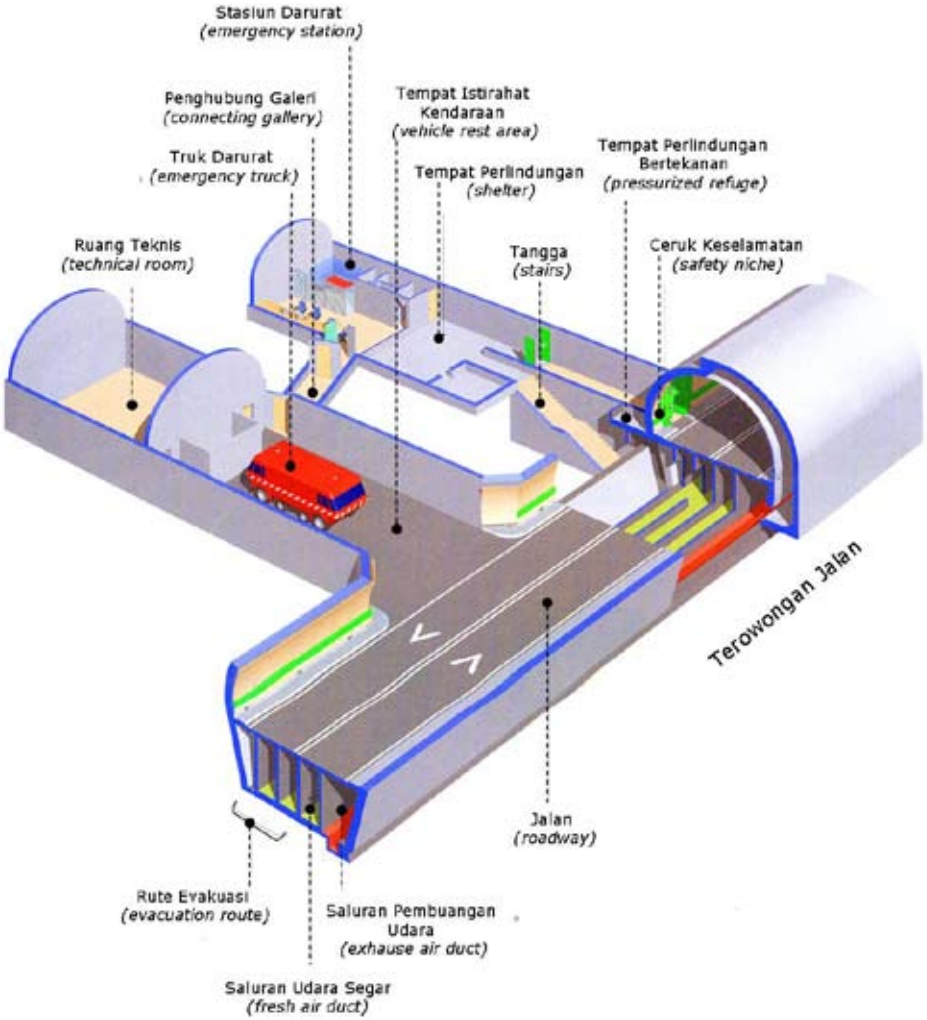

Gambar 2.12 Terowongan (Underpass) (Sumber : 23)

Terowongan Lalu Lintas (*Traffic Tunnel*)
Terowongan yang dibuat untuk kepentingan lalu lintas, terdiri dari terowongan kereta api, terowongan jalan raya, terowongan pejalan kaki, terowongan navigasi, terowongan transportasi di bawah kota, dan terowongan transportasi di tambang bawah tanah. (Sumber: 37)

Terowongan *Micro-tunnel*
Terowongan yang biasa digunakan untuk pipa, kabel dan air, cara pembuatannya dengan penggalian secara otomatis dan pembuangan material dilakukan secara modern. Kekuatan mendorong dari mesin dapat mencapai 50 ton dan produksinya dapat mencapai 5 meter per hari, diameter *micro tunnel* dapat mencapai 60 cm hingga 1 meter. (Sumber: 37)

Terowongan Navigasi
Terowongan yang dibuat untuk kepentingan lalu lintas air di kanal-kanal dan sungai-sungai yang menghubungkan satu kanal atau sungai ke kanal lainnya. Selain itu terowongan ini juga dibuat untuk menembus daerah pegunungan untuk memperpendek jarak dan memperlancar lalu lintas air. (Sumber: 37)

Terowongan Pejalan Kaki
Terowongan yang biasa digunakan di bawah jalan raya yang ramai atau di bawah sungai dan kanal sebagai tempat menyeberang bagi pejalan kaki.
(Sumber: 37)

Terowongan Saluran Air Kotor
Terowongan yang dibuat untuk membuang air kotor dari kota atau pusat industri ke tempat pembuangan yang sudah disediakan. Dinding terowongan harus dilindungi dengan material seperti keramik, bahan yang tahan terhadap asam atau aspal beton, karena aliran air kotor dapat menggerus dinding terowongan akibat pengaruh gaya gravitasi.
(Sumber: 37)

Terowongan Transportasi Bawah Kota
Terowongan yang dibuat untuk keperluan transportasi dalam kota, dapat berupa terowongan kereta api maupun jalan raya. Terowongan jalan raya umumnya mempunyai bentuk penampang tapal kuda (*horseshoe*), sedangkan terowongan kereta api biasanya bentuk penampang bulat, empat persegi panjang, atau segi banyak (*polygonal*) tergantung dari letaknya di bawah permukaan tanah. Rintangan untuk terowongan di bawah kota adalah kerapatan dari bangunan di atas tanah, jaringan jalan dan gedung-gedung. (Sumber: 37)

Terowongan untuk Utilitas Umum
Terowongan yang biasanya dibuat di daerah perkotaan untuk menyalurkan kabel listrik dan telepon, pipa gas dan air, dan juga pipa-pipa lainnya yang penting, dibawah saluran air, jalan raya, jalan kereta api, blok bangunan untuk memudahkan inspeksi secara kontinue, pemeliharaan dan perbaikan sewaktu-waktu kalau ada kerusakan.
(Sumber: 37)

Tiang Jembatan (*pier*)
Komponen penyangga beban kokoh yang ditempatkan pada jarak tertentu satu sama lain untuk menyangga balok jembatan. (Sumber: 23)

Tol
Sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
(Sumber:1)

Trotoar
Jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan. (Sumber: 33)

U

Umur Rencana (UR) Jalan
Jumlah waktu dalam tahun yang dihitung sejak jalan tersebut mulai dibuka sampai saat diperlukan perbaikan berat atau dianggap perlu untuk diberi lapis permukaan yang baru. (Sumber: 32)

Unsur Jalan Tol
Segala bagian jalan yang terdapat pada ruang manfaat jalan tol dan ruang milik jalan tol, termasuk bangunan pelengkap, perlengkapan, dan fasilitas jalan.
(Sumber: 6)

BINA MARGA

V

Volume Lalu Lintas
Jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. (Sumber: 3)

Volume Lalu Lintas Rata-rata
Jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu.
(Sumber: 3)

BINA MARGA

SUMBER:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 34 Tahun 2006 tentang Jalan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknis Penelitian, Pengembangan, dan Pemberdayaan di Bidang Jalan Tol
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2007tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/KPTS/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 27/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2006 Tentang Wewenang Dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol Dan Badan Usaha Jalan Tol
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
12. Revisi SNI 06-2456-1991 tentang cara uji penetrasi aspal.
13. Revisi SNI 03-2442-1991 tentang spesifikasi kereb beton untuk jalan.
14. Revisi SNI 03-2444-1991 tentang spesifikasi bukaan pemisah jalur.
15. Revisi SNI 03-2451-1991 tentang spesifikasi pilar dan kepala jembatan beton sederhana bentang 5 m sampai dengan 25 m dengan fondasi tiang pancang
16. Petunjuk Perencanaan Marka Jalan No: 012/S/BNKT/1990, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Direktorat Jenderal Bina Marga
17. Website Departemen Pekerjaan Umum/glossary (www.pu.go.id)
18. Kajian Strategis Kebijakan Land Capping sebagai Instrumen Pembiayaan Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan Tol, Kajian Strategis Pusat Kajian Strategis (PUSTRA) Departemen PU, November 2007
19. Tata Cara Perencanaan Teknik Lansekap Jalan, No : 033/T/BM/1996 Maret 1996, Direktorat Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum
20. Tata Cara Pelaksanaan Survai Inventarisasi Jalan dan Jembatan Kota No. 017/T/BNKT/1990, Direktorat Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota
21. Kamus Istilah Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah (www.kimpraswil.go.id)
22. Harianto, Joni., Perencanaan Persimpangan Tidak Sebidang Pada Jalan Raya, Universitas Sumatera Utara, 2004. (http://library.usu.ac.id)
23. Corbell, Jean Claude dan Ariane Archambault, The Visual Dictionary With Definitions, QA International, Canada, 2007
24. Online dictionary (www.dictionary.die.net)
25. NSPM Kimpraswil Edisi Pertama, Desember 2002 tentang Metode Pengujian Kuat Tekan Beton
26. Pengaruh Beban Lalu Lintas terhadap Kerusakan Dini Perkerasan Jalan, Direktorat Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.
27. NSPM Kimpraswil, edisi pertama Desember 2002 tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Pondasi Sumuran Untuk Jembatan
28. Revisi SNI 03-6749-2002 tentang Spesifikasi Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir).
29. Revisi SNI 06-2490-1991 tentang Cara Uji Kadar Air dalam Produk Minyak dan Bahan Mengandung Aspal dengan Cara Penyulingan
30. NSPM Kimpraswil, Pedoman / Petunjuk Teknik Dan Manual Irigasi, edisi pertama, Desember 2002,
31. SNI 03-4804-1998 tentang Metode Pengujian Bobot Isi dan Rongga Udara dalam Agregat
32. NSPM Kimpraswil edisi pertama, Desember 2002 tentang Pedoman Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur
33. Pedoman T-17-2005-B tentang Audit Keselamatan Jalan
34. SNI 03-3448-1994 tentang Tata Cara Penyambungan Tiang Pancang Beton Pracetak Penampang Persegi Dengan Sistem Monolit Bahan Epoxy
35. SNI 03-2853-1992 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lapis Pondasi Jalan Dengan Batu Pecah
36. SNI 03-2914-1990 tentang Spesifikasi Beton Bertulang Kedap Air
37. Raharjo, Paulus, Prof., Teknik Terowongan, Cetakan ke 2, 2004, Geotechnical Engineering Center, Parahyangan Catholic University.
38. Manual Pekerjaan Campuran Aspal Panas No. 001-A/PW/2004
39. Geometrik Jalan Perkotaan RSNI T-14-2004
40. Standar Perencanaan Geometri untuk Jalan Perkotaan Tahun 1992
41. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Departemen PU
42. Manual Kapasitas Jalan Indonesiia (MKJI)
43. UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
44. Pedoman Perencanaan Timbunan Jalan Pendekat Jembatan Pd T-11-2003
45. Tata Cara Perencanaan Persimpangan Sebidang Jalan Perkotaan, No.01/T/BNKT/1992
46. Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan Tahun 1988
47. Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU

BINA MARGA

CIPTA KARYA

A

Aerasi
Proses pemberian oksigen ke dalam air atau air limbah yang diolah.
(Sumber: 44)

Aerator
Suatu alat yang digunakan untuk memasukkan oksigen atau udara ke dalam air atau air limbah. (Sumber: 24)

Aerobik
Proses pengolahan yang memerlukan oksigen. (Sumber: 48)

Anaerobik
Proses pengolahan yang tidak memerlukan oksigen. (Sumber: 48)

Affordability
Suatu konsep yang mengukur tingkat kemampuan keuangan suatu keluarga untuk membeli satu suatu barang atau pelayanan. (Sumber: 44)

***Aggregate Level of Services* (ALOS) Sanitasi**
Tingkat pelayanan agregatif suatu pendekatan estimasi jumlah sarana sanitasi suatu daerah yang akan dilayani. (Sumber: 57)

Air Baku (untuk Air Minum Rumah Tangga)
Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. (Sumber: 8)

Air Bersih Domestik
Pelayanan air bersih bagi penduduk lingkungan perumahan yang terbatas pada keperluan rumah tangga seperti air minum, memasak, mencuci dan mandi. (Sumber: 52)

Air Bersih Non Domestik
Pelayanan air bersih bagi penduduk di luar lingkungan perumahan, seperti pertokoan, industri, fasilitas umum, kebakaran dan lain-lain yang tidak terbatas dalam keperluan rumah tangga. (Sumber: 52)

Air Limbah
1. Air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. (Sumber: 8)
2. Semua jenis air buangan dari kakus yang mengandung kotoran manusia (*black water*) dan air buangan dari mandi, cuci dan kakus (*grey water*). (Sumber: 43)
3. Cairan atau limbah terbawa air yang terpolusi dari rumah tangga atau operasi komersial/industri, bersama-sama air permukaan lainnya, air hujan atau infiltrasi air tanah. (Sumber: 24)
4. Bahan buangan hasil sampingan dari proses/aktifitas rumah tangga yang berbentuk cair yang dapat menimbulkan pencemaran. (Sumber: 42)
5. Semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan dan dapat termasuk pula buangan industri dan buangan kimia. (Sumber: 52)

Air Limbah Domestik
1. Air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. (Sumber: 24)
2. Air kotor termasuk limbahnya yang sumbernya berasal dari manusia (air limbah yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, daerah komersial dan bangunan-bangunan umum). (Sumber: 52)

Air Limbah Non Domestik
Air kotor termasuk limbahnya yang sumbernya berasal selain dari manusia, seperti industri (air limbah yang berasal dari proses produksi pabrik-pabrik atau air limbah industri, termasuk air limbah rumah sakit yang tidak bersifat seperti air limbah domestik). (Sumber: 52)

Air Limbah Rumah Tangga
Buangan dari proses/aktivitas rumah tangga dari kamar mandi, cuci, kakus dan dapur. (Sumber: 48)

Air Lindi (*Leacheate)*
Cairan sampah, cairan yang keluar dari sampah hasil proses dekomposisi yang bercampur dengan air hujan, potensial mencemari lingkungan. (Sumber: 8)

Air Minum
Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. (Sumber: 8)

Air Perapat
1. Arah vertikal antara muka air dan bagian lengkungan yang terendam air pada perangkap bau. (Sumber: 18)
2. Air yang ditahan di dalam pipa yang dibengkokkan menyerupai leher angsa untuk menahan/mencegah bau. (Sumber: 39)

Air Permukaan
Sumber air yang terdapat di permukaan tanah seperti sungai, waduk, bendungan yang merupakan tampungan air hujan, danau. (Sumber: 54)

Air Tanah
Sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan. (Sumber: 54)

Air Tanah Rendah
Keadaan dimana muka air tanah pada musim hujan berada pada kedalaman 1,20 meter dari permukaan tanah.
(Sumber: 23)

Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung
Meliputi jalan masuk, jalan keluar, hubungan horisontal antar ruang, hubungan vertikal dalam bangunan gedung dan sarana transportasi vertikal, serta penyediaan akses evakuasi bagi pengguna bangunan gedung, termasuk kemudahan mencari, menemukan, dan menggunakan alat pertolongan dalam keadaan darurat bagi penghuni dan terutama bagi para penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil, terutama untuk bangunan gedung pelayanan umum. (Sumber: 4)

Akuifer (Akifer)
Lapisan pasir di bawah tanah yang mengandung air yang berfungsi mengisi kembali sistem air tanah yang telah berubah misalnya akibat dieksploitasi dan dikonsumsi. (Sumber: 57)

Alarm Kebakaran
Suatu alat pengindera yang dipasang pada bangunan gedung yang dapat memberi peringatan atau tanda pada saat terjadinya suatu kebakaran.
(Sumber: 52)

Alat Berat Pembersih Saluran
Alat bantu yang berfungsi mengangkat/ membersihkan sampah/endapan yang ada dalam saluran drainase dan selanjutnya diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
(Sumber: 30)

Alat Pemadam Api Ringan
Pemadam api yang digunakan oleh perorangan, digunakan untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. (Sumber: 52)

Aliran Balik (*Backflow)*
Berbaliknya aliran (air) akibat adanya hambatan di muka aliran tersebut. Misalnya akibat pembendungan atau penutupan aliran secara mendadak atau terhentinya sumber tekanan air seperti matinya pompa. (Sumber: 57)

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Dokumen yang berisi mengenai telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak pentlng kegiatan yang direncanakan. (Sumber: 6)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

CIPTA KARYA

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: 3)

Atap
Elemen bangunan berbentuk bidang (datar, miring atau lengkung) yang berfungsi melindungi bangunan terhadap pengaruh air hujan, panas matahari atau cuaca lainnya. (Sumber: 52)

Audit Lingkungan Hidup
Suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. (Sumber: 52)

B

Back Water
Aliran tidak sejajar muka airnya dengan dasar pipa, biasanya ada pembendungan di sebelah hilir aliran. (Sumber: 57)

Back Wash
Sistem pencucian media filter dengan aliran air yang berlawanan arah dengan aliran air pada saat penyaringan.
(Sumber: 19)

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) P2KP
Warga yang sadar untuk bersama-sama menggalang potensi dan mengatasi persoalan yang dihadapi bersama, khususnya masalah kemiskinan, dapat mengorganisasi diri sebagai masyarakat warga dan membangun lembaga pimpinan kolektif sebagai representasi dari masyarakat warga kelurahan bersangkutan. (Sumber: 49)

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)
Badan non struktural (dibentuk oleh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri) yang bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan SPAM. (Sumber: 8)

Badan Pengelola
Badan Usaha Milik Negara ataupun Badan Usaha Milik Daerah dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditugasi sebagai pengelola Kasiba, Rumah Susun, dan Aset Pemerintah lainnya.
(Sumber: 37)

Baffle
1. Sekat yang membagi ruang pengolah menjadi beberapa kompartemen (ruang) dan juga untuk menjaga agar *scum* tidak ikut keluar lewat outlet ruang pengolah. (Sumber: 63)
2. Tembok pembatas yang membagi reservoir/ bak penampung/ bak pengolah air untuk mengurangi turbulensi aliran. (Sumber: 44)

Bahan Bangunan
Bahan yang terdiri dari bahan bangunan dasar dan bahan bangunan jadi yang diperlukan untuk tujuan penguat pada bangunan rumah, prasarana dan sarana serta fasilitas penunjang rumah dan perumahan. (Sumber: 52)

Bahan Bangunan Dasar
Bahan baku dari alam atau berupa limbah dari kegiatan industri dan pertanian atau kehutanan yang belum mengalami pengolahan secara kimiawi untuk tujuan fasilitas penunjang rumah dan perumahan. (Sumber: 52)

Bahan Bangunan Lokal
Bahan bangunan yang terdapat di daerah lokasi pembangunan rumah untuk tujuan penggunaan sebagai bahan bangunan dasar maupun sebagai bahan bangunan jadi. (Sumber: 52)

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. (Sumber: 3)

Bak Ekualisasi
Kolam penampung dimana variasi di dalam aliran dan komposisi cairan dirata-ratakan. Kolam ini digunakan untuk memberikan aliran volume dan komposisi yang seragam ke dalam unit pengolahan. (Sumber: 24)

Bak Flokulasi
Bangunan atau sarana untuk proses pembentukan "*flok*" bagi partikel-partikel pengaruh pada proses pengolahan air baku. (Sumber:54)

Bak Koagulasi
Bangunan atau sarana untuk proses pencampuran bahan kimia (koagulan) dengan air baku untuk membentuk flok.
(Sumber: 44)

Bak Pengumpul Lumpur Tinja
Bangunan konstruksi dari beton bertulang kedap air dengan desain persegi panjang, yang berfungsi untuk menampung dan homogenisasi lumpur tinja yang berasal dari mobil tangki.
(Sumber: 33)

Bak Sedimentasi
Bangunan atau sarana untuk menghilangkan partikel-partikel dalam air dengan cara pengendapan. (Sumber: 54)

Bakteri Anaerobik
Organisme renik yang dapat menguraikan limbah dan hidup dalam lingkungan yang tidak ada oksigen. (Sumber: 63)

Bak Kontrol
Komponen jaringan perpipaan untuk meletakkan dan memeriksa katup/valve/ acessories pipa bila terjadi penyumbatan.
(Sumber: 44)

Baku Mutu Air
Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. (Sumber: 7)

Baku Mutu Air Limbah
Ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. (Sumber: 7)

Baku Mutu Lingkungan
Batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang atau harus ada dan atau unsur primer yang ditanggung adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (Sumber: 3)

Baku Tingkat Getaran Mekanik dan Getaran Kejut
Batas maksimal tingkat getaran mekanik yang dlperbolehkan dan usaha atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan. (Sumber: 52)

Baku Tingkat Kebisingan
Batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dituang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. (Sumber: 52)

Bangunan
Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung, yang digunakan atau dimaksudkan untuk menunjang atau mewadahi suatu penggunaan atau kegiatan manusia. (Sumber: 52)

CIPTA KARYA

Bangunan Bersejarah
Bangunan yang telah memiliki beberapa kriteria tertentu diantaranya:
- Usia sejak pendiriannya lebih dari 50 tahun;
- Memiliki fungsi dan peran yang bisa menjadi saksi dan petunjuk peringatan atau kenangan atas suatu peristiwa penting oleh umat manusia yang menghidupinya
- Memiliki kapasitas dan sumbangsih bagi peningkatan kualitas hidup berbudaya umat manusia dalam arti inovasi teknik, ilmu pengetahuan dan seni;
- Telah menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter fisik lingkungannya berada, sehingga menjadi salah satu komponen ingatan kolektif masyarakat tentang identitas tempat;
- Bagian yang tak terpisahkan dari pemahaman yang utuh terhadap tokoh masyarakat, tradisi lokal, perjuangan umat manusia dan alamat, analogi dimana rekonstruksi peristiwa tertentu di jaman tertentu dapat dilakukan. (Sumber: 52)

Bangunan Bertingkat Cukup Tinggi
Bangunan dengan ketinggian sampai dengan 40 meter atau 8 lantai.
(Sumber: 52)

Bangunan Bertingkat Rendah
Bangunan dengan ketinggian sampai dengan 8 meter atau dua lantai.
(Sumber: 52)

Bangunan Bertingkat Sedang
Bangunan dengan ketinggian sampai dengan 14 meter atau 4 lantai.
(Sumber: 52)

Bangunan Campuran
Bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan. (Sumber: 52)

Bangunan Gandengan
Suatu bangun bangunan yang terdiri dari dua atau beberapa buah induk bangunan yang bergandengan, bangun-bangunan mana semuanya berdampingan dengan bangun-bangunan lain, antara satu sama lain terpisah oleh kerenggangan-kerenggangan. (Sumber: 52)

Bangunan Gedung
Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. (Sumber: 4)

Bangunan Gedung Baru
Bangunan gedung yang akan dibangun atau yang baru saja selesai dibangun. (Sumber: 59)

Bangunan Gedung Bertingkat
Bangunan gedung berlantai lebih dari dua. (Sumber: 28)

Bangunan Gedung Darurat
Bangunan gedung yang fungsinya hanya digunakan untuk sementara, dengan konstruksi tidak permanen atau umur bangunan yang tidak lama, misalnya direksi *keet* dan kios penampungan sementara. (Sumber: 4)

Bangunan Gedung Lama
Bangunan yang sudah lama berdiri atau baru berdiri serta sudah digunakan sesuai dengan fungsinya. (Sumber: 59)

Bangunan Gedung Negara
Bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain. (Sumber: 9)

Bangunan Gedung Fungsi Khusus
Bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait.
(Sumber: 4)

Bangunan Gedung Umum
Bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
(Sumber: 9)

Bangunan Gedung Sederhana
Bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, klasifikasi:
- gedung kantor yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. lantai 2 dengan luas sampai dengan 500 m^2
- gedung pelayanan kesehatan, puskesmas
- gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai. (Sumber: 28)

Bangunan Gedung Tertentu
Bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
(Sumber: 9)

Bangunan Gedung Semi Permanen
Bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen atau yang dapat ditingkatkan menjadi permanen. (Sumber: 4)

Bangunan Induk
Bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam suatu persil.
(Sumber: 52)

Bangunan Khusus
Bangunan gedung negara yang termasuk sebagai bangunan khusus adalah bangunan-bangunan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian khusus seperti: bangunan yang bersifat monumental, bangunan reaktor nuklir, bangunan peribadatan, bangunan gedung dewan perwakiLan rakyat, bangunan gedung olah raga, dan yang setara.
(Sumber: 52)

Bangunan Penggelontor
Bangunan yang dapat mengumpulkan air dan dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penggelontoran yang dapat bekerja secara otomatis atau manual. (Sumber: 24)

Bangunan Pelengkap
Bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, street inlet, pompa, pintu air. (Sumber: 31)

Bangunan Pengambilan Air Baku *(Intake)*
Bangunan atau konstruksi penangkap mata air yang dibangun pada suatu lokasi sumber air yaitu sungai, mata air dan air tanah dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk mengambil air tersebut guna penyediaan air minum. (Sumber: 54)

Bangunan Pengolah Limbah Rumah Tangga
Bangunan pengolahan yang berupa tangki septik, cubluk, tangki septik bermedia, UASB, dan lain-lain. (Sumber: 33)

Bangunan Permanen
Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. (Sumber: 52)

Bangunan Resapan Buatan
Bangunan yang dibuat untuk meresapkan air permukaan. (Sumber: 14)

Bangunan Satu Lantai
Bangunan yang berdiri langsung diatas pondasi pada bangunan tidak terdapat pemanfaatan lain selain pada lantai dasamya. (Sumber: 52)

Bangunan Sederhana
Bangunan yang termasuk sebagai bangunan sederhana didasarkan pada:
1. Fungsi: bangunan gedung Sekolah Dasar dan bangunan gedung SLTP/ SMU, bangunan rumah tipe C/D/E, bangunan Puskesmas, bangunan gedung kantor tingkat pelayanan kecamatan, dan yang setara;
2. Teknologi: bangunan dengan teknologi sederhana;
3. Jumlah lantai: bangunan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai. (Sumber: 52)

Bangunan Sementara/Darurat
Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun. (Sumber: 52)

Bangunan Semi Permanen
Bangunan turutan suatu bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. (Sumber: 52)

Bangunan Tidak Sederhana
Bangunan yang termasuk sebagai bangunan tidak sederhana didasarkan pada:
1. Fungsi: bangunan gedung perguruan tinggi, bangunan rumah tipe A dan B, bangunan rumah sakit, bangunan gedung kantor tingkat pelayanan pusat, propinsi dan kabupaten atau yang setara;
2. Teknologi: bangunan dengan teknologi tidak sederhana;
3. Jumlah lantai: bangunan dengan jumlah Lantai di alas 2 lantai. (Sumber: 52)

Bangunan Tinggi
Bangunan tinggi permanen dengan jumlah lantai lebih dari lima. (Sumber: 52)

Bangunan Turutan
Bangunan yang menjadi turutan (tambahan atau pengembangan) dari sesuatu induk bangunan yang sudah ada dan terdiri dari beberapa ruang seperti dapur, kakus, kamar mandi, ruang pelayan serta selain dari pada itu paling banyak tiga unit kamar untuk didiami bukan oleh pelayan-pelayan. (Sumber: 52)

Bangunan Unit Daur Ulang dan Pengolahan Kompos (UDPK)
Bangunan pokok UDPK yang terdiri dari ruang kantor, gudang, pemilihan pengomposan yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan pengomposan serta melindungi pemakai/pekerja dan peralatan serta bahan kompos UDPK dan gangguan cuaca. (Sumber: 35)

Bangunan Umum dan Lingkungan
Semua bangunan, tapak bangunan, dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta, maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi, dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk penyandang cacat. (Sumber: 12)

Beban Gempa Statik Ekuivalen
Beban gempa yang menirukan beban gempa sesungguhnya akibat gerakan tanah. (Sumber: 28)

Beban Hidrolik
Besarnya volume air maksimum yang dapat masuk ke bak sesuai dengan besaran bak. (Sumber: 63)

Beban Hidrolik Permukaan
Perbandingan antara beban padatan dan luas permukaan pengendap sekunder. (Sumber:36)

Beban Hidup
Beban yang dianggap atau diketahui akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung dan kedalamnya termasuk beban-beban pada lantai, beban-beban pada atap-atap selain dari beban angin, beban-beban pada langkah dan beban-beban yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah, mesin-mesin dan peralatan yang tidak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung dan dapat diganti selama masa hidup dari gedung tersebut, sehingga mengakibatkan perubahan dalam pembebanan lantai atau atap. (Sumber: 52)

Beban Mati
Berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat permanen termasuk dinding-dinding, pemisah-pemisah, kolom-kolom, lantai-lantai, atap-atap, penyelesaian dan mesin-mesin serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung. (Sumber: 52)

Beban Pencemaran
Jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah. (Sumber: 7)

Beban Permukaan
Debit air limbah yang masuk ke dalam pengolahan lumpur aktif per luas permukaan yang efektif pada tangki pengendapan. (Sumber: 20)

Bentonite Clay
Sejenis Tanah Lempung yang digunakan sebagai material penolong proses pengolahan air. Dapat meningkatkan kepadatan partikel dan berat rata-rata suspensi pencemar air sehingga memudahkan untuk diikat koagulan. Ia juga mempunyai daya serap terhadap senyawa-senyawa organik. (Sumber: 57)

Berwawasan Lingkungan
Suatu upaya dalam mengelola lingkungan agar kelestariannya dapat dipertahankan secara berkelanjutan, sehingga dapat efisien serasi dan seimbang baik untuk generasi sekarang, maupun untuk generasi yang akan datang.
(Sumber: 45)

Beton Pracetak (*Precast Concrete*)
Elemen atau komponen beton tanpa atau dengan tulangan pembesian, yang dicetak terlebih dahulu sebelum dirakit menjadi bangunan. (Sumber: 46)

Bidang Tadah
Daerah permukaan yang menampung limpasan air hujan, dapat berupa atap ataupun permukaan tanah yang terkedapkan. (Sumber: 45)

Bina Lingkungan
Usaha yang dilakukan Pemerintah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kondisi fisik prasarana lingkungan perumahan yang memenuhi persyaratan. (Sumber: 52)

Bina Manusia
Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan potensi masyarakat sehingga mereka mampu memanfaatkan lingkungan yang sudah terbina untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan.
(Sumber: 52)

Bina Usaha
Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat untuk mengadakan prasarana/sarana dan kemudahan-kemudahan lain yang menunjang peningkatan usaha masyarakat dalam lingkungan yang sudah terbina.
(Sumber: 52)

Biodegradasi
Suatu istilah yang digunakan untuk menerangkan bahan organik yang dapat terurai secara biologis. (Sumber: 24)

***Biochemical Oxygen Demand* (BOD)**
Suatu ukuran standar kekuatan air limbah yang menunjukkan jumlah oksigen yang dikonsumsi dalam suatu periode waktu, biasanya lima hari pada suhu 20°C. (Sumber: 24)

Bioremediasi
Upaya pengembalian baku mutu lingkungan yang tercemar dengan cara menggunakan mikro organisme untuk menguraikan bahan pencemar.
(Sumber: 57)

Black Water
Air limbah yang berasal dari kakus, berbentuk tinja manusia. (Sumber: 57)

Blower
Pompa udara untuk memasok oksigen ke dalam air yang diolah di dalam tangki biofilter sistem (Sumber: 48)

Broncaptering
Bangunan penangkap sumber air baku yang berasal dari mata air.(Sumber: 54)

C

***Chemical Oxygen Demand* (COD)**
Oksigen yang diperlukan untuk proses peruraian bahan organik secara kimiawi. Besarnya menggambarkan tingkat pencemaran oleh bahan-bahan organik yang secara alami dapat teroksidasi oleh proses mikrobiologis. (Sumber: 57)

Commissioning
Proses penilaian kinerja IPA (instalasi Pengolahan Air) oleh suatu tim yang dibentuk khusus setelah selesai dibangun dan sebelum diserahterimakan dari penyedia jasa kepada pengguna jasa. (Sumber: 37)

***Community Development Plan* (CDP)**
Suatu perencanaan yang disusun oleh masyarakat melalui survey swadaya dan rembug warga. (Sumber: 52)

Controlled Landfill
Metode pembuangan akhir sampah secara sederhana sebagai upaya transisi menuju sanitary landfill. (Sumber: 52)

Cubluk
1. Sarana pengolah air limbah yang berfungsi mengolah tinja dan urine menjadi kompos. Cubluk hanya menggunakan sedikit air, teknologi sederhana, dan biaya murah. Kelemahan cubluk adalah adanya persyaratan daya resap tanah dan kedalaman air tanah tertentu. Cubluk tidak dapat menampung air limbah kamar mandi, tempat cuci dan dapur. (Sumber: 57)
2. Satu sarana pengumpul dan pengolahan air limbah domestik pada sistem setempat yang terbuat dari konstruksi tidak kdap air dilengkapi dengan bidang rembesan. (Sumber: 24)
3. Sarana untuk menampung dan merembeskan limbah kakus dalam bentuk sumuran (dengan menggali tanah). (Sumber: 43)

Cubluk Kembar
Dua buah sumuran untuk menampung dan merembeskan limbah dari kakus yang dibuat dengan cara menggali tanah dan digunakan secara bergantian. (Sumber: 40)

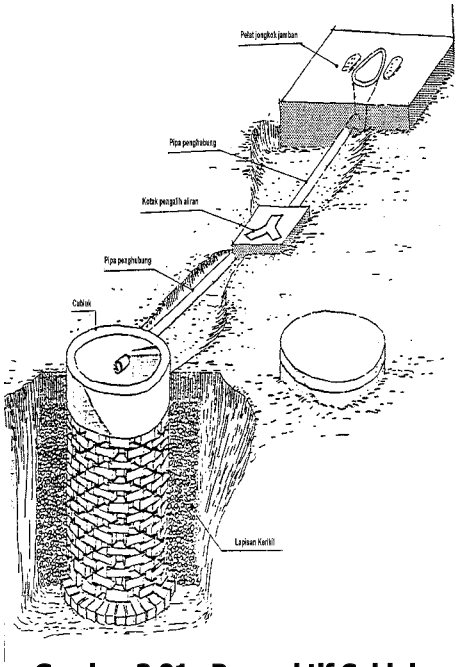

Gambar 3.01 Perspektif Cubluk (Sumber : 66)

D

Daerah Genangan
Daerah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase atau juga merupakan daerah genangan alamiah yang hanya tergenang pada saat terjadi banjir. (Sumber: 30)

Daerah Pengaliran
Daerah tangkapan air yang mengalirkan air ke dalam saluran. (Sumber: 31)

Daerah Rawan Bencana
Daerah dimana keseimbangan fisiknya mudah berubah dan penyebabnya bersifat alamiah dan atau karena perilaku manusia dan kejadiannya sulit diduga. (Sumber: 52)

Daktilitas
Kemampuan struktur bangunan gedung untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup, sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang keruntuhan (Sumber: 28)

Dampak Lingkungan
Perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. (Sumber: 52)

Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)
Sejumlah dana/uang yang merupakan pagu suatu kelurahan yang besarnya didasarkan pada jumlah penduduk pada suatu kelurahan sasaran program pembangunan. (Sumber: 52)

Daur Ulang Sampah
Cara memisahkan sampah yang dapat menghasilkan produk yang bermanfaat; Kembalinya bahan atau sifat bahan yang telah terbuang ke dalam sistem produk yang sama, sebagaimana kembalinya sampah kertas dalam pembuatan kertas baru. (Sumber:25)

Daya Tampung Beban Pencemaran
Kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. (Sumber: 7)

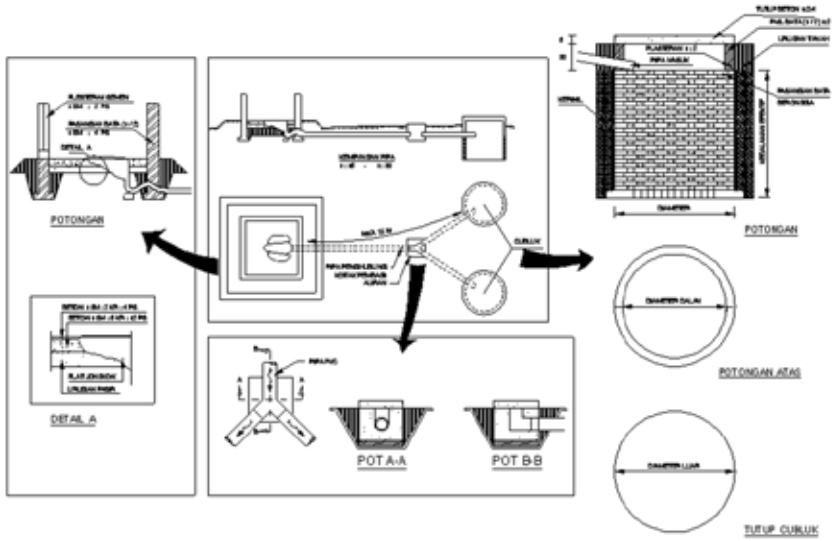

Gambar 3.02 Detail Cubluk Kembar (Sumber : 66)

Denitrifikasi
Proses biologis dimana nitrat dirubah menjadi nitrogen. Pengurangan biologis tanpa udara untuk nitrat oksigen menjadi gas juga penghilangan keseluruhan nitrogen dari sistem pada proses pengolahan air limbah. (Sumber: 24)

Depo Pemindahan Sampah
Tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan kontainer pengangkut dan atau ram, dan atau kantor bengkel. (Sumber: 22)

Desinfeksi
Proses pembubuhan bahan kimia untuk mengurangi zat organik pada air baku dan mematikan kuman/organisme. (Sumber: 37)

Desinfektan
Bahan (kimia) yang digunakan untuk mematikan bakteri pathogen dan memperlambat pertumbuhan lumut. (Sumber: 37)

Diffuser
Piringan atau tabung berpori dimana udara atau gas lain dipaksa dan dibentuk menjadi gelembung untuk difusi di dalam cairan. (Sumber: 24)

Dinding
Sarana atau perlengkapan bangunan untuk melindungi pemakai dari pandangan orang lain, keamanan maupun gangguan angin dan sinar matahari. (Sumber: 35)

Dinding Diafragma
Suatu bagian struktur gedung yang berupa sekat (seperti pelat lantai atau atap), atau suatu rangka yang berfungsi membagikan beban geser tingkat kepada unsur-unsur penahan gempa dalam tingkat tersebut. (Sumber: 52)

Dinding Geser Berangkai Daktil
Dua buah atau lebih dinding geser kantilever yang daktailnya dirangkaikan satu dengan lainnya oleh balok-balok yang mempunyai perbandingan antara bentang dan tinggi tidak lebih dari 4. (Sumber: 52)

Dinding Geser Kantilever Daktil
Suatu dinding tanpa lubang-lubang yang membuat pengaruh penting terhadap perilaku dari struktur gedung yang bersangkutan, dan yang baru akan runtuh secara daktail setelah beberapa dari tulangan vertikalnya meleleh dalam tarikan akibat momen yang bekerja padanya (tidak seperti halnya akibat tekuk atau geser). Perbandingan antara tinggi dan lebar dinding demikian tidak boleh kurang dari 2 dan lebar dinding tersebut tidak boleh kurang dari 1,5 m. (Sumber: 52)

Dinding Geser Kantilever dengan Daktilitas Terbatas
Suatu dinding geser yang tidak memenuhi ketentuan dari kedua jenis tersebut di atas. (Sumber: 52)

Dinding Luar
Suatu dinding bangunan terluas yang bukan merupakan dinding pembatas. (Sumber: 52)

Dinding Luar Non-Struktural
Suatu dinding luar yang tidak memikul beban dan bukan merupakan dinding panel. (Sumber: 52)

Dinding Partisi
Dinding dari bahan pasangan maupun panel kayu atau panel bahan lainnya yang tidak digunakan sebagai pemikul beban. (Sumber: 28)

Dinding Pembatas
Dinding yang menjadi pembatas antara bangunan. (Sumber: 52)

Dinding Pemikul Beban
Dinding yang diperkuat dengan kerangka (frame) dari kayu atau beton bertulang yang berfungsi sebagai pemikul beban-beban yang diakibatkan oleh beban sendiri, beban gempa atau beban angin. (Sumber: 28)

Disain Berulang
Penggunaan disain produk yang sudah ada oleh konsultan yang sama yang digunakan secara berulang, dan telah ditetapkan sebelumnya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). (Sumber: 52)

Disain Berulang Parsial
Disain produk konsultan yang menggunakan sebagian dokumen pelelangan yang telah ada secara berulang untuk pekerjaan lain pada lokasi yang sama atau pada lokasi lain.
(Sumber: 52)

Disain Berulang Total
Disain produk konsultan yang menggunakan seluruh dokumen pelelangan yang sudah ada secara berulang untuk pekerjaan lain pada lokasi yang sama atau pada lokasi lain. (Sumber: 52)

Dokumen Administratif (Bangunan Gedung)
Dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif misalnya dokumen kepemilikan bangunan gedung, kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan bangunan gedung. (Sumber: 29)

Dokumen Pelaksanaan (Bangunan Gedung)
Dokumen hasil kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi rencana teknis dan syarat-syarat, gambar-gambar workshop, *as built drawings*, dan dokurnen ikatan kerja. (Sumber: 29)

Dokumen Rencana Teknis (Bangunan Gedung)
Rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, dan laporan perencanaan. (Sumber: 60)

Drain Inlet atau Inlet Saluran
Lubang tempat masuknya air permukaan untuk dialirkan ke sistem drainase yang ada. (Sumber: 30)

Drainase
Prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan bantuan. (Sumber: 30)

Drainase Perkotaan
1. Sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan didaerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia. (Sumber: 47)
2. Prasarana drainase, berupa saluran atau sungai atau saluran buatan yang berada di dalam wilayah administrasi kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan ke badan air dan atau ke bangunan resapan buatan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia; (Sumber: 41)

Drop Manhole
Tempat pertemuan saluran yang mempunyai perbedaan ketinggian relatif besar 60-90 cm. (Sumber: 24)

E

Effluen
Air yang keluar dari sistem pengolahan (Sumber: 48)

Ekosistem
Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. (Sumber: 52)

Elemen Bangunan
Komponen arsitektural, struktural atau mekanikal dari suatu bangunan, fasilitas, ruang atau tapak, seperti telepon, pintu, tempat duduk dan closet. (Sumber: 52)

CIPTA KARYA

Elevasi/Peil
Ketinggian maksimum / minimum lantai dasar bangunan dari muka jalan ditentukan untuk pengendalian keselamatan bangunan, seperti dari bahaya banjir, dan pengendalian bentuk estetika bangunan secara keseluruhan/ kesatuan lingkungan, serta aspek aksesibilitas . (Sumber: 52)

Eskalator
Tangga berjalan dalam bangunan. (Sumber: 52)

Eutrofikasi
Proses penyuburan badan air yang dapat menimbulkan pertumbuhan gulma air seperti enceng gondok yang akan menyebabkan pendangkalan dan kondisi terganggunya kehidupan air.
(Sumber: 63)

F

Facade (Frontage)
Bidang yang tampak pada bangunan arsitektur: wajah bangunan (*the face of a building*), mencerminkan bagian terpenting dari bangunan itu sendiri. (Sumber: 52)

Faktor Hari Maksimum
Angka perbandingan antara kebutuhan air pada hari maksimum dengan kebutuhan air rata-rata. (Sumber: 54)

Faktor Jam Puncak
Angka perbandingan antara kebutuhan air pada jam sibuk (puncak) dengan kebutuhan air rata-rata. (Sumber: 54)

Fasilitas
Semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia. (Sumber: 11)

Fasilitas Komunitas/Lingkungan
Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah dan atau masyarakat yang diperlukan serta digunakan oleh orang banyak, misalnya jalan, sekolah, pasar, perpustakaan umum, taman, pusat pelayanan kesehatan, kantor pos, polisi, dan pemadam kebakaran; juga fasilitas-fasilitas yang secara nirlaba dimiliki dan dioperasikan oleh perorangan atau badan hukum mis gereja, mesjid, surau, langgar, lapangan olah raga. (padanan kata = fasilitas lingkungan). (Sumber: 24)

Fasilitas Lingkungan
Fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, yang antara lain dapat berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan, lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, peribadatan, fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum serta pemakaman dan pertamanan. (Sumber: 52)

Fasilitas Sosial
Berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, panti sosial, rumah sakit, puskesmas, sekolah. (Sumber: 5)

Fasilitas Umum
Berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar. (Sumber: 5)

Filtrasi
Proses pemisahan dengan cara melewatkan campuran partikel dan cairan melalui material berpori, dimana partikel akan terperangkap dan cairan lolos (lewat). (Sumber: 37)

Flok
Gumpalan lumpur yang dihasilkan dari pembubuhan koagulan. (Sumber: 37)

Flokulasi
Proses pengadukan air dengan gradien kecepatan tertentu untuk membentuk flok dalam ukuran yang cukup untuk dapat mengendap. (Sumber: 37)

Flotasi
Proses pemisahan padatan dan air berdasarkan perbedaan berat jenis dengan cara diapungkan.
(Sumber: 37)

Fungsi Bangunan Gedung
Meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya dan fungsi khusus adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
(Sumber: 10)

G

Garis Muka Bangunan (GMB)
Merupakan sempadan sebagai garis batas maksimal tepi dinding muka bangunan bagian luar yang berhadapan dengan jalan; bersifat komplementer dengan garis sempadan bangunan, dibuat untuk mendaptakan efek ruang tertentu pada suatu lingkungan yang bersangkutan. Dengan adanya GMB, sempadan tidak selalu garis menerus yang sejajar jalan, tetapi dapat pula berupa garis lengkung, dan lain-lain, sesuai dengan efek ruang yang akan diciptakan. (Sumber: 52)

Garis Pengendalian
Garis yang menunjukkan struktur posisi hirarki yang menyangkut tugas dan tanggung jawab, dalam hal ini lembaga yang berada di bawah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada lembaga di atasnya.
(Sumber: 52)

Garis Sempadan Bangunan
Sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar riool (saluran air kotor) sampai batas terluar muka bangunan, yang berfungsi sebagai pembatas ruang; atau merupakan jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap:
- batas lahan yang dikuasai,
- batas tepi sungai/pantai,
- antara massa bangunan lainnya, atau
- rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya. (Sumber: 52)

Garis Sempadan Belakang
Garis sempadan belakang garis dibelakang mana terhitung dari jalan berbatasan, tidak diperkenankan didirikan sesuatu bangunan . (Sumber: 52)

Garis Sempadan Belakang Bangunan
Garis dibelakang mana terhitung dari jalan yang berbatasan, tidak diperkenankan didirikan sesuatu induk bangunan. (Sumber: 52)

Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai
Garis batas luar pengamanan danau, waduk, mata air, sungai khusus dan pantai. (Sumber: 52)

Garis Sempadan Drainase
Garis batas luar saluran untuk melindungi fungsi drainase perkotaan. (Sumber: 14)

Garis Sempadan Jalan
Garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan. (Sumber: 52)

Garis Sempadan Muka Bangunan
Garis yang pada pendirian bangunan kearah jalan yang berbatasan, di atas permukaan tanah tidak boleh dilampaui kecuali mengenai pagar-pagar pekarangan. (Sumber: 52)

Garis Sempadan Pagar
Garis bagian luar dari pagar persil atau pagar pekarangan. (Sumber: 52)

Garis Sempadan Saluran
Garis batas luar pengamanan saluran. (Sumber: 52)

Garis Sempadan Samping/Belakang Bangunan (GSpB/GSbB)
Sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas samping atau belakang kapling, yang dihitung dari garis batas kapling terhadap baris terluar samping/belakang bangunan

yang berfungsi sebagai ruang, untuk pertimbangan faktor keselamatan antar bangunan. (Sumber: 52)

Gentrifikasi
Usaha peningkatan vitalitas suatu lingkungan permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungannya, namun tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari struktur fisik lingkungan permukiman. (Sumber: 52)

Grey Water
Air limbah yang berasal dari kamar mandi, bak cuci, dapur, dll (tidak mengandung tinja). (Sumber: 57)

Grit Removal
Proses pengolahan air limbah awal untuk menghilangkan pasir halus dari bahan padat organik. (Sumber: 24)

Getaran Kejut
Getaran yang berlangsung secara tiba-tiba dan sesaat. (Sumber: 52)

Getaran Mekanik
Getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia.
(Sumber: 52)

Getaran Seismik
Getaran tanah yang disebabkan oleh peristiwa alam dan kegiatan manusia. (Sumber: 52)

Gubahan Massa Bangunan
Hasil susunan perletakan massa-massa bangunan pada satu lingkungan, yang mempertimbangkan faktor geografi, lingkungan, visual dan fungsional bangunan. (Sumber: 52)

H

Hak Atas Ruang
Hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. (Sumber: 52)

Hak Tanggungan
Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. (Sumber: 52)

Halaman Belakang
Sebagian dari suatu pekarangan yang bukan halaman muka. (Sumber: 52)

Halaman Muka
Sebagian dari sesuatu pekarangan, terletak antara garis sempadan pagar dan garis yang ditarik dua meter di belakang garis sempadan muka rumah, atau jika halaman belakang yang terletak di samping induk rumah itu ditutup garis dari penutup itu. (Sumber: 52)

Hidran Kebakaran
1. Hidran yang digunakan untuk mengambil air jika terjadi kebakaran. (Sumber: 54)
2. Suatu sistem pemadam kebakaran dengan menggunakan air bertekanan dalam upaya penyelamatan, pencegahan dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran. (Sumber: 52)

Hidran Umum
Kran umum yang menggunakan bak penampungan air sementara dan dipakai oleh masyarakat umum disekitar lokasi hidran umum. (Sumber: 54)

Higienis
Bersih, sehat dan tidak mengganggu kesehatan. (Sumber: 57)

Hydrofor
Bejana atau tangki yang dipasang dan dihubungkan dengan pipa tekan pompa, berfungsi untuk meredam lonjakan tekanan yang terjadi akibat pukulan air (*water hammer*). (Sumber: 44)

I

Indikator Perumahan dan Permukiman
Petunjuk atau sesuatu yang memberikan petunjuk atau keterangan, dalam hal ini adalah alat ukur kinerja pelayanan bidang perumahan dan permukiman.
(Sumber: 52)

Induk Bangunan
Jika di sesuatu persil hanya terdapat sebuah bangunan-bangunan; Jika di sesuatu persil terdapat beberapa bangunan, ialah bangunan-bangunan yang bukan rumah turutan yang nyata-nyata termasuk dalam induk rumah itu dan sarna sekali menjadi satu gabungan dengan induk rumah itu.
(Sumber: 52)

Infill
Pembangunan baru dengan fungsi lain atau sebagai fungsi penunjang pada lingkungan atau kawasan yang masih kontekstual dengan bangunan dan lingkungan eksisting sehingga dapat memperkuat citra/image lingkungan dan kawasan yang bersangkutan.
(Sumber: 52)

Infiltration Gallery
Jenis intake/pengambilan air baku yang menggunakan pipa resapan untuk mendapatkan airnya. (Sumber: 54)

Influen
1. Air atau air limbah atau cairan lain mengalir ke dalam dam, kolam, tempat pengolahan atau proses pengolahan. (Sumber: 24)
2. Air yang masuk ke sistem pengolahan. (Sumber: 48)

Informasi Perumahan dan Permukiman
Data dan keterangan yang meliputi berbagai hal mengenai rumah dan perumahan antara lain aspek lokasi, kondisi, status rumah dan tanah, prasarana dan sarananya yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan ketertiban pemanfaatan dan pengelolaan rumah. (Sumber: 52)

Inlet
1. Tempat pemasukan air limbah rumah tangga ke dalam tangki pengolah (Sumber: 48)
2. Saluran masuknya semua limbah domestik ke dalam tangki septik. (Sumber: 63)

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan. (Sumber: 15)

Instalasi Pengolahan Air (IPA)
Suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku meniadi air bersih/minum. (Sumber: 54)

Instalasi Pengolahan Air Konvensional
Instalasi pengolahan air sederhana yang berfungsi untuk mengolah air baku dengan kualiatas tertentu. (Sumber: 54)

Instalasi Pengolahan Air Lengkap
Suatu instalasi pengolahan air baku menjadi air bersih yang lengkap terdiri dari unit-unit intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi. Biasanya digunakan untuk mengolah air permukaan yang keruh. (Sumber: 54)

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1. Sistem yang mengolah lumpur yang berasal dari pengurasan tangki septik dan cubluk. (Sumber: 24)
2. Seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja (Sumber: 33)
3. Instalasi pengolahan air limbah yang di desain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan). (Sumber: 34)

Instalasi dan Perlengkapan Bangunan
Instalasi dan pertengkapan pada bangunan dan pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam bangunan.
(Sumber: 52)

Insinerator Berwawasan Lingkungan
Alat yang digunakan untuk meminimalkan sampah dengan cara membakar pada temperatur 700 °C pada tungku bakar dan di cerobong. (Sumber: 22)

Intake
Bangunan penangkap air atau tempat air masuk dari sungai, danau atau sumber air permukaan lainnya ke instalasi pengolahan. (Sumber: 54)

Intake Bendung
Suatu jenis intake yang menggunakan bendung untuk mendapatkan airnya. (Sumber: 54)

Intensitas Hujan
Tinggi curah hujan dalam periode tertentu, dinyatakan dalam satuan mm/jam. (Sumber: 45)

Intensitas Hijau Kota
Persentase luas area/kawasan yang tertutupi oleh hijau tanaman terhadap total luas wilayah kota. (Sumber: 52)

Izin Layak Huni (ILH)
Izin yang diberikan kepada bad an usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun dengan sah untuk hunian yang telah memenuhi persyaratan layak teknis, ekologis dan administrasi. (Sumber: 52)

Izin Lokasi
Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. (Sumber: 52)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. (Sumber: 4)

Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
Izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun, bagi penggunaan non hunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis, dan administrasi yang ada. (Sumber: 52)

Izin Penghunian (IP)
Izin yang diberikan kepada caton penghuni pemilik bangunan yang telah memfllki/dilengkapi dengan IPB/ILH. (Sumber: 52)

J

Jalan Lingkungan Perumahan
Jalan yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan.
(Sumber: 52)

Jalan Lingkungan Permukiman I
Jalan di dalam lingkungan perumahan yang dipergunakan untuk segala macam kendaraan roda 4 (empat).
(Sumber: 52)

Jalan Lingkungan Permukiman II (Setapak Kolektor)
Jalan di dalam lingkungan perumahan yang dipergunakan untuk menampung arus manusia dari jalan setapak menuju suatu fasilitas lingkungan. (Sumber: 52)

Jalan Lingkungan Permukiman III (Jalan Setapak)
Jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki. (Sumber: 52)

Jalan Penghubung Lingkungan Perumahan
Jalan yang menghubungkan lingkungan perumahan dengan jalan lokal terdekat. (Sumber: 52)

Jalan Poros Lingkungan Perumahan
Jalan yang menghubungkan masing-masing satuan permukiman atau lingkungan perumahan. (Sumber: 52)

Jalur Pedestrian
Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang cacat secara aman, nyaman dan tak terhalang. (Sumber: 52)

Jamban
Tempat pembuangan kotoran manusia yang dibangun untuk menghindari kontak langsung antara kotoran tersebut dengan manusia, hewan dan serangga.
(Sumber: 57)

Jarak Antara Bangunan
Jarak terkecil antara bangunan yang diukur antara permukaan-permukaan denah bangunan. (Sumber: 52)

Jaringan Distribusi Utama (JDU)
Jalur pipa utama pembawa air minum dari titik awal (reservoir) ke titik akhir pelayanan air minum. (Sumber: 54)

Jaringan Persil
Jaringan sanitasi dan jaringan drainase dalam persil. (Sumber: 52)

Jaringan Saluran Umum Kota
Jaringan sarana dan prasarana saluran umum perkotaan, seperti: jaringan air minum, jaringan sanitasi dan jaringan drainase. (Sumber: 52)

Jembatan Air atau Talang Air (*Aquaduck*)
Bangunan yang berfungsi menyeberangkan air dari suatu tempat ke tempat lain yang dipisahkan oleh suatu badan air atau badan jalan yang mempunyai elevasi lebih rendah dibandingkan dasar saluran air tersebut. (Sumber: 57)

Juluran Atap
Bagian atap yang menjulur melebihi dinding luar bangunan, ada pada sekeliling bangunan atau pada daerah-daerah yang diperlukan. (Sumber: 52)

Junction
Tempat penggabungan beberapa buah saluran. (Sumber: 24)

K

Kala Ulang
Selang waktu pengulangan kejadian hujan atau debit banjir rencana yang mungkin terjadi; (Sumber: 31)

Kaveling/Pekarangan
Suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. (Sumber: 52)

Kawasan Bangunan Bersejarah
Kawasan yang memiliki kaitan dengan sesuatu kehidupan masa lalu lebih dari 50 tahun. Kawasan bangunan bersejarah bisa merupakan bangunan-bangunan, permukiman atau fasilitas umum lainnya yang digunakan secara kolektif.
(Sumber: 52)

Kawasan Kumuh
Bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan yang ditunjukan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana sosial budaya. (Sumber: 58)

Kawasan Perdesaan
Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (Sumber: 21)

Kawasan Perkotaan
Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
(Sumber: 21)

Kawasan Siap Bangun
Sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan. (Sumber: 37)

Keandalan Bangunan Gedung
Kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung. (Sumber: 29)

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan (KSNP Perkotaan)
Merupakan pedoman didalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, dan kegiatan yang berada dan atau terkait didalam pembangunan perkotaan, baik dilingkungan Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan Dunia Usaha. KSNP perkotaan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkotaan melalui rencana, program dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu,efisien, dan efektif.
(Sumber: 68)

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Persampahan (KSNP Persampahan)
Merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman dan kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan persampahan baik dilingkungan departemen, lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah daerah, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha. (Sumber: 58)

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP SPAM)
Merupakan pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, baik di lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan Dunia Usaha. (Sumber: 58)

Kebisingan
Bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. (Sumber: 52)

Kebutuhan Dasar
Suatu tingkat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi sebagai prasyarat bagi individu atau masyarakat untuk hidup secara layak. (Sumber: 52)

Kebocoran (Kehilangan Air)
Selisih antara volume air yang didistribuskan dengan volume air yang terjual. (Sumber: 54)

Kebutuhan Air Domestik
Perhitungan kebutuhan air minum bagi penduduk lingkungan perumahan yang terbatas pada keperluan rumah tangga seperti air minum, memasak, mencuci dan mandi. (Sumber: 44)

Kebutuhan Air Non Domestik
Perhitungan kebutuhan air minum bagi penduduk di luar lingkungan perumahan, seperti pertokoan, industri, fasilitas umum, kebakaran dan lain-lain yang tidak terbatas dalam keperluan rumah tangga. (Sumber: 52)

Kebutuhan Air Hari Maksimum
Kebutuhan air bersih terbesar yang terjadi pada suatu hari dalam satu minggu (Sumber: 54)

Kebutuhan Air Jam Puncak
Kebutuhan air bersih tertinggi yang terjadi pada jam-jam sibuk (tertentu) setiap hari. (Sumber: 54)

Kebutuhan Air Rata-Rata
Kebutuhan air bersih rata-rata setiap hari. (Sumber: 54)

Kehilangan tekanan
Energi yang hilang ketika air mengalir dalam perpipaan. (Sumber: 44)

Kegagalan Bangunan
Kinerja bangunan gedung dalam tahap pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum. (Sumber: 29)

Kelembagaan Bangunan Gedung
Pewadahan umum penyelenggaraan bangunan gedung meliputi seluruh stakeholders terkait, yang dalam pelaksanaan tugas secara spesifik sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di daerah dengan mengutamakan standar pelayanan minimal di bidang bangunan gedung, diwadahi secara formal oleh instansi teknis selaku pembina penyelenggaraan bangunan gedung, sehingga dengan dukungan jaringan jaringan kerjanya dapat meningkatkan kinerja untuk mencapai visi dan misi di bidang bangunan gedung. (Sumber: 64)

Kelompok Bangunan
Sekelompok bangunan/gedung yang saling berhubungan atau masing-masing saling terpisah yang oleh karena sifat arsitekturalnya, homogenitasnya atau lokasinya di lansekap, yang bemilai universal dan sangat penting dari sudut pan dang kesejarahan, seni dan pengetahuan. (Sumber: 52)

Kenyamanan (Bangunan Gedung)
Kondisi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan oleh kinerja bangunan gedung. (Sumber: 29)

Kepadatan Bangunan
Perbandingan antara luas yang tertutup bangunan dengan luas tanah terbuka sesuai blok peruntukannya.
(Sumber: 52)

Kerangka Pemikul Beban
Struktur pemikul beban baik yang dibuat dari kayu, beton bertulang dan baja yang difungsikan untuk memikul beban-beban yang diakibatkan oleh angin atau gempa (Sumber: 28)

Kerusakan Bangunan
Tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/ berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. (Sumber: 52)

Kesadahan
Air mengandung bi-karbonat tinggi, sehingga tidak sanggup membilas sabun yang dioles pada badan kita.
(Sumber: 57)

Keselamatan Bangunan Gedung
Kondisi kemampuan mendukung beban muatan, serta kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung. (Sumber: 29)

Ketentuan Administrasi Bangunan
Ketentuan-ketentuan administrasi yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi ketentuan status hak atas tanah dan atau status hak penggunaan ruang.
(Sumber: 52)

Ketentuan Teknis Bangunan
Ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi ketentuan tata bangunan dan lingkungan dan keandalan bangunan gedung. (Sumber: 52)

Ketinggian Bangunan
Jarak vertikal antara permukaaan tanah dengan bagian tertinggi dari bangunan. (Sumber: 52)

Klarifier
Tangki tetap yang digunakan untuk menghilangkan benda padat tersuspensi dengan pengendapan gravitasi. Tangki ini biasanya dilengkapi dengan rantai dan tenaga mesin atau mekanisme alat untuk mengumpulkan endapan *sludge* dan memindahkannya ke tempat pemindahan akhir. (Sumber: 24)

Klasifikasi Bangunan Gedung
Klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan (Sumber: 10)

Klorinasi
Salah satu komponen pada bangunan pengolahan air yang berfungsi untuk pembubuh desinfektan (pembunuh bakteri dan kuman yang merugikan kesehatan). (Sumber: 54)

Koagulan
Bahan (kimia) yang digunakan pembentukan flok pada proses pencampuran. (Sumber: 19)

Koagulasi
Proses pengadukan bahan kimia (koagulan) ke dalam air dengan gradien kecepatan tertentu yang dapat membentuk partikel koloid tidak stabil atau disebut flok. (Sumber: 19)

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
Koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/ blok peruntukan. (Sumber: 4)

Koefisien Laju Penggunaan Oksigen (Pengolahan Air Limbah)
Laju penggunaan oksigen terlarut per unit konsentrasi (mg/liter) dari MLSS dalam tangki aerasi pengolahan lumpur aktif. (Sumber: 20)

Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
Koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/blok peruntukan. (Sumber: 4)

Koefisien Limpasan
Nilai perbandingan antara jumlah limpasan permukaan dengan jumlah limpasan permukaan dengan jumlah hujan yang jatuh. (Sumber: 45)

Kolam Aerasi pada IPLT
Kolam yang berfungsi menguraikan kandungan bahan organik yang terdapat dalam lumpur tinja dengan menggunakan bakteri pengurai aerob yang dibiakkan dan dengan tekanan udara yang dihasilkan oleh kompresor guna memasukkan oksigen (secara mekanis maupun alami). (Sumber: 33)

Kolam Aerasi Aerobik (Pengolahan Air Limbah)
Unit pengolahan air limbah yang menggunakan aerasi secara mekanik sebagai sumber oksigen dengan tujuan mendapatkan kondisi suspensi teraerasi secara penuh. (Sumber: 64)

Kolam Aerasi Fakultatif (Pengolahan Air Limbah)
Unit pengolahan air limbah dengan aerasi mekanik sebagai sumber oksigennya. Intensitas pengadukan tidak menjaga seluruh settleable solid berada di dalam suspensi. Sehingga disekitar /pada dasar kolam terdapat endapan lumpur dengan kondisi anaerobic. (Sumber: 34)

Kolam Fakultatif
Kolam penampung untuk menguraikan kandungan bahan pencemar organik yang masih mengandung senyawa organik 250 – 400 mg/l dari efluen lumpur tinja kolam anaerobik, bentuk kolam empat persegi panjang dengan kedalaman 1 –2 meter. (Sumber: 33)

Kolam (*Lagoon*)
Kolam penyimpanan besar, biasanya dengan dinding tanah, digunakan untuk menampung air/air limbah sementara, hasil sedimentasi maupun sebagai proses oksidasi biologis. (Sumber: 24)

Kolam Retensi
Kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan sementara waktu dengan memberikan kesempatan untuk dapat meresap kedalam tanah yang operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu air.
(Sumber: 30)

Kompartemen
Ruangan-ruangan yang ada dalam unit pengolah yang dipisahkan dengan baffle. (Sumber: 63)

Kompartemenisasi
Penyekatan ruang dalam luasan maksimum dan/atau volume maksimum ruang sesuai dengan klasifikasi bangunan dan tipe konstruksi tahan api yang diperhitungkan. Dinding penyekat pembentuk kompartemen dimaksudkan untuk melokalisir api dan asap kebakaran, atau mencegah penjalaran panas ke ruang bersebelahan. (Sumber: 4)

Kompensasi Dampak Lingkungan TPA
Pemberian imbalan (dapat berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau dalam bentuk yang lain) kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah. (Sumber: 5)

Komponen Struktur Utama
Bagian-bagian bangunan gedung yang memikul dan meneruskan beban ke pondasi. (Sumber: 52)

Kompos
Hasil pengolahan sampah organik dengan bantuan mikrooganisme sehingga terbentuk pupuk organik. (Sumber: 35)

Komposter (Rumah Tangga)
Alat yang digunakan untuk mengolah sampah organik dapur (rumah tangga) menjadi kompos. (Sumber: 17)

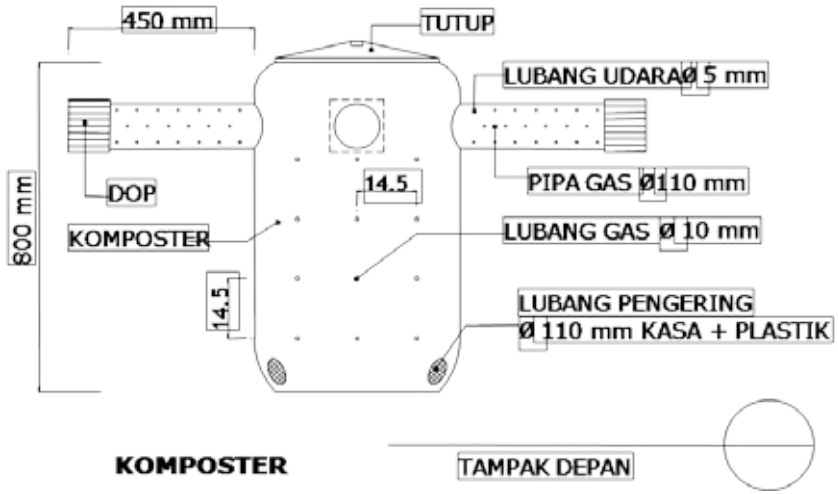

Gambar 3.03 Komposter Rumah Tangga (Sumber : 66)

Konsolidasi Tanah Permukiman
Upaya penataan kembali, penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun (Lisiba) dan penyediaan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (Sumber: 37)

K**ota Terpadu Mandiri**
Kawasan Transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi Pusat Pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
(Sumber: 68)

Kran Air Siap Minum
Kran air yang menyalurkan air siap minum yang berada dalam zona air minum. (Sumber: 50)

Kran Umum (KU)
Jenis sambungan pelanggan yang mengambil air melalui kran yang dipasang disuatu tempat tertentu agar mudah dipergunakan untuk umum guna mencukupi kebutuhan dasar (minum,mandi,cuci). (Sumber: 44)

L

Lahan Pekarangan
Lahan atau halaman yang dapat difungsikan untuk menempatkan sumur resapan air hujan, Saringan air hujan, paving block/gras block. (Sumber: 41)

Laik Fungsi
Berfungsinya seluruh atau sebagian dari bangunan gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. (Sumber: 4)

Laju Lumpur Resirkulasi
Perbandingan relatif antara debit lumpur resirkulasi cair dengan debit air, yang dinyatakan dalam prosentase.
(Sumber: 20)

Laju Pengendapan Lumpur Aktif (SV30)
Prosentase relatif antara volume dari endapan lumpur yang terbentuk setelah lumpur aktif didiamkan di dalam gelas ukur berkapasitas 1 liter selama 30 menit, dinyatakan dalam persen terhadap volume lumpur cair. (Sumber: 20)

Laju Penggunaan Oksigen (Pengolahan Air Limbah)
Konsentrasi oksigen terlarut (mg O/liter), per satuan waktu (jam), dari lumpur cair di dalam tangki aerasi pengolahan lumpur aktif. (Sumber: 20)

Lapisan Kedap Air
Bagian dinding pasangan yang dibuat kedap air dengan menggunakan campuran adukan dan plesteran yang kedap air sehingga lembab/air di sekitarnya tdak dapat melewati atau menembusnya. (Sumber: 52)

Layak Huni
Suatu kondisi lingkungan permukiman yang memenuhi standar minimal kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis yang berdasarkan kondisi setempat. (Sumber: 52)

Leher Angsa
Komponen tandas jongkok berupa pipa bengkok yang berisi air perapat, dapat merupakan satu kesatuan atau terpisah dengan tandas jongkok.
(Sumber: 40)

Limbah
Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: 3)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentraslnya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. (Sumber: 3)

Lingkungan
Sebidang tanah dengan batas.batas yang jelas yang di atasnya dibangun sarana hunian termasuk prasarana, sarana dan fasilitasnya. yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman. (Sumber: 1)

Lingkungan Bangunan Gedung
Lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem. (Sumber: 9)

Lingkungan Permukiman
Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
(Sumber: 45)

Lingkungan Perumahan
Sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya. (Sumber: 52)

Lingkungan Rumah Susun
Sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas, di atasnya sebidang rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman. (Sumber: 52)

Lubang Pemasukan (Inlet) Gorong-Gorong
Gorong-gorong lubang tempat masuknya air ke dalam bangunan gorong-gorong yang letaknya pada bagian hilir gorong-gorong. (Sumber: 30)

Lubang pembersih/*clean out*
Lubang yang digunakan untuk membersihkan pipa air kotor.
(Sumber: 15)

Lubang Pengeluaran (outlet) gorong-gorong
Lubang tempat keluarnya air dari bangunan gorong-gorong yang letaknya pada bagian hilir gorong-gorong.
(Sumber: 30)

Lumpur Tinja
Seluruh isi tangki septik dan cubluk yang terdiri dari cairan dan endapan lumpur yang berasal dari pengurasan tangki septik dan cubluk.
(Sumber: 24)

M

Manhole
1. Lubang pemeriksaan pipa atau bangunan lain. (Sumber: 57)
2. Tempat untuk memeriksa atau memperbaiki saluran dari kotoran yang terbawa aliran. (Sumber: 24)
3. Lubang pada bagian atas tangki septik yang diberi tutup dan dapat dibuka untuk keperluan pemeliharaan tangki septik.
   (Sumber: 62)

Mandi Kakus Prefab
Model sarana umum mandi kakus yang dapat dibongkar pasang dan dipindah-pindah. (Sumber: 27)

Mata Air
Sumber air yang muncul di permukaan tanah dimana air mengalir keluar dengan sendirinya dari dalam tanah secara terus menerus karena tekanan air dalam tanah. (Sumber: 43)

MCK Umum
Sarana umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk mandi, mencuci dan air dilokasi pemukiman yang berpenduduk dengan kepadatan sedang sampai tinggi (300 – 500 orang/Ha). (Sumber: 15)

Mekanikal
Komponen yang terdiri dari jaringan listrik untuk suplai tenaga ke pompa-pompa, lampu penerangan yang memerlukan tenaga listrik. (Sumber: 54)

Mobil Tinja
Sarana transportasi yang berbentuk mobil tangki yang digunakan untuk menguras lumpur tinja dari bangunan pengolah air limbah rumah tangga yang kemudian dibawa ke IPLT untuk diolah.
(Sumber: 33)

Mutu air
Kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi mutu air:
1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. (Sumber: 7)

N

Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP)
Kegiatan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan menggunakan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). (Sumber: 56)

Nutrien
Jenis limbah cair yang mengandung unsur nitrogen dan phospat yang pada umumnya banyak terdapat dalam limbah domestik. Limbah ini dapat menyebabkan eutrofikasi. (Sumber: 63)

Netralisasi
Proses untuk menyesuaikan derajat keasaman (pH) pada air dalam proses tertentu. (Sumber: 44)

Netralisan
Bahan kimia yang digunakan untuk menyesuaikan derajat keasaman (pH) pada suatu proses tertentu.
(Sumber: 44)

O

Orientasi Bangunan
Ketentuan tentang orientasi bangunan setidak-tidaknya mengatur arah suatu bangunan setelah mempertimbangkan kondisi fisik/lingkungan dan kondisi non fisik
1. Pertimbangan terhadap kondisi fisik/ lingkungan seperti arah sirkulasi matahari tlmur-barat, jarak antar bangunan, klimatologi.
2. Pertimbangan terhadap kondisi non fisik seperti pengaruh idiologi, nilai-nilai sosial budaya setempat, misalnya bangunan masjid mengarah ke kiblat, aksentuasi, dan makna ruang yang akan diciptakan.(Sumber: 52)

Outlet
1. Tempat aliran keluar (Sumber: 20)
2. Saluran keluar air limbah dari tangki septik yang telah terpisah dengan padatan. (Sumber: 63)

Overhang
Perlengkapan pada dasar zona sedimentasi untuk mencegah masuknya gas yang terbentuk dari zona lumpur di bawahnya di dalam tangki imhoff. (Sumber: 34)

Ozonisasi
Proses desinfeksi dengan menggunakan ozon (0_3). (Sumber: 54)

P

Panduan Rancang Kota (UDGL=*Urban Design Guidelines*)
Suatu perangkat pengaturan berupa panduan/arahan desain tata bangunan berikut lingkungannya untuk suatu kawasan/bagian kota tertentu. Materi panduan rancang kota bersifat spesifik sesuai dengan keragaman yang ada antara suatu kawasan dengan kawasan yang lain. Umumnya rumusan yang tertulis di dalam suatu panduan rancang kota dibuat sedemikian rupa tanpa mengurangi kreativitas arsitek.
(Sumber: 52)

Panel dan Kontrol
Jumlah panel untuk mengkontrol jalannya operasi seperti operasi pompa, tekanan air, bahan kimia dan sistem listrik.
(Sumber: 54)

Pedoman Teknis Bangunan Gedung
Acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung. (Sumber: 29)

Pelat Jongkok
Sarana/perlengkapan yang dilengkapi lubang masuk tinja dan air kotor yang selanjutnya dialirkan ke cubluk.
(Sumber: 39)

Pelestarian Bangunan Gedung
Kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. (Sumber: 4)

Pematus
Sarana untuk mengalirkan atau mengeringkan air dalam komposter yang dilengkapi dengan kasa-kasa dan lubang-lubang. (Sumber: 26)

Pemadatan Sampah
Upaya mengurangi volume sampah dengan cara dipadatkan baik secara manual maupun mekanis, sehingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir lebih efisien. (Sumber: 22)

Pemanfaatan Bangunan Gedung
Kegiatan memanfaatkan/menggunakan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
(Sumber: 4)

Pemantauan Lingkungan
Suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik yang bertujuan untuk mengetahui dampak negatif yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan rumah dan perumahan. (Sumber: 52)

Pematangan Kompos
Tahapan proses dimana bahan sampah telah dalam keadaan cukup busuk. (Sumber: 26)

Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga
Bentuk pengelolaan yang bercirikan pengelolanya memiliki badan hukum dengan bentuk dinas, perusahaan atau swasta, yang dapat bersifat profit atau non profit, dan pengambilan keputusan berada pada pengelolanya.
(Sumber: 57)

CIPTA KARYA

Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Gabungan Lembaga dan Masyarakat
Bentuk Pengelolaan bersama antara lembaga dan masyarakat yang beraspek legalitas formal ataupun non formal, dimana pengambilan keputusan dilakukan bersama dengan tanggung jawab sesuai kesepakatan dan aturan main yang jelas. (Sumber: 57)

Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum. (Sumber: 9)

Pembongkaran Bangunan Gedung
Kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya. (Sumber: 4)

Pembuangan Air Limbah Kota
Sistem pembuangan yang ditujukan untuk melayani pembuangan air limbah kota untuk diolah dan kemudian dibuang sedemikian rupa hingga aman bagi kesehatan. (Sumber: 52)

Pembuangan Air Limbah Lingkungan
Sistem pembuangan yang ditujukan untuk melayani pembuangan air limbah lingkungan untuk diolah dan kemudian dibuang sedemikian rupa hingga aman bagi kesehatan. (Sumber: 52)

Pemeliharaan Bangunan
Usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak. (Sumber: 52)

Pemeliharaan Bangunan Gedung
Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. (Sumber: 4)

Pemeliharaan Sarana Pengambilan Air Baku
Suatu kegiatan pengamanan terhadap sumber air, bangunan penangkap air dan perlengkapannya. (Sumber: 54)

Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum
Serangkaian kegiatan pembersihan, perbaikan, penggantian instrumen dan suku cadang. (Sumber: 54)

Pemeriksaan Berkala (Bangunan Gedung)
Kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung. (Sumber: 4)

Pemilahan Sampah
Proses pemisahan sampah berdasarkan jenis sampah yang dilakukan sejak dari sumber sampai dengan pembuangan akhir. (Sumber: 22)

Pemilihan Sampah
Langkah untuk memilih bahan organik yang dapat digunakan untuk proses pengomposan serta bahan anorganik untuk daur ulang. (Sumber: 26)

Pemilik Bangunan Gedung
Orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. (Sumber: 4)

Pemindahan Sampah
Kegiatan memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. (Sumber: 22)

Pemompaan
Komponen yang terdiri dari pompa untuk mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lainnya yang dapat bekerja bersama-sama dengan hubungan seri atau paralel sesuai dengan kebutuhan kapasitas saat ini. (Sumber: 54)

Pemugaran
Usaha dan upaya pelestarian yang dilakukan baik secara teknis maupun kebijakan untuk membuat bangunan kembali berdaya guna, artinya dapat melayani dan memberikan dukungan pada peningkatan kualitas hidup man usia. Pemugaran tidak terbatas pada pengembalian keadaan seperti sediakala, tetapi juga setiap usaha dan daya untuk rneningkatkan sumbangan keberadaannya di tengah lingkungannya, mengubah tanpa kehilangan aslinya (orisinalitas dan otentisitas). (Sumber: 52)

Penampung Air Hujan (PAH)
Bangunan/ bak yang digunakan untuk penampungan air hujan. (Sumber: 44)

Penampung Lumpur Tinja di Tangki Imhoff
Bagian dasar tangki imhoff yang digunakan untuk menampung hasil pencernaan lumpur di dalam zona lumpur tangki imhoff. (Sumber: 32)

Penanganan Sampah
Meliputi kegiatan:
1. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
2. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. (Sumber: 5)

Penataan Bangunan
Serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan sebagian program dan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan pada kawasan budidaya dalam bentuk bangunan gedung berikut sarana dan prasarananya, baik untuk kepentingan hunian, usaha, maupun untuk kepentingan sosial budaya. (Sumber: 52)

Pencemaran Air
Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. (Sumber: 7)

Pendataan Bangunan Gedung
Kegiatan pengumpulan data suatu bangunan gedung oleh Pemda dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
(Sumber: 59)

Pengangkutan Sampah
Kegiatan membawa sampah dan lokasi pemindahan langsung dan sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir. (Sumber: 22)

Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung
Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan gedung. (Sumber: 4)

Pengawas/Penilik Bangunan
Pejabat atau tenaga teknis profesional yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau ketentuan yang berlaku untuk bertugas mengawasi/ menilik bangunan gedung.
(Sumber: 52)

Pengelolaan Kualitas Air
Upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. (Sumber: 7)

Pengelolaan Sampah
Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (Sumber: 5)

Pengembangan SPAM
Kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik(teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. (Sumber: 8)

Pengendalian Pencemaran Air
Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. (Sumber: 7)

Pengesahan Rencana Teknis (Bangunan Gedung)
Pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung. (Sumber: 60)

Pengguna Bangunan Gedung
Pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. (Sumber: 4)

Penghasil Sampah
Setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. (Sumber: 4)

Pengkaji Teknis
Orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. (Sumber: 4)

Pengolahan Sampah
Suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaur ulangan (3R). (Sumber: 25)

Pengomposan
1. Proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk kompos. (Sumber: 43)
2. Proses biologi yang terjadi pada pembusukan sampah karena adanya kegiatan jasad renik dengan menghasilkan produk kompos yang aman. (Sumber: 25)

Pengumpulan Sampah
Aktivitas penanganan yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual dan atau dari wadah komunal (bersama) melainkan juga mengangkutnya ke tempat terminal tertentu, baik dengan pengangkutan langsung maupun tidak langsung. (Sumber: 22)

Penimbunan Saniter
Suatu cara pembuangan sampah yang dilakukan pada tempat-tempat yang rendah dengan cara penimbunan lapis demi lapis. Setiap lapisan timbunan sampah harus selalu diikuti oleh penimbunan tanah di atasnya. (Sumber: 52)

Penyangga Atap
Bagian pertemuan yang terdiri dari sub struktur segitiga untuk membentuk kerangka atap miring; menopang atap. (Sumber: 65)

Penyediaan Air Minum Kota
Tiap sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh BUMD dan disediakan untuk melayani kebutuhan air minum kota. (Sumber: 52)

Penyediaan Air Minum
Kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. (Sumber: 8)

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Program untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan peri-urban, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun/ menyediakan prasarana dan sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat. (Sumber: 51)

Penyehatan Lingkungan Permukiman (*Environmental Sanitation*)
Upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase, dan sampah. (Sumber: 57)

Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. (Sumber: 4)

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM
Kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik sistem penyediaan air minum. (Sumber: 8)

Penyusutan (Nilai) Bangunan
Nilai degradasi bangunan yang dihitung secara sarna besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan. Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar 2% per tahun untuk bangunan gedung, dan 5% untuk bangunan rumah dengan minimum nilai sisa *(salvage value)* sebesar 20 x. (Sumber: 52)

Perangkap Air (Perapat)
Suatu konstruksi leher angsa yang berfungsi sebagai penutup dan penahan bau yang dalam perangkap alat plambing dengan tinggi muka air minimal 3 cm. (Sumber: 15)

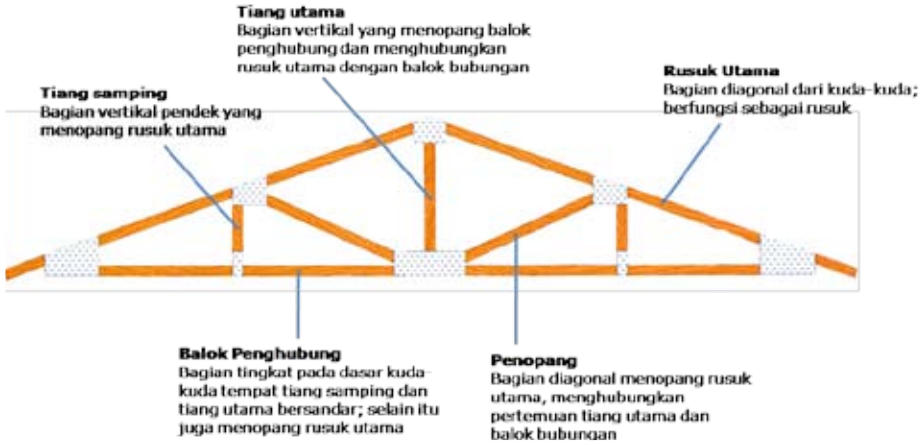

Gambar 3.04 Penyangga Atap (Sumber : 65)

CIPTA KARYA

Perawatan Bangunan Gedung
Kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. (Sumber: 4)

Perencanaan Bangunan Gedung
Kegiatan penyusunan program kebutuhan bangunan, tata letak bangunan dan penyusunan studi kelayakan dan studi AMDAL. (Sumber: 52)

Perkolasi
Kemampuan tanah untuk meresapkan air, besar kecilnya perkolasi tergantung dari porositas media tanah. (Sumber: 63)

Permukiman Kumuh
Lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk, baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya.
(Sumber: 13)

Perlindungan Mata Air
Penyediaan air dengan cara melindungi dan menangkap mata air untuk ditampung dan disalurkan pada pemakai.
(Sumber: 54)

Permeabilitas
Daya resap air pada lapisan tanah, misalnya dinyatakan dalam cm/hari. (Sumber: 57)

Permukiman
Bagian dari kawasan budidaya dalam lingkungan hidup, baik yang bersifat perkotaan maupun perdesaan, terdiri dari beberapa jenis kawasan dengan prasarana dan sarana lingkungan yang lengkap dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kebutuhan penghuninya. (Sumber: 2)

Permukiman Dataran
permukiman yang terletak pada ketinggian 0 sampai dengan 500 m dari permukiman laut dengan kondisi topografi datar atau dengan kemiringan lahan kurang dari 15%. (Sumber: 52)

Permukiman Kepadatan Tinggi
Permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang sangat tinggi, sehingga mengarah kepada ketidakmampuan daya dukung lahan. (Sumber: 52)

Permukiman Kumuh
Lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk, baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya.
(Sumber: 13)

Permukiman Rawan Abrasi
Permukiman yang memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami penggerusan akibat gelombang air laut pada intensitas yang sangat besar serta dengan frekuensi kejadian yang cukup sering. (Sumber: 52)

Permukiman Rawan Banjir
permukiman yang memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami banjir yang genangannya melebihi 1 m dan lama genangan minimal 24 jam dengan frekuensi kejadian minimal setahun satu kali. (Sumber: 52)

Permukiman Rawan Bencana Vulkanik
Permukiman yang terletak di sekitar gunung berapi atau mendapat pengaruh adanya gunung berapi serta memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami bencana akibat kegiatan vulkanik gunung berapi yang bersangkutan. (Sumber: 52)

Permukiman Rawan Erosi
Permukiman yang terletak di suatu kawasan yang mempunyai kondisi tanah yang mempunyai potensi sangat besar untuk mengalami penggerusan permukaan tanah akibat aliran air tanah. (Sumber: 52)

Permukiman Rawan Gempa
Permukiman yang terletak pada jalur-jalur lempeng bumi yang berpotensi mengalami bencana akibat gempa tektonik.
(Sumber: 52)

Permukiman Rawan Kebakaran
Permukiman yang karena sebagian besar jenis kegiatan yang ada di dalamnya, atau jenis bahan bangunannya menyebabkan rentan terhadap bahaya kebakaran. (Sumber: 52)

Permukiman Rawan Longsor
Permukiman yang terletak di atas tanah dengan struktur yang labil sehingga mempunyai kecenderungan sangat besar untuk mengalami longsor. (Sumber: 52)

Persil
Suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam sesuatu rencana perluasan atau jika untuk suatu rencana perluasan kota ataupun sebagiannya masih belum ditetapkan sesuatu rencana perpetakan-sesuatu bagian tanah, yang menurut pertimbangan DPRD/Kepala Daerah dapat dipergunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan-bangunan atau sesuatu kelompok bangunan-bangunan. (Sumber: 52)

Persyaratan Ekologis
Keterkaitan antara keserasian dan keseimbangan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan. (Sumber: 52)

Persyaratan Teknis
Persyaratan mencakup aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan, hemat energi, keandalan sarana dan prasarana lingkungan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan perkembangannya. (Sumber: 52)

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Ketentuan mengenai persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. (Sumber: 10)

Pertimbangan Teknis (Bangunan Gedung)
Pertimbangan dari tim ahli bandunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
(Sumber: 60)

Persetujuan Rencana Teknis (bangunan gedung)
Pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/dievaluasi. (Sumber: 60)

Perumahan
Kelornpok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. (Sumber: 2)

Peruntukan Air
Status pemanfaatan dan fungsi dari suatu badan air penerima. (Sumber: 34)

Pewadahan Sampah
Penampungan sampah sementara di tempat sumbernya, baik pewadahan sampah individual maupun komunal. (Sumber: 53)

Pewadahan Sampah Individual
Penampungan sampah sementara di tempat sumbernya masing-masing, misalnya pewadahan sampan di rumah tangga. (Sumber: 53)

Pewadahan Sampah Komunal
Penampungan sementara sampan secara bersama-sama pada satu tempat. (Sumber: 53)

Pintu Air
Bangunan yang digunakan untuk mencegah suatu aliran masuk ke sistim aliran atau kawasan lain. (Sumber: 30)

CIPTA KARYA

Pintu Kebakaran
Pintu-pintu yang langsung menuju tangga kebakaran dan hanya dipergunakan apabila terjadi kebakaran. (Sumber: 52)

Pipa Inspeksi
Pipa yang berfungsi untuk melihat kondisi tangki septik untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan. (Sumber: 62)

Pipa Penyalur Gas Berlubang
Pipa yang dilubangi untuk mengalirkan gas hasil proses penguraian zat organik melalui lubang-lubang. (Sumber: 26)

Pipa Persil
Saluran yang menyalurkan air limbah dari rumah penduduk, bangunan umum dan sebagainya ke pipa pelayanan.
(Sumber: 24)

Pipa Retikulasi
Pipa retikulasi terdiri dari pipa service dan pipa lateral. (Sumber: 24)

Pipa Selubung
Pipa yang dipasang dalam lubang bor yang bahannya terbuat dari bei, plastik atau serat (fibre) dan berfungsi untuk menahan keruntuhan dinding sumur. (Sumber: 52)

Pipa Pelayanan
Saluran yang menyalurkan air limbah yang menghubungkan beberapa sambungan dari rumah, bangunan umum dan sebagainya (dari pipa persil).
(Sumber: 24)

Pipa Cabang
Saluran air limbah yang menyalurkan air limbah dari pipa lateral ke pipa induk. (Sumber: 24)

Pipa " *high density poly ethylene*"
Pipa yang terbuat dari bahan yang mengandung polyethelyn dengan kerapatan tinggi. (Sumber:54)

Pipa Distribusi
Pipa yang dipergunakan untuk mendistribusikan air bersih ke pelanggan atau konsumen. (Sumber: 54)

Pipa Induk
Saluran air yang menyalurkan air dari pipa cabang menuju instalasi pengolahan. Pipa ini juga terdapat dalam sistem pengolahan air minum dan air limbah. (Sumber: 24)

Pipa Induk Distribusi
Pipa utama untuk mendistribusikan air bersih dari reservoir distribusi ke daerah palayanan melalui titik-titik tapping sambungan sekunder. (Sumber: 54)

Pipa PVC
Pipa dengan bahan dasar plastik yang mengandung poly vinil chlorida.
(Sumber: 54)

Pipa Sekunder
Pipa distribusi yang dipergunakan untuk membagi air dari suatu wilayah pipa primer sampai ke pipa tersier.
(Sumber: 54)

Pipa Tersier
Pipa distribusi yang langsung kerumah-rumah (konsumen). (Sumber: 54)

Pipa Transmisi
Pipa yang dipergunakan untuk mengalirkan air baku ke unit pengolahan atau mengantarkan air minum, dari unit produksi ke unit distribusi utama atau reservoir pembagi. (Sumber: 54)

Plambing
1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemasangan pipa dengan peralatan di dalam gedung yang berdekatan, yang bersangkutan dengan air hujan, air limbah dan air bersih yang dihubungkan dengan sistem kota atau sistem lain yang dibenarkan (Sumber: 15)
2. Praktek pelaksanaan, bahan dan alit plambing yang digunakan pada pemasangan, pemeUharaan, perluasan dan perbaikan pipa, alat plambing, perabotan dan perlengkapan yang bersangkutan dengan:
   a. Sistem drainasi-saniter
   b. Sistem drainasi-air hujan
   c. Sistem ventilasi
   d. Sistem air bersih.
   (Sumber: 52)

Platform
Unit bangunan pelengkap untuk menampung lumpur tinja pertama air sebelum dialirkan ke unit pengolahan utama. Platform bisa dibuat khusus, atau merupakan bagian dari perlengkapan inlet atau sumur pompa. (Sumber: 34)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
(Sumber: 55)

Pompa
Berfungsi untuk mengangkat air dari elevasi/ketinggian yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi atau memindahkan aliran dari aliran satu ke aliran yang lain yang digerakkan oleh penggerak tenaga listrik atau penggerak lainnya. (Sumber: 30)

Pompa Centrifugal
Pompa yang menggunakan gaya centrifugal untuk dapat mengisap air. (Sumber: 54)

Pompa *Submersible* (Pompa Benam)
Pompa dengan jenis konstruksinya kedap air sehingga motornya dapat berada didalam air. (Sumber: 54)

Pompa Turbin
Pompa yang motornya terletak diatas permukaan sedangkan baling-baling/ impeler pompanya terendam dalam air.
(Sumber: 54)

Pompa Vakum
Alat yang berfungsi untuk menguras lumpur tinja dengan cara menghisap lumpur dengan proses vakum.
(Sumber: 61)

Portal
Suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian struktur yang saling berhubungan yang berfungsi menahan beban sebagai suatu kesatuan lengkap yang berdiri sendiri dengan atau tanpa dibantu oleh diafragma-diafragma horizontal / sistem-sistem ikatan lantai.
(Sumber: 52)

Pracetak
Proses pembuatan beton yang dilakukan dengan dicetak terlebih dahulu sebelum dipasang/penerapan.
(Sumber: 45)

Prasarana Lingkungan
Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. (Sumber: 2)

Profil Hidrolis pada IPA
Gambaran yang menunjukkan garis ketinggian muka air bebas dalam tiap unit paket IPA ketika proses berlangsung.
(Sumber: 19)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Lemah (PNPM-PISEW)
Program untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya local untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa (*local governance*), serta penguatan institusi lokal di tingkat desa. (Sumber: 58)

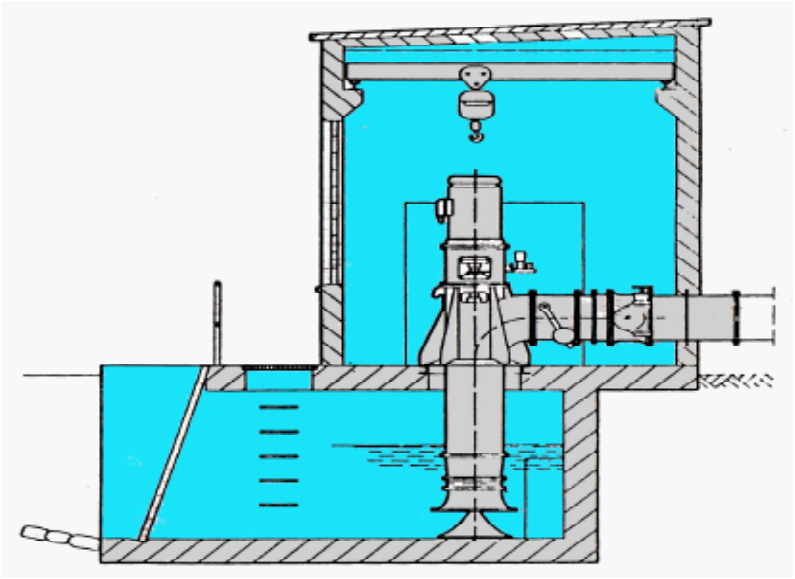

Gambar 3.05 Pompa Centrifugal (Sumber : 66)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
Program yang menitikberatkan penanganannya pada desa tertinggal yang masih memiliki tingkat pelayanan infrastruktur yang rendah. Fokus utama program adalah: (i) Pengembangan masyarakat; (ii) Pembangunan/ peningkatan infrastuktur perdesaan; dan (iii) Peningkatan peran stakeholder dan pemerintah daerah. (Sumber: 68)

Program Pengembangan Agropolitan
Pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan menyeluruh, yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, yang digerakan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. (Sumber: 52)

Program Rintisan Agropolitan
Program pengembangan agropolitan jangka pendek bersifat rintisan yang pada tahap pertama perlu diberikan stimulan, dilaksanakan dengan pendekatan action research (kaji tindak), berupa identifikasi potensi dan masalah untuk mengetahui arah pengembangan dan kebutuhan mendesak. (Sumber: 52)

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan(P2KP)
Proyek yang dimaksudkan untuk memulihkan serta memperkuat kapital social masyarakat dan kapasitas pemerintah daerah agar mampu mandiri serta berkelanjutan dalam mengangulangi berbagai persoalan kemiskinan yang ada di wilayahnya serta membangun lingkungan permukiman yang berkelanjutan, dengan berbasis pada nilai-nilai universal kemanusiaan yaitu keikhlasan, kejujuran, keadilan, dll. (Sumber: 49)

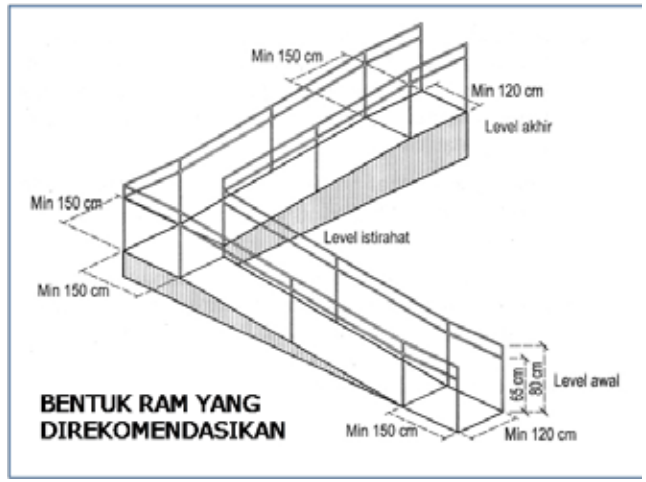

Gambar 3.06 Bentuk Ram Yang Direkomendasikan (Sumber : 11)

Purifikasi
Memurnikan kembali air limbah terhadap pengaruh pencemaran. (Sumber: 57)

R

Ram
Jalur kursi roda bagi penyandang cacat dengan kemiringan dan lebar tertentu sehingga memungkinkan akses kursi roda dengan mudah dan dilengkapi pegangan rambatan dan pencahayaan yang cukup. (Sumber: 9)

Rancang Bangun
Desain dalam bentuk gambar bangunan dan kelengkapannya untuk rumah dan prasarana sarana serta utilitas umum untuk perumahan dan permukiman secara lengkap dengan skala tetentu beserta uraiannya dan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang mampu mencakup kebutuhan dan ilmu pengetahuan serta teknologi baik pada masa pembangunannya maupun pemeliharaan atau pemugarannya. (Sumber: 52)

Rasio Lumpur Resirkulasi
Debit lumpur pengendap sekunder. (Sumber: 36)

Redefinisi
Melakukan penegasan kembali atas pola pemanfaatan struktur ruang yang telah ada. Dengan kata lain, melakukan intervensi tanpa merubah struktur ruang yang telah ada meliputi:

1. **Revitalisasi**
   Upaya menghidupkan kembali suatu kawasan mati yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki.
2. **Preservasi**
   Upaya mempertahankan suatu lingkungan permukiman dari penurunan kualitas atau kerusakan, untuk memelihara komponen yang masih berfungsi baik dan mencegah dari proses penyusutan dinii (kerusakan).
3. **Rehabilitasi**
   Upaya mengembalikan kondisi komponen fisik lingkungan permukiman yang mengalami degradasi

4. **Renovasi**
   Melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen pembentukan lingkungan permukiman. (sumber: 13)

Redevelopment
Pembangunan kembali suatu kawasan atau lingkungan pemukiman dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana dari sebagian atau seluruh kawasan atau lingkungan permukiman yang telah dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi. (Sumber: 52)

Reduce, Reuse, Recycling (3R)
Menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah. (Sumber: 17)

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan. (Sumber: 9)

Rencana Tapak
Arahan tata letak bangunan, orientasi bangunan, indikasi bentuk dan tampak bangunan secara keseluruhan dalam suatu lingkungan, dan arahan aksesibilitas, sarana parkir untuk kepentingan pengunjung/loading/service, dan lain-lainnya. (Sumber: 52)

Resettlement
Proses pemindahan penduduk untuk bertempat tinggal di tempat lain, karena tidak dapat lagi atau tidak diperbolehkan lagi berada di tempat tinggal sebelumnya. (Sumber: 52)

Resapan Efluen Air Limbah
Unit penampung air yang keluar dari tangki septik dengan diresapkan ke dalam tanah melalui media berpori seperti pasir dan kerikil dengan ukuran unit resapan tertentu sesuai dengan besaran debit. (Sumber: 62)

Reservoir
Tempat penyimpanan air untuk sementara sebelum didistribusikan kepada konsumen. (Sumber: 54)

Reservoir Distribusi
Bangunan untuk menampung air minum dari instalasi pengolahan air atau mata air sebelum didistribusikan.
(Sumber: 54)

Restrukturisasi
Penanganan permukiman dengan melakukan proses penstrukturan kembali pola ruang yang telah ada.
1. ***Renewal* (Peremajaan Kawasan)**
   Upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan permukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan baru yang lebih layak dan sesuai dengan tata ruang kota.
2. **Restorasi**
   Upaya pengembalian suatu kondisi lingkungan permukiman kepada kondisi asal sesuai dengan persyaratan lingkungan yang benar. (Sumber: 13)

Ritasi
Satuan pengangkutan sampah per satu kali angkut atau satu rit angkutan dari sumber sampai ke pembuangan akhir
(Sumber: 25)

***Rotating Biological Contactor* (RBC)**
Suatu alat untuk pengolahan air limbah yang terdiri dari piringan plastik besar yang berjarak rapat yang berputar mengelilingi tongkat horizontal. Piringan tersebut secara bergantian bergerak melalui air limbah dan udara dan mengembangkan pertumbuhan biologis pada permukaannya. (Sumber: 24)

Rumah Bertingkat
Rumah tinggal berlantai dua atau lebih, rumah susun (rusun) baik untuk golongan berpenghasilan rendah (rumah susun sederhana sewa), golongan berpenghasilan menengah (rumah susun sederhana) maupun golongan berpenghasilan atas (rumah susun mewah/apartemen). (Sumber: 28)

Rumah Deret Sederhana
Rumah deret yang terdiri lebih dari dua unit hunian tidak bertingkat yang konstruksinya sederhana dan menyatu satu sama lain. (Sumber: 9)

Rumah Inti
Unit rumah dengan satu ruang serbaguna yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh penghuni. (Sumber: 52)

Rumah Menengah
Rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling 54m^2 sampai dengan 600m^2 dan biaya pembangunan per m^2 antara harga satuan per m^2 tertinggi untuk pembangunan permukiman dinas tipe C sampai dengan harga satuan per m^2 tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas tipe A yang berlaku dan rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling antara 200m^2 sampai dengan 600m^2 dan biaya pembangunan per m2 nya lebih kecil atau sama dengan harga satuan per m^2 tertinggi untuk pembangunan permukiman dinas tipe C yang berlaku, dengan luas lantai bangunan rumah disesuaikan dengan koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang diizinkan dalam rencana tata ruang wilayah yang berlaku. (Sumber: 52)

Rumah Mewah
Rumah tidak bersusun yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling 54 m^2 sampai dengan 2.000m^2 dan biaya pembangunan per m^2 di atas biaya satuan per m^2 tertinggi untuk pembangunan pennukiman di atas tipe A yang berlaku.
(Sumber: 52)

Rumah Sangat Sederhana (RSS)
Rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan maksimum 36 m^2 dan sekurang-kurangnya memiliki kamar mandi dengan WC, dan ruang serba guna dengan biaya pembangunan per m^2 sekitar setengah dari biaya pembangunan per m2 tertinggi untuk rumah sederhana. (Sumber: 52)

Rumah Sederhana (RS)
1. Rumah tidak bersusun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 m^2, yang dibangun di atas tanah dengan luas kapling 54 m^2 sampat dengan 200 m^2 dan biaya pembangunan per m2 tidak melebihi biaya pembangunan per m^2 tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe C yang berlaku, yang meliputi rumah sederhana tipe besar, rumah sederhana tipe kecil, rumah sangat sederhana, dan kapling siap bangun. (Sumber: 63)
2. Bangunan rumah layak huni yang bagian huniannnya berada langsung di atas permukaan tanah, berupa rumah tunggal, rumah kopel dan rumah deret. Harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Luas lantai bangunan tidak lebih dari 70 m^2, yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling 54 m^2 sampai dengan 200 m^2 (Sumber: 28)

Rumah Susun
Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan juga digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapl dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. (Sumber: 1)

Rumah Susun Sederhana
Rumah susun yang dibangun berpenghasilan menengah ke bawah untuk masyarakat. (Sumber: 52)

Rumah Susun Sederhana Sewa
Rumah susun sederhana yang dikelola oleh unit pengelola yang ditunjuk oleh pemilik Rusunawa dengan status penghunian sistem sewa. (Sumber: 52)

CIPTA KARYA

S

Saluran Air Hujan (SAH)
Prasarana untuk menampung dan mengalirkan air hujan ke badan penerima (sungai). (Sumber: 41)

Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban) untuk pedesaan, sehingga air limbah tersebut dapat meresap ke dalam tanah dan tidak menjadi penyebab penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan permukiman. (Sumber: 36)

Saluran Drainase Primer
Suatu badan air yang merupakan bagian dari suatu sistem drainase utama atau drainase lokal dimana aliran utamanya menuju ke pembuangan akhir.
(Sumber: 52)

Saluran Drainase Sekunder
Suatu badan air yang merupakan bagian dari suatu sistem drainase utama atau drainase lokal dimana aliran utamanya menuju ke saluran primer. (Sumber: 52)

Saluran Drainase Tersier
Suatu badan air yang merupakan bagian dari suatu sistem drainase utama atau sistem drainase lokal dimana aliran aimya menuju ke saluran sekunder.
(Sumber: 52)

Saluran Penghubung
Saluran berupa pipa yang dipasang untuk menghubungkan tandas jongkok dengan bak kontrol serta bak kontrol dengan sumuran. (Sumber: 40)

Sambungan Rumah
Jenis sambungan pelanggan yang mensuplai airnya langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi air melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumah. (Sumber: 54)

Gambar 3.07 Saluran Drainase (Sumber : 66)

Sampah
Limbah padat yang berasal dari lingkungan permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang dianggap tidak berguna lagi. (Sumber: 8)

Sampah Anorganik
Sampah seperti kertas, kardus, kaca/ gelas, plastik, besi dan logam lainnya. (Sumber: 17)

Sampah B3 Rumah Tangga
Sampah yang berasal dan aktivitas rumah tangga, mengandung bahan dan atau bekas kemasan suatu jenis bahan berbahaya dan atau beracun, karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan manusia. (Sumber: 22)

Sampah Domestik
Sampah padat di luar sampah industri dan sampah medis. (Sumber: 25)

Sampah Industri
Sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa proses produksi maupun proses pengolahan limbah. (Sumber: 25)

Sampah Non Organik
Sampah yang tidak atau sukar membusuk terdiri dari kaleng, kaca, logam, dan plastic. (Sumber: 25)

Sampah Organik
Sampah yang mudah membusuk terdiri dari sisa sayuran dan makanan, serta sapuan halaman.
(Sumber: 25)

Sampah Organik yang dapat Dikomposkan
Sampah yang berasal dari daun-daunan, rumput, sampah dapur (sisa makanan, sisa ikan, sisa dan kulit buah), cacahan kertas, kue/roti dan jerami.
(Sumber: 26)

Sampah Pasar
Sampah organik dan anorganik yang ditimbulkan oleh aktifitas pasar.
(Sumber: 25)

Sampah Perkotaan
Sampah non B2 (sampah berbahaya) dan non B3 (bahan berbahaya beracun) yang berasal dari :
- Perumahan,
- Kantor, sekolah, rumah sakit dan sejenisnya, gedung-gedung umum lainnya,
- Pasar, pertokoan, bioskop, restoran dll,
- Pabrik/industri,
- Penyapuan jalan, taman, lapangan,
- Pemotongan hewan, kandang hewan,
- Pongkaran bangunan,
- Instalasi pengolahan sampah.
  (Sumber: 16)

Sampah Rumah Tangga
Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(Sumber: 5)

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(Sumber: 5)

Sampah Spesifik
Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi:
- sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- sampah yang timbul akibat bencana;
- puing bongkaran bangunan;
- sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- sampah yang timbul secara tidak periodik. (Sumber: 5)

Sanitary Landfill
Metode pembuangan akhir sampah secara sanitair, sampah ditimbun dipadatkan dan diberi lapisan penutup secara rutin. (Sumber: 52)

Sanitasi oleh masyarakat (SANIMAS)
Merupakan konsep penyelenggaraan sanitasi/air limbah domestik yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melalui perencanaan, pemilihan teknologi, pembangunan, operasional dan pemeliharaan oleh masyarakat itu sendiri. (Sumber: 58)

Sarana Lingkungan
Fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya (Sumber: 37)

Saringan Air Rumah Tangga (SARUT)
Prasarana untuk mengolah air tanah atau air permukaan yang mempunyai kualitas sesuai dengan kriteria tertentu atau menjadi air bersih. (Sumber: 46)

Saringan Pasir Cepat (SPC)
Unit pengolah air yang menggunakan suatu proses penyaringan pengendapan dan pemisahan partikel-partikel yang cukup besar dengan pengaliran cepat, biasanya menggunakan media pasir. (Sumber: 54)

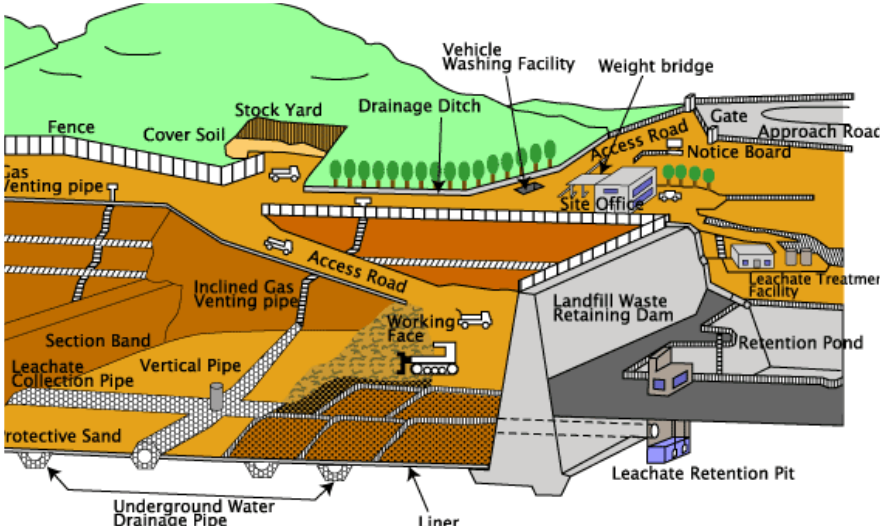

Gambar 3.08 Sanitary Landfill (Sumber : 67)

Saringan Pasir Lambat (SPL)
Unit pengolah air yang menggunakan suatu proses penyaringan, pengendapan dan pemisahan partikel-partikel yang cukup besar dengan pengaliran air yang lambat dengan menggunakan media pasir. (Sumber: 54)

Satuan Lingkungan Permukiman
Kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
(Sumber: 2)

Satuan Lingkungan Rumah Susun
Kelompok rumah susun yang terletak pada tanah bersama sebagai suatu lingkungan yang merupakan satu kesatuan sistem pelayanan dan pengelolaan.
(Sumber: 52)

Satuan Rumah Susun
Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam kegiatan-kegiatan yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dllengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. (Sumber: 52)

Satuan Rumah Susun Sederhana
Satuan rumah susun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 45 m2 dan biaya pembangunan per m2 tidak melebihi dari harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah klas C yang berlaku.
(Sumber: 52)

Satuan Rumah Susun Sederhana
Satuan pada rumah susun sederhana sewa yang dapat dipergunakan secara perorangan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum bersama. (Sumber: 52)

Satuan Rumah Susun Menengah
Satuan rumah susun dengan luas lantai 18 m2 sampai 100 m2 dan biaya pembangunan per m2 antara harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah kelas C sampai dengan harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah klas A yang berlaku. (Sumber: 52)

Satuan Rumah Susun Mewah
Satuan rumah susun dengan biaya pembangunan per m2 di atas harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah klas A yang berlaku dengan luas lantai bangunan lebih dari 100 m2. (Sumber: 52)

Scum
Padatan yang mengapung di bak tangki septik, umumnya berupa minyak dan lemak. (Sumber: 61)

Secure Tenure
1. Rumah tangga yang memiliki atau menyewa rumah baik secara pribadi maupun kelompok (Sumber: 38)
2. Hak penggunaan unit hunian yang terjamin dari ancaman penggusuran paksa (Sumber: 69)

Sedimentasi
Proses pemisahan padatan dan air berdasarkan perbedaan berat jenis dengan cara pengendapan.
(sumber 19)

Selimut Beton (*Bedding)*
Struktur Beton yang menyelimuti batangan besi tulangan yang ditanam untuk tujuan perlindungan atau penyokongan.
(Sumber: 57)

Septik
Kondisi suatu sistem dimana jumlah oksigen sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. (Sumber: 63)

Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Sertifikat yang diterbitkan oIeh Pemerintah Daerah untuk kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara teknis maupun administratif, dengan periode waktu untuk SLF adalah 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, serta berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya. (Sumber: 59)

Sewerage
Jaringan perpipaan untuk menyalurkan air limbah dengan dilengkapi instalasi pengolahan.
(Sumber: 57)

***Sewerage* Konvensional**
Sistem Pengolahan air limbah yang terdiri atas sambungan rumah, jaringan pipa pengumpul, pipa pembawa, stasiun pompa, dan instalasi pengolah air limbah yang dipusatkan pada satu atau beberapa lokasi di suatu kota. Sistem ini menganut metode *"self cleansing"* sehingga membutuhkan kemiringan saluran yang memadai.
(Sumber: 57)

Shallow Sewer
1. Merupakan sistem pengolahan air limbah denan investasi rendah, dan luas areal pelayanan terbatas. Sistem ini tidak menggunakan manhole sebagai lubang kontrol tetapi bak inspeksi. Sistem ini memerlukan partisipasi masyarakat langsung untuk secara rutin menggelontor, karena kemiringan pipa tidak memadai untuk self cleansing. (Sumber: 57)
2. Suatu sistem perpipaan air limbah domestik yang dipasang secara dangkal, kemiringan yang lebih landai dibandingkan dengan sistem sewerage konvensional.
(Sumber: 52)

Sistem Drainase
1. Bagian dari sistem plambing yang menyalurkan air hujan termasuk diantaranya adalah pipa air hujan dan pipa air tanah (Sumber: 15)
2. Sistem pengeringan dan pembuangan air hujan (Sumber: 33)

Sistem Drainase Gabungan
Sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang sama, baik untuk air permukaan maupun air limbah yang telah diolah.
(Sumber: 14)

Sistem Drainase Lokal
Suatu sistem jaringan drainase yang berfungsl sebagal pematus bagi suatu daerah/area tertentu yang merupakan bagian dari suatu kota, misalnya kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersil, perkantoran, atau kawasan-kawasan tertentu dari suatu kota, dimana pengurusan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pengelola atau pemilik dari kawasan tertentu tersebut.
(Sumber: 52)

Gambar 3.09 Sistem Drainase Lokal (Sumber : 66)

Sistem Drainase Terpisah
Sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang terpisah untuk limpasan air permukaan dengan air limbah. (Sumber: 14)

Sistem Drainase Utama
Suatu sistem jaringan drainase yang berfungsi sebagai pematus untuk suatu wilayah perkotaan, yang pengurusan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten atau Pemerintah Provinsi. Sistem drainase utama mengumpulkan dan mengeluarkan air dari sistem drainase lokal.
(Sumber: 52)

Sistem Gravitasi
Pendistribusian air tanpa menggunakan pompa, hanya memanfaatkan perbedaan tinggi. (Sumber: 57)

Sistem Interceptor
Suatu sistem perpipaan air limbah yang mempunyai bangunan-bangunan penyadap (interceptor) air limbah dari saluran drainase yang juga terpaksa menampung air limbah.
(Sumber: 52)

Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat (*On Site System*)
Sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara individual (perorangan) melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat. (Sumber: 8)

Sistem Pembuangan Air Limbah Terpusat (*Off Site System*)
Sistem pembuangan air limbah dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat. (Sumber: 8)

Sistem Penahan Gempa
Bagian dari sistem struktur gedung yang berfungsi menahan gempa.(Sumber: 52)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. (Sumber: 8)

Sistem Transmisi
Sistem perpipaan yang digunakan untuk mengalirkan air baku dari sumber air baku ke sumber pengolahan; dan atau mengalirkan air bersih dari unit pengolahan ke unit jaringan distribusi melalui reservoir. (Sumber: 57)

Sistem Ventilasi
Bagian dari sistem plambing yang terdiri dan pipa yang dipasang untuk sirkuasi udara ke seluruh bagian dari sistem pembuangan dan mencegah terjadinya kerja sifon dan tekanan balik pada perangkap. (Sumber: 15)

Sites and Services
Serviced land yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan baru. (Sumber: 52)

Sludge
Lumpur atau materi yang tidak larut yang selalu tampak kehadirannya dalam setiap pengolahan; umumnya tersusun oleh serat-serat organik yang kaya akan selulosa dan di dalamnya terhimpun kehidupan mikroorganisme.
(Sumber: 57)

Sludge Drying Bed
Bangunan untuk penampungan lumpur yang akan diproses secara alamiah dengan pengeringan menggunakan sinar matahari. (Sumber: 57)

Sludge Pump
Pompa yang digunakan untuk mengangkat material yang tidak terlarut pada bak penampung lumpur. (Sumber: 57)

Sluice Gate
Alat yang berfungsi untuk menutup ataupun memperbesar aliran air yang akan dimasukkan ke dalam bak pengendap/ penampung. (Sumber: 57)

Small Bore Sewer
Saluran air limbah dengan diameter kecil untuk menerima limbah cair buangan tangki septik yang bebas benda padat. (Sumber: 24)

Sprinkler
Suatu sistem pemancar air pada sistem pemadam kebakaran yang bekerja secara otomatis bilamana suhu ruang mencapai suhu tertentu. (Sumber: 52)

Standar Kualitas Air
Syarat-syarat maksimum – toleransi – minimum mengenai kemurnian air (Sumber: 44)

Standar Teknis Bangunan Gedung
1. Standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar intemasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung. (Sumber: 29)
2. Tidak melebihi tingkat spesifik dari natrium bikarbonat, pH, garam-garam terlarut total dan sebagainya. (Sumber: 57)

Stand Meter
Angka pemakaian yang tertera pada meter air pelanggan. (Sumber: 57)

Struktur Bangunan Gedung
Bagian dari bangunan yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerja sarna secara satu kesatuan, sehingga mampu berfungsi menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap segala macam beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut, gempa,angin kencang, tsunami, dan sebagainya. (Sumber: 29)

Sumur Artesis (*Artesian Well*)
Sumber air yang mempunyai potensi tekanan hidrolis yang cukup untuk dapat mendorong airnya ke permukaan bumi. Potensi tekanan tersebut berasal dari beban lapisan-lapisan tanah di atasnya. (Sumber: 57)

Sumur Kebakaran
Sumur-sumur gali yang disediakan khusus untuk pemadam kebakaran. (Sumber: 52)

Sumur Resapan
Sumuran berdinding rembes air untuk meresapkan air limbah ke dalam lapisan tanah dalam. (Sumber: 57)

Sumur Resapan Air Hujan (SRAH)
Prasarana untuk menampung dan meresapkan air hujan kedalam tanah. (Sumber: 41)

Sumur Bor
Bangunan pemanfaatan air tanah dalam yang diperoleh dari hasil pengeboran. (Sumber: 54)

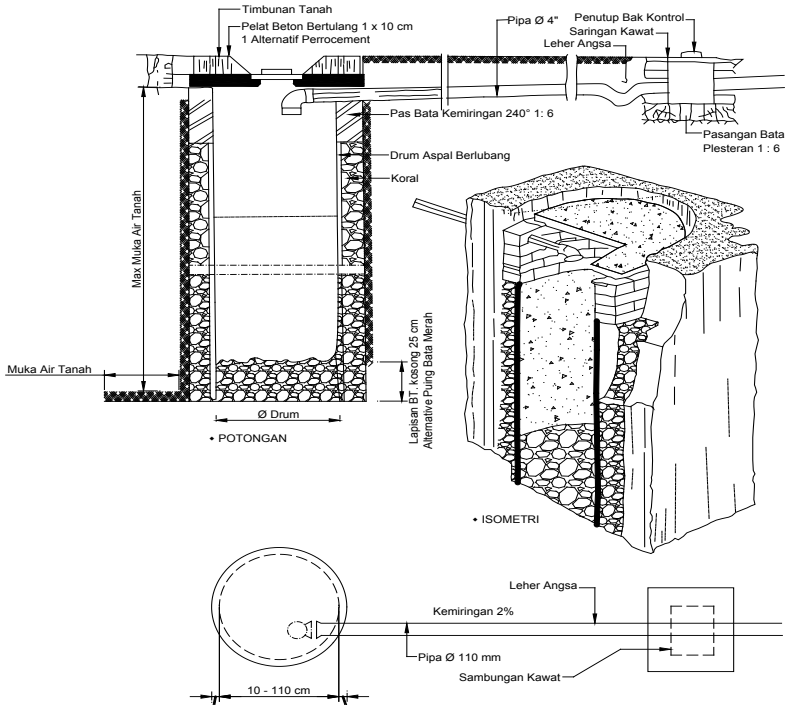

Gambar 3.10 Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) (Sumber : 66)

Sumur Gali (SGL)
Penyediaan air bersih dengan cara penggalian tanah untuk mendapatkan sumber air dan pengambilannya dengan menggunakan timba. (Sumber: 54)

Sumur Pengumpul (*Sump Well*)
Sumur pengumpul/penampung sementara air baku dari sumber sebelum dipompakan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA). (Sumber: 54)

Sumur Pompa Tangan (SPT)
Penyediaan air bersih yang pengambilan airnya dengan menggunakan pompa tangan. (Sumber: 54)

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)
Surat yang dikeluarkan oleh Pemda sebagai bukti telah di laksanakan pendataan bangunan gedung yang menunjukan status kepemilikan bangunan gedung tersebut. (Sumber: 59)

T

Tangga
Fasilitas pergerakan vertikal yang aman bagi penyandang cacat dan lanjut usia. (Sumber: 9)

Tangga Kebakaran
Tangga yang direncanakan khusus untuk penyelamatan kebakaran. (Sumber: 52)

Tangki Biofilter
Tangki pengolahan air limbah rumah tangga dengan menggunakan media kontaktor. (Sumber: 48)

Tangki *Imhoff*
1. Bangunan konstruksi dari beton bertulang kedap air berfungsi untuk menurunkan kebutuhan oksigen biokimia dan suspended solid, serta pembusukan dari lumpur yang terendapkan dari efluen lumpur tinja bak pengumpul. (Sumber: 33)
2. Unit pengolahan primer yang dipakai pada sistem kolam. Di dalam tangki imhoff terjadi proses pengendapan dan pencemaan secara anaerobik, melalui zona sedimentasi, zona netral dan zona lumpur. (Sumber: 34)

Tangki Septik
Tangki pengolah yang terbuat dari bahan yang rapat air berfungsi sebagai bak pengendap limbah yang ditujukan untuk menampung kotoran padat untuk melakukan pengolahan secara biologis oleh bakteri dalam waktu tertentu. (Sumber: 52)

Tempat Penampungan Sampah Sementara/Transfer Depo
Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dapat dipindahkan secara langsung.
(Sumber: 17)

Tempat Penampungan Sementara
Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
(Sumber: 5)

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
(Sumber: 5)

Tempat Pemrosesan Akhir
Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. (Sumber: 5)

Terminal *Clean-out*
Suatu bangunan pelengkap yang berfungsi sebagai lubang tempat penyisipan alat permbersih ke dalam saluran dan pipa tempat penggelontoran saluran, yaitu dengan memasukkan air dari ujung bagian atas terminal cleanout.
(Sumber: 24)

Tetenger (Tenser)
Suatu tanda,ciri, atau sesuatu yang memberikan informasi tentang suatu objek. Informasi tersebut diperoleh melalui salah satu indera manusia (biasanya indera visual). (Sumber: 52)

Tim Ahli Bangunan Gedung
Tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. (Sumber: 9)

Tinggi Bangunan
Jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan. (Sumber: 52)

Tinggi Jagaan
Ketinggian yang diukur dari permukaan air maksimum sampai permukaan tanggul saluran. (Sumber: 31)

Tingkat Ketahanan Api (TKA)
Tingkat ketahanan api yang dipersyaratakan pede bagian atau komponen bangunan dalam ukuran waktu satuan menit, dengan kritelia-kriteria berurut yaitu aspek ketahanan struktural, integritas, dan insulasi. Contoh: TKA 9O/-Hi) berarti hanya terdapat persyaratan TKA untuk ketahanan struktural 90 menit dan insulasi 60 menit. (Sumber: 52)

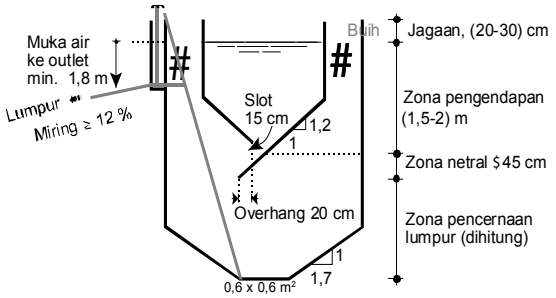

KRITERIA DESAIN TANGKI IMHOFF

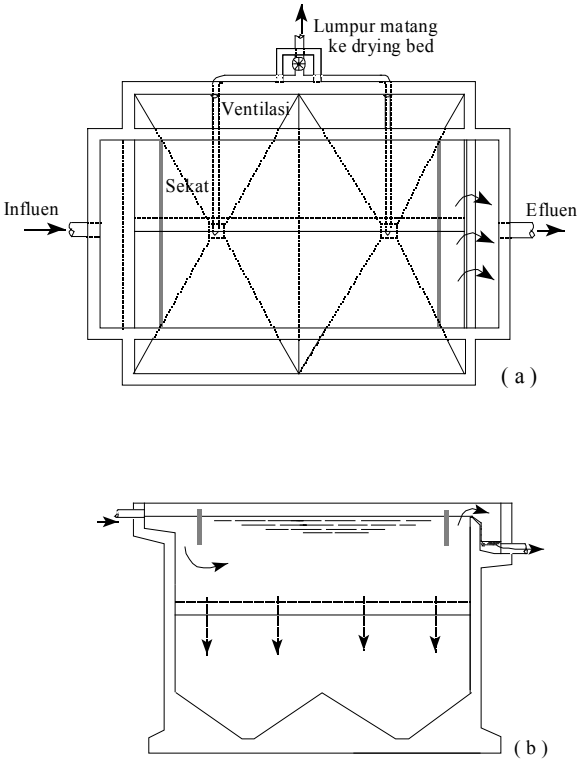

Gambar : IMHOFF TANK
(a). Denah (b). Pot. memanjang

Gambar 3.11 Tangki Imhoof (Sumber : 66)

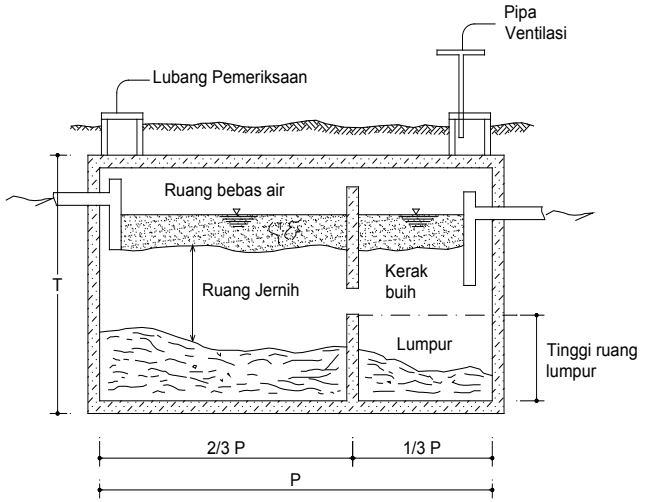

Gambar 3.12 Tangki Septik Konvensional (Sumber : 66)

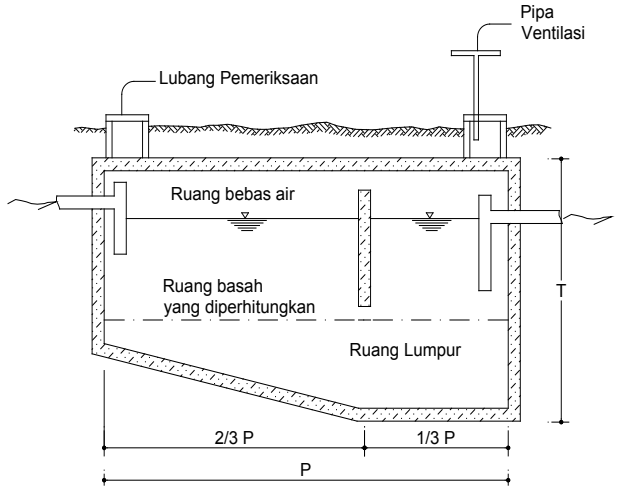

Gambar 3.13 Modifikasi Tangki Septik (Sumber : 66)

CIPTA KARYA
CIPTA KARYA

Titik Pelepas (*Outfall)*
Titik akhir sistem drainase sebagai tempat keluarnya air dari saluran-saluran ke sungai, laut atau badan air lainnya. (Sumber: 30)

Tinja
Buangan padat manusia yang terikut dalam limbah domestik. (Sumber: 61)

Toilet
Bangunan untuk membuang air besar yang umumnya terdiri dari WC sentir dan bak air. (Sumber: 62)

Tridaya
Pendekatan pembangunan permukiman dengan tiga sasaran pemberdayaan sebagai satu kesatuan upaya, yaitu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan kegiatan usaha. (Sumber: 68)

Trickling Filter
Proses pengolahan air limbah film tetap dan aerobik dimana bahan organik yang terkandung pada air limbah diurai sewaktu didistribusikan melalui lapisan saringan biologis. (Sumber: 24)

Truk Tangki Tinja
Truk yang berfungsi untuk menguras lumpur tinja dan membuangnya ke unit pengolahan lumpur tinja. (Sumber:61)

U

Uji Perkolasi
Suatu percobaan kecepatan peresapan air ke dalam tanah (Sumber: 23)

Umur Bangunan
Jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara umur bangunan diperhitungkan 50 tahun untuk bangunan gedung, dan 20 tahun untuk bangunan rumah. (Sumber: 52)

Underflow
Aliran endapan lumpur dari bawah unit pengolahan air limbah atau lumpur tinja ke unit pengolahan selanjutnya. (Sumber: 64)

Unit Air Baku
Sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. (Sumber: 8)

Unit Distribusi (Air Minum)
Satu sistem pelayanan yang merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum dalam suatu sistem pelayanan air minum. (Sumber: 54)

Unit Produksi
Prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi. (Sumber: 8)
Suatu bagian dari sistem air yang berfungsi memproduksi air untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan (kuantitas dan kualitasnya), adapun unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukurandan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum, pengambilan air baku, saluran air baku, bangunan pengolahan, bangunan elektrikal mekanikal, saluran air minum, reservoir. (Sumber: 54)

Unit Pelayanan
Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah (SR), hidran umum (HU), dan hidran kebakaran. Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air. (Sumber: 8)

Unit Pengelolaan
Terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan non teknis. Pengelolaan teknis terdiri dari kegoatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi, Pengelolaan non teknis terdiri dari administrasi dan pelayanan. (Sumber: 8)

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawan usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Sumber: 6)

Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)
Salah satu pengolahan air limbah anaerobik yang terdiri dari peralatan sederhana dan memerlukan energi relative tinggi. Dalam proses ini, air limbah dimasukkan ke dasar reactor dan mengalir keatas melalui selimut sludge terdiri dari partikel atau butiran yang terbentuk secara biologis. Pengolahan terjadi saat air limbah menyentuh butiran gas tersebut. Gas yang dihasilkan dalam kondisi anaerobic menyebabkan sirkulasi internal, yang membantu pembentukkan dan pemeliharaan butiran biologis. Untuk menjaga agar selimut tetap tersuspensi, kecepatan aliran ke atas diatur pada range 0.6-0.9 m/det. (Sumber: 24)

***Urban Sector Development Reform Project* (USDRP)**
Program yang disiapkan pemerintah Indonesia (GOI) bekerjasama dengan Bank Dunia untuk mewujudkan kemandirian daerah dan pembaharuan dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan yang layak huni, berkeadilan, sosial, berbudaya, produktif, dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung keseimbangan pengembangan wilayah. (Sumber: 68)

Umur Lumpur
Massa MLSS (kg) dalam tangki aerasi per unit massa (kg/hari) dari zat padat tersuspensi yang mengalir ke dalam pengolahan lumpur aktif. (Sumber: 20)

Utilitas
Perlengkapan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan gedung yang digunakan untuk menunjang fungsi bangunan gedung dan tercapainya keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan di dalam bangunan gedung. (Sumber: 29)

Utilitas Umum
Fasilitas umum seperti PUSKESMAS, taman kanak-kanak, tempat bermain, pas polisi yang pada umumnya diperlukan sebagai sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. (Sumber: 2)

V

Valve
Katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran dalam pipa. (Sumber: 21)

Vent
1. Pipa yang berfungsi untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan dari proses penguraian bakteri anaerobik pada tangki septik atau pada pipa saluran buangan air limbah. (Sumber: 63)
2. Pipa yang berfungsi untuk menghasilkan sirkulasi udara segar dalam reservoir. (Sumber: 44)

Ventilasi Udara
Lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan gas yang terakumulasi dalam pipa untuk menyesuaikan tekanan udara dalam saluran atau manhole menjadi sama dengan tekanan udara luar. (Sumber: 24)

Volume Total Aliran
Jumlah volume air yang ditampung dan atau disalurkan dalam waktu tertentu. (Sumber: 14)

W

Waktu Detensi
Waktu tinggal air atau air limbah dalam unit pengolahan. (Sumber: 44)

Waktu Konsentrasi
Waktu yang diperlukan oleh titik air hujan yang jatuh pada permukaan tanah dan mengalir sampai di suatu titik di saluran drainase yang terdekat. (Sumber: 31)

Waktu Pengaliran Permukaan
Waktu yang diperlukan oleh titik air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dan mengalir ke titik saluran drainase yang diamati. (Sumber: 31)

Water Meter
Alat untuk mengukur banyaknya air yang mengalir melalui pipa pada titik dan waktu tertentu. (Sumber: 54)

Wilayah Pelayanan
Wilayah yang layak medapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan palayanan sesuai dengan periode perencanaan.
(Sumber: 44)

Z

Zona Air Minum (ZAM)/Zona Air Minum Prima (ZAMP)
Zona khusus sebagai pilot proyek yang ditetapkan PDAM, untuk layanan air siap diminum. Salah satunya dengan mengadakan beberapa Kran Air Siap Minum (KASM). (Sumber: 50)

SUMBER:

1. UU No. 16/1985 Tentang Rumah Susun
2. UU No. 4/1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
3. UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. UU No. 28/2002 Tentang Bangunan Gedung
5. UU No. 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah
6. PP 27/99 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
7. PP No. 82/2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
8. PP No. 16/2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan SPAM
9. PP No. 36/2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
10. Permen PU No.: 29/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
11. Permen PU No. : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
12. Kepmen PU 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan
13. Kepmen Kimpraswil No 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Perumahan dan Permukiman (KSNPP)
14. SNI Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan (SNI 02-2406-1991)
15. SNI Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum (SNI 03-2399-1991)
16. SNI Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (COPY SNI 03 - 3241 - 1994)
17. SNI Pengelolaan Sampah di Permukiman (Revisi SNI 03-3242-1994)
18. SNI Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap Bau (SNI 03-6379-2000)
19. SNI Tata cara Commissioning Instalasi Pengolahan Air
20. SNI Metode Pengujian Kinerja Pengolah Lumpur Aktif (SNI 19-6447-2000)
21. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
22. Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan (SNI 19 - 2454 - 2002)
23. SNI Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan (Copy SNI 03 - 2398 - 2002)
24. Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, Departemen Kimpraswil, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, 2003
25. Pedoman Pengelolaan Persampahan Perkotaan Bagi Pelaksana, Dep Kimpraswil, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, 2003
26. Pedoman Tata Cara Pemasangan dan Pengoperasian Komposter Rumah Tangga Individual Dan Komunal (Pd-T-15-2003)
27. Pedoman Spesifikasi Sarana Umum Mandi Kakus Prefab (PD-S-02-2004-C)
28. Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, 2006
29. Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Permen PU 25/PRT/M/2007)
30. Petunjuk Teknis Pemasyarakatan Produk Teknologi Air Bersih dan PLP Melalui UKM (Pt-T-02-2003)
31. Petunjuk Teknis Tata Cara Pembuatan Rencana Induk Drainase Perkotaan (CT/Dr/Re-TC/001/98)
32. Petunjuk Teknis Tata Cara Perencanaan IPLT Sistem Kolam (CT/AL/RE-TC/001/98)
33. Petunjuk Teknis, Tata Cara Pembangunan IPLT Sistem Kolam (CT/AL/BA-TC/002/98)
34. Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian IPLT Sistem Kolam (CT/AL/OP-TC/003/98)
35. Petunjuk Teknis Tata Cara Pembangunan UDPK (CT/S/Ba-TC/002/98)
36. Petunjuk Teknis Tata Cara Pembuatan Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) (CT/AL-D/BA-TC/005/98)
37. PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri
38. UN Habitat 2003. Guide to Monitoring Target 11
39. Petunjuk Teknis Spesifikasi Cubluk Kembar (PT-S-09-2000-C)
40. Petunjuk Teknis Tata Cara Perencanaan Cubluk Kembar (PT-T-19-2000-C)
41. Petunjuk Teknis Penerapan Drainase Berwawasan Lingkungan di Kawasan Permukiman (Pt-T-15-2002-C)
42. Petunjuk Teknis Tata Cara Pengelolaan Air Limbah Non Kakus (Grey Water) (PT T-16-2002-C)
43. Petunjuk Teknis Perencanaan Sarana Air Bersih dn PLP di Pondok Pesantren (Pt-T-18-2002-C)
44. Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
45. Petunjuk Teknis Perencanaan Saluran Air Hujan Pracetak Berlubang untuk Lingkungan Permukiman (No. Pt-T-01-2003-C)
46. Petunjuk Teknis Pemasyarakatan Produk Teknologi Air Bersih dan PLP melalui UKM (Pt-T-02-2003)
47. Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan, 2003
48. Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Tangki Biofilter Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga dengan Tangki Biofilter (Pd-T-04-2005-C)
49. Ringkasan Eksekutif Pedoman Umum P2KP, 2003
50. Buku Pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum 2006
51. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS, 2006
52. Glossary Perkim 2002
53. www.pu.go.id
54. http://ciptakarya.pu.go.id/_pam/Istilah/Istilah.htm
55. www.pnpm-mandiri.org
56. www.nussp.com
57. Digital Library AMPL (www.ampl.or.id)
58. Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
59. Draft Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung, 2006
60. Draft Pedoman Teknis Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung, 2006
61. Draft Petunjuk Teknis Tata Cara Operasi dan Pemeliharaan Truk Tinja
62. Draft Petunjuk Teknis Prosedur Standar Sistem Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas MCK
63. Draft Prosedur Standar Sistem Operasi dan Pemeliharaan Tangki Septik
64. Draft Prosedur Standar Sistim Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
65. Corbell, Jean Claude dan Ariane Archambault, The Visual Dictionary With Definitions, QA International, Canada, 2007
66. Tata Cara Perencanaan Prasarana / Sarana Pengembangan Lingkungan Permukiman
67. Kementrian Lingkungan Hidup
68. Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
69. Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi : Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia Tahun 2005

CIPTA KARYA

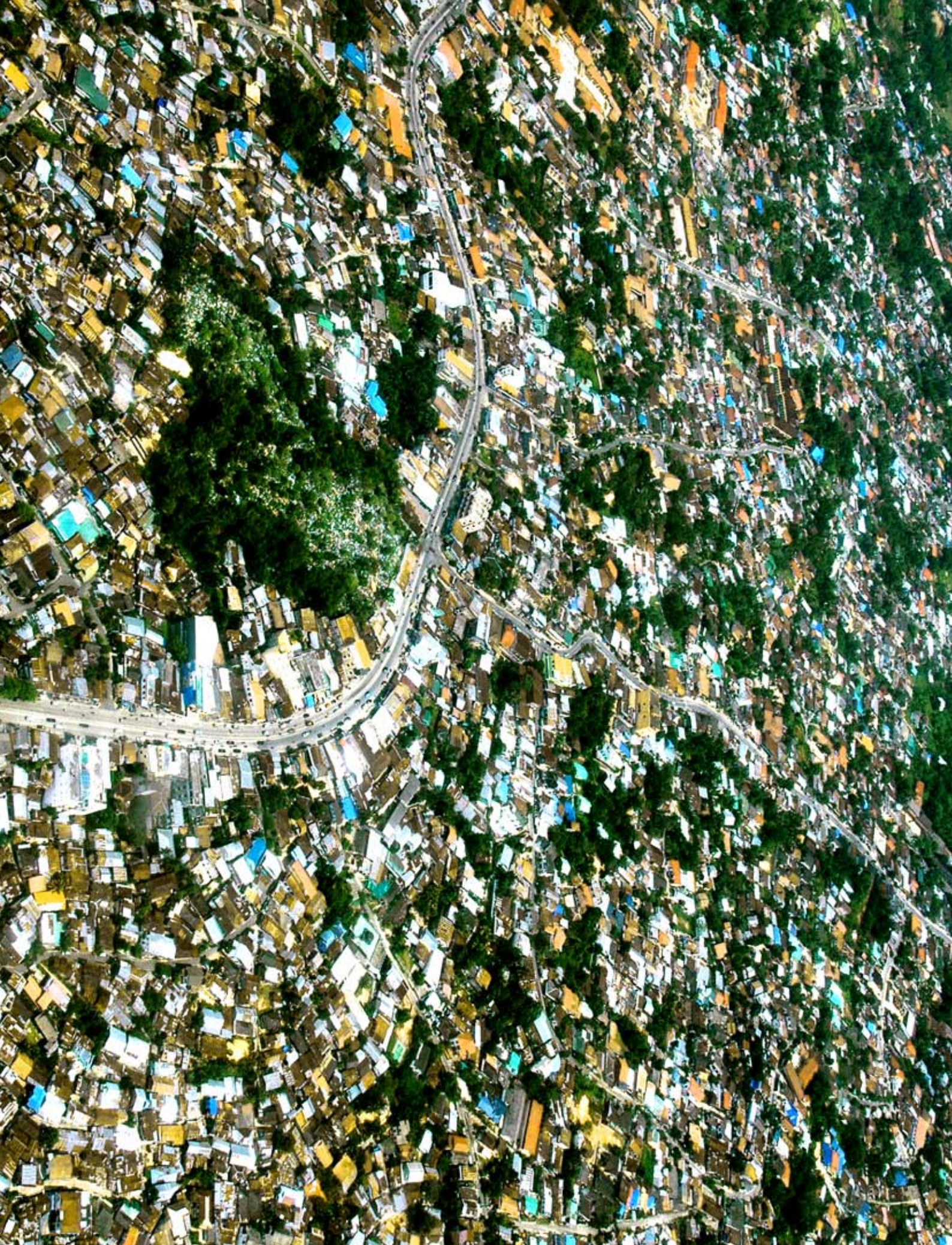

PENATAAN RUANG

A

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara menerus,cepat dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, meliputi :

- ALKI I melintasi Laut Cina Selatan – Selat Karimata – Laut Jawa – Selat Sunda
- ALKI II melintasi Laut Sulawesi – Selat Makasar – Laut Flores – Selat Lombok
- ALKI III melintasi Samudera Pasifik – Selat Maluku – Laut Seram – Laut Banda
  (Sumber: 11)

Amenitas
Bangunan atau jasa, berfungsi untuk memberikan kemudahan; hal ini menyangkut aspek lingkungan perkotaan, mis penampilan bagian kota yang estetis, menyenangkan dan memberikan kenyamanan yang ditawarkan oleh lingkungan perkotaan. (Sumber: 23)

Amplop Ruang
Merupakan salah satu ketentuan dalam pemanfaatan ruang yang meliputi ketentuan mengenai Koefisien Dasar Ruang Hijau, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Garis Sempadan Bangunan. (Sumber: 11)

B

Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
Badan yang bertugas untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan di KAPET. (Sumber: 14)

Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
Badan yang bertugas melakukan pengelolaan KAPET. Badan Pengelola KAPET diketuai oleh Gubernur dari wilayah tempat KAPET yang bersangkutan. (Sumber: 14)

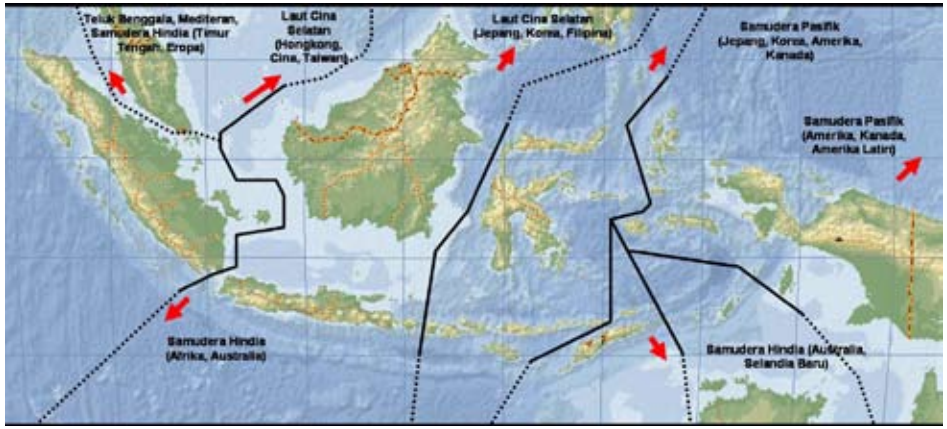

Gambar 4.01 Alur Laut Kepulauan Indonesia

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
Lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber: 15)

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Badan yang bersifat ad-hoc di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. (Sumber: 18)

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKTRN)
Badan yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional untuk mengkoordinasikan penanganan masalah penataan ruang dan pembinaan serta pengembangan kebijakan tata ruang. (Sumber: 18)

D

Daya Dukung Lingkungan
Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. (Sumber: 11)

Daya Tampung Lingkungan
Kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. (Sumber: 11)

E

Elemen Lansekap
Segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna, dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Elemen lansekap yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu benda hidup (tanaman) dan benda mati (tanah, pasir, batu, dan elemen-elemen lainnya yang berbentuk padat maupun cair) (Sumber: 20).

F

Foto Udara
Foto dari bagian permukaan bumi yang diambil dari udara; pembuatannya menggunakan kamera yang dipasang pada pesawat udara yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknik tertentu untuk dipergunakan bagi pembuatan peta-peta pendaftaran tanah.
(Sumber: 23)

G

Garis Sempadan
Garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas. (Sumber: 20)

Gentrifikasi
Perubahan stratifikasi sosial; stratifikasi penduduk kota tingkat bawah dari kawasan kumuh di daerah tengah kota yang kemudian menjadi permukiman mewah lengkap dengan segala fasilitas kehidupan bagi golongan yang mapan, kaum eksekutif profesional, ekonomi kuat, dsb. (Sumber: 23)

Grey Infrastructure
Merupakan istilah yang digunakan untuk infrastruktur terbangun, seperti jalan, saluran limbah, jaringan air minum, dll. (Sumber: 25)

H

Hak Sewa
Hak atas tanah milik orang lain yang diperoleh berdasarkan perjanjian untuk

keperluan bangunan selama jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa; hak untuk menikmati barang milik orang lain selama jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar uang sewa dan memelihara dengan sebaik-baiknya. (Sumber: 25)

Hak Ulayat
Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahirian dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
(Sumber: 19)

Hutan Kota
Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. (Sumber: 20)

I

Indeks Konservasi Alami
Parameter yang menunjukkan kondisi hidrologis ideal untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kemiringan, ketinggian dan guna lahan. (Sumber: 13)

Indeks Konservasi Aktual
Parameter yang menunjukkan kondisi hidrologis yang ada untuk konservasi yang dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kemiringan, ketinggian dan guna lahan.
(Sumber: 13)

Infrastruktur Hijau (*Green Infrastructure*)
Merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk:
- Merubah cara pandang bahwa ruang terbuka hijau adalah komponen yang sama atau jauh lebih penting bagi pengembangan kota atau wilayah, sebagaimana infrastruktur terbangun lainnya seperti infrastruktur jalan, saluran air limbah, jaringan air minum, listrik dsb.
- Penegasan bahwa ruang terbuka hijau sebagai infrastruktur seyogyanya menjadi titik tolak dalam menyusun rencana tata ruang, yakni melalui penetapan lebih awal lokasi area atau kawasan yang perlu dilindungi sebelum menetapkan lokasi pengembangan area terbangun atau pembangunan infrastruktur. (Sumber: 26)

Izin Pemanfaatan Ruang
Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sumber: 4)

J

Jalur Hijau
Daerah hijau sekitar lingkungan permukiman atau sekitar kota-kota; bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunannya, mencegah dua kota atau lebih menyatu, mempertahankan daerah hijau, rekreasi, ataupun daerah reapan hujan; di daerah ini tidak diperbolehkan ada bangunan apapun. (Sumber: 23)

Jalur Sepeda
Jalur khusus untuk lintasan sepeda, yang dibuat sepanjang jalan-jalan dalam kota atau sepanjang jalan pejalan kaki dalam suatu lingkungan perumahan; lebarnya antara 1,80 - 2,75 m (tergantung dari situasi kepadatan lingkungan).
(Sumber: 23)

K

Kampung
Kelompok rumah yang menempati wilayah tertentu dan merupakan bagian dari kecamatan. (Sumber: 23)

Kaveling Tanah Matang
Sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan. (Sumber: 8)

Kawasan
Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. (Sumber: 4)

Kawasan Agropolitan
Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Kawasan ini disebut juga sebagai embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian,kegiatan penunjang pertanian dan kegiatan pengolahan produk pertanian. (Sumber: 4)

Kawasan Andalan
Bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. (Sumber: 11)

Kawasan Berikat/*Bonded Zone*
Daerah pabean atau perindustrian khusus; berfungsi sebagai tempat pengolahan barang untuk tujuan eksport, terbatas di wilayah pabean tertentu yang di dalamnya berlaku ketentuan khusus di bidang kepabeanan. (Sumber: 23)

Kawasan Budi Daya
Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. (Sumber: 4)

Kawasan Cagar Budaya
Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentuk geologi alami yang khas yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. (Sumber: 13)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau *Special Economic Zone* (SEZ)
Wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal dari peraturan ekonomi yang berlaku di suatu negara. KEK memiliki jenis wilayah yang lebih khusus mencakup Daerah Perdagangan Bebas - Free Trade Zones (FTZ), Daerah Penanganan Expor – Export Processing Zones (EPZ), Daerah Bebas – Free Zones (Fz), Kawasan Industri Industrial Estates (IE), Pelabuhan Bebas - Free Ports, dan sebagainya.
(Sumber: 26)

Kawasan Hutan Lindung
Kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. (Sumber: 13)

Kawasan Jabodetabekpunjur
Kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten.
(Sumber: 13)

Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Kawasan KESR)
Merupakan kawasan-kawasan yang memiliki potensi sumberdaya unggulan dan secara geografis berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga yang sedang melaksanakan proses integrasi ekonomi dan sebagai zona investasi yang berorientasi keluar, bergeser dari keunggulan komparatif (comparative advantage) menuju keunggulan kompetitif (competitive advantage) sub regional, dengan tujuan menciptakan perdagangan (trade creation) serta secara bilateral/ multilateral sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama ekonomi sub regional.
(Sumber: 26)

Kawasan Lindung
Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. (Sumber: 4)

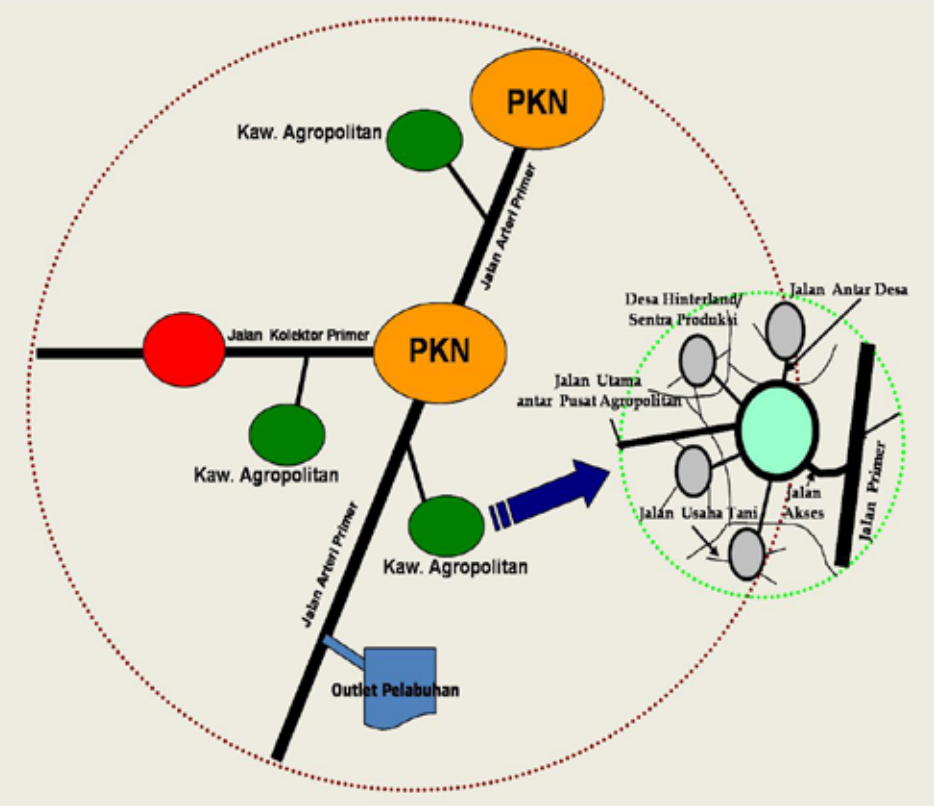

Gambar 4.02 Sistem Wilayah Pada Kawasan Agropolitan

Kawasan Megapolitan
Kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. (Sumber: 4)

Kawasan Metropolitan
Dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, kawasan metropolitan merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan kriteria (i) memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa; (ii) terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan (iii) terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan. Sebagai contoh misalnya Kawasan Metropolitan Jakarta. (Sumber: 11)

Kawasan Pantai Hutan Bakau
Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. (Sumber: 13)

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
Wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan:
a. Memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau
b. Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau
c. Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar

KAPET meliputi beberapa Kawasan, antara lain:
1. Sanggau (Kalbar)
2. Batulicin (Kalsel)
3. Kakab (Kalteng)
4. Sasamba (Kaltim)
5. Manado – Bitung (Sulut)
6. Batui (Sulteng)
7. Pare-pare (Sulsel)
8. Bukari (Sultra)
9. Seram (Maluku)
10. Biak (Papua)
11. Bima (NTB)
12. Mbay (NTT)
13. Sabang (N. Aceh Darussalam)
(Sumber: 14)

Kawasan Pelestarian Alam
Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. (Sumber: 13)

Kawasan Perbatasan Negara
Wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/ atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. (Sumber: 11)

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. (Sumber: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas). (Sumber: 12)

Kawasan Perdesaan
Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan

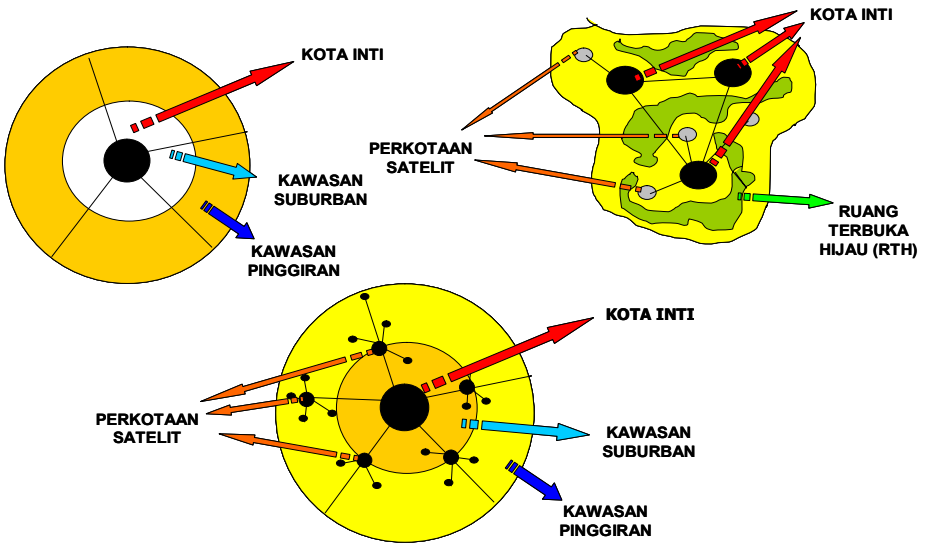

Gambar 4.03 Kawasan Metropolitan

sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (Sumber: 4)

Kawasan Perkotaan
Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
(Sumber: 4)

Kawasan Perkotaan Besar
Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 jiwa. (Sumber: 4)

Kawasan Perkotaan Kecil
Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 jiwa dan paling banyak 100.000 jiwa. (Sumber: 4)

Kawasan Perkotaan Sedang
Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa. (Sumber: 4)

Kawasan Permukiman
Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. (Sumber: 11)

Kawasan Pertahanan Negara
Wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. (Sumber: 11)

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. (Sumber: 11)

Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan. (Sumber: 11)

Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C. (Sumber: 11)

Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. (Sumber: 11)

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
(Sumber: 11)

Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
(Sumber: 11)

Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
Kawasan yang potensial mengalami bencana alam geologi. (Sumber: 13)

Kawasan Resapan Air
Daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air. (Sumber: 13)

Kawasan Sekitar Mata Air
Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. (Sumber: 13)

Kawasan Siap Bangun (Kasiba)
Sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan. (Sumber: 8)

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
(Sumber: 4)

Kawasan Strategis Nasional
Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. (Sumber: 4)

Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. (Sumber: 4)

Kawasan Strategis Provinsi
Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
(Sumber: 4)

Kawasan Suaka Alam
Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang berupa cagar alam dan suaka margasatwa.
(Sumber: 13)

Kawasan Tertentu
Merupakan istilah lama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagi pengganti UU no 24/1992 tentang Penataan Ruang, istilah kawasan tertentu menjadi kawasan strategis, baik kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
(Sumber : 4)

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional
Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.
(Sumber: 11)

Ketelitian Peta
Ketepatan, kerincian dan kelengkapan data atau informasi georeferensi dan tematik. Skala minimal untuk masing-masing peta, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Peta wilayah negara Indonesia berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:1.000.000.
- Peta wilayah daerah propinsi berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:250.000.
- Peta wilayah daerah kabupaten berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:100.000.
- Peta wilayah daerah kota berpedoman kepada tingkat ketelitian peta minimal berskala 1:50.000.
  (Sumber: 9)

Koefisien Zona Terbangun
Angka perbandingan antara luas total tapak bangunan terhadap luas zona. (Sumber: 13)

Konsolidasi Tanah Permukiman
Upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik melalui usaha bersama untuk membangun Lisiba dan penyediaan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
(Sumber: 8)

Konurbasi
Konsentrasi perkotaan dalam jumlah besar (Pattrick Geddes), penggabungan beberapa kota atau perkotaan menjadi satu kota yang besar. Pada beberapa kasus wilayah seperti ini dibentuk suatu wilayah; administrasi baru, tapi banyak pula kasus yang tetap mempertahankan wilayah administrasi lokal yang lama; sinonim dengan istilah ini adalah "aglomerasi perkotaan" atau "Metropolis" (di AS). (Sumber: 23)

Kota Global
Kota-kota yang memiliki hubungan erat secara global seperti kota metropolitan, dan lain-lain. (Sumber: 24)

Kota Satelit
Kota yang terletak di pinggir atau berdekatan dengan kota besar, yang secara ekonomi, sosial administrasi, dan politis tergantung apda kota besar itu. (Sumber: 23)

Kutub Pertumbuhan
Pusat perkembangan yang dapat mempengaruhi perkembangan lebih lanjut kegiatan perekonomian di seluruh wilayah; pusat pertumbuhan ini biasanya terdapat di daerah perkotaan. (Sumber: 23)

L

Lingkungan Siap Bangun (Lisiba)
Sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang. (Sumber: 8)

Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri (Lisiba yang Berdiri Sendiri)
Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain. (Sumber: 8)

M

Metoda Delphi
Cara peramalan, dikerjakan oleh kelompok tenaga ahli yang menjawab sejumlah pertanyaan yang jawabannya merupakan masukan bagi evaluasi ulang sehingga menimbulkan bahan pertanyaan baru; untuk mencapai kata sepakat biasanya dibutuhkan tiga sampai enam kali putaran pembahasan; merupakan teknik peramalan untuk menjajagi a.l. kapan terjadinya perubahan teknologi dan peramalan jangka panjang bagi perencanaan kebutuhan fasilitas. (Sumber: 23)

Morfologi Perkotaan
Penataan/formasi keadaan kota yang sebagai obyek dan sistem dapat diselidiki secra struktural, fungsional, dan visual. (Sumber: 24)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. (Sumber: 3)

P

Pelaksanaan Penataan Ruang
Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Sumber: 4)

Pelayanan Kota
Berbagai jasa yang disediakan oleh kota kepada penduduk atau pendatang; peran fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi merupakan esensi dari pemberian pelayanan tsb. (Sumber: 23)

Pemanfaatan Ruang
Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. (Sumber: 4)

Pemanfaatan Ruang Secara Kompak
Pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman, yang bertujuan untuk:
a. mewujudkan efisiensi dalam pemanfaatan lahan
b. meminimalisasi pergerakan manusia (Sumber: 11)

Pemanfaatan Ruang Secara Vertikal
Pemanfaatan ruang secara tegak lurus baik di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi dengan batas geometri tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah. (Sumber: 11)

Pembangunan Berbasis Sistem Transit (*Transit-Oriented Development*)
Merupakan upaya untuk membangun suatu area atau kawasan dengan peruntukan yang beragam atau *mixed-use* (hunian, pertokoan, perkantoran, pendidikan, dll) dan dengan kepadatan tinggi pada lokasi-lokasi yang berdekatan (umumnya masih dalam radius pencapaian dengan berjalan kaki maksimum 10 menit atau kurang lebih berjarak 5 mil) dengan lokasi stasiun jaringan angkutan transportasi massal (stasiun kereta api dalam kota, terminal bis, terminal kendaraan sungai). (Sumber: 25)

Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup
Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. (Sumber: 1)

Pembinaan Penataan Ruang
Upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (Sumber: 4)

Penataan Ruang
Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Sumber: 4)

Penatagunaan Tanah/Pengelolaan Tata Guna Tanah
Kegiatan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. (Sumber: 10)

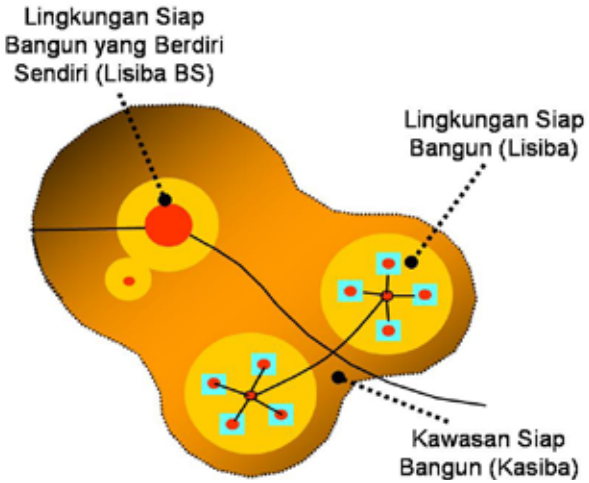

Gambar 4.04 **Kawasan Siap Bangun (Sumber : 8)**

Pengaturan Penataan Ruang
Upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. (Sumber: 4)

Pengawasan Penataan Ruang
Upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Sumber: 4)

Pengelolaan Kota
Pengelolaan yang bertujuan memaksimalkan. efisiensi pelayanan kota sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan penduduknya. Secara konseptual dapat dipandang meliputi fungsi-fungsi pemerintahan, kebijaksanaan pembangunan dan keputusan-keputusan investasi, implementasi dan pengelolaan aset, peraturan dan perpajakan, pengembangan hubungan dengan masyarakat. (Sumber: 23)

Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Merupakan upaya yang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disepakati bersama sesuai kurun waktu perencanaan, sehingga terwujud tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi (Sumber: 4)

Penglaju/*Commuter*
Penduduk luar kota (biasanya pinggiran kota) yang setiap hari pergi ke pekerjaannya di kota dan sorenya kembali pulang ke rumahnya. (Sumber: 23)

Penguasaan Lahan
Menghimpun lahan bagi pembangunan permukiman atau kota baru; kegiatan ini erat kaitannya dengan biaya pembangunan, untuk itu diperlukan pengetahuan tentang peta kepemilikan tanah, bentuk kapling, peruntukan lahan dan penggunaan lahan yang sesungguhnya, harga lanah serta sifat masyarakat dan para tengkulak lahan. (Sumber: 23)

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
Merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Terdapat dua alternatif hasil peninjauan kembali terhadap suatu rencana tata ruang, yakni alternatif pertama rencana tata ruang yang ditinjau kembali perlu direvisi dan alternatif kedua rencana tata ruang yang ditinjau kembali tersebut tidak perlu direvisi. Pada prinsipnya, upaya peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang tidak dimaksudkan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang (Sumber: 4)

Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. (Sumber: 4)

Perangkat Disinsentif
Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: (i) pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau (ii) pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. (Sumber: 4)

Perangkat Insentif
Perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: (i) keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;(ii) pembangunan serta pengadaan infrastruktur; (iii) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau (iv) pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. (Sumber: 4)

Peraturan Zonasi
Ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi ini berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang, dengan cakupan pengaturan antara lain (i) Penggunaan lahan dan bangunan seperti penggunaan utama, penggunaan pelengkap, penggunaan bersyarat, penggunaan dengan pengecualian khusus, penggunaan yang dilarang;(ii) Intensitas pemanfaatan ruang atau kepadatan pembangunan seperti ketentuan KDB, KLB, KDH; (iii) Tata massa bangunan, seperti tinggi bangunan, garis sempadan bangunan, jarak antarbangunan, luas minimum persil, dll; (iv)Prasarana, ketentuan minimum eksterior, serta standar-standarnya;dan (v) Pengendalian eksternalitas negatif , insentif dan disinsentif, perijinan, pengawasan, penertiban. (Sumber: 4 dan 25)

Peremajaan Kota
Kegiatan pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bagian dari kota; merupakan upaya meningkatkan manfaat lahan bagi masyarakat serta pemerintah kota. (Sumber: 23)

Perencanaan
Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (Sumber: 3)

Perencanaan Tata Ruang
Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. (Sumber: 4)

Perkembangan Wilayah
Pertumbuhan fisik suatu wilayah yang disertai perkembangan keadaan ekonorni dan sosial wilayah tsb. (Sumber: 23)

Peruntukan Tanah/Lahan
Alokasi penggunaan dan penguasaan tanah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. (Sumber: 23)

Polarisasi Pembangunan
1. Suatu kondisi pembangunan yang mengakibatkan pertumbuhan suatu kota atau wilayah lebih tinggi daripada kota atau wilayah di sekitarnya.
2. Konsep pembangunan yang tidak mengkaitkan kepentingan secara timbal balik pertumbuhan daerah pusat (core) dengan daerah pinggiran (periphery), atau perkembangan dua daerah yang berdampingan yang berbeda arab kepentingannya. (Sumber: 23)

Promenade
Ruang atau daerah khusus untuk bersantai; terdapat di pantai pinggir laut yang agak besar; dapat juga di kapal laut. (Sumber: 23)

Pusat Kota (*downtown*)
Merupakan bagian dari ruang kota dengan karakteristik:
- Lahan/area terbangun yang paling intensif dibandingkan area lainnya, dengan pemanfaatan yang beragam seperti pusat perdagangan,hiburan, perkantoran, termasuk hunian kepadatan tinggi serta peruntukan ruang publik yang cukup.
- Berada pada lokasi yang mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota dengan kendaraan maupun pejalan kaki.
- Di Indonesia, pusat kota sering dicirikan dengan keberadaan alun-alun, pusat pemerintahan, mesjid agung, pusat perbelanjaan dan perkantoran seperti antara lain pusat Kota Bandung yang terkenal dengan Alun-Alun Bandung, pertokoan, perkantoran dan Mesjid Agung Bandung; pusat Kota Semarang, pusat Kota Medan. (Sumber: 26)

Pusat Kegiatan
Merupakan terminologi yang digunakan dalam rencana tata ruang wilayah untuk menunjukkan lokasi kota atau kawasan perkotaan sesuai dengan lingkup pelayanan prasarana dan sarananya serta lingkup pengaruh akitifitas pada kawasan tersebut terutama aktifitas ekonomi. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengklasifikasikan pusat kegiatan menjadi pusat kegiatan nasional atau PKN, Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW, Pusat Kegiatan Lokal atau PKL.
(Sumber: 4)

Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
(Sumber: 4)

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
(Sumber: 4)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. (Sumber: 4)

R

Reklamasi
Kegiatan penimbunan dan pengeringan wilayah perairan. (Sumber: 13)

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (Sumber: 4)

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: 7)

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. (Sumber: 7)

Rencana Pola Ruang
Merupakan salah satu muatan rencana tata ruang, disamping rencana struktur ruang. Rencana Pola Ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya, seperti misalnya peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial budaya,ekonomi, pertahanan dan keamanan. (Sumber : 4)

Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional
- Merupakan salah satu muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN yang memuat penetapan kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional atau dikenal dengan istilah kawasan andalan.
- Pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang bersifat strategis nasional, ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
- Sebagai contoh kawasan lindung nasional antara lain **Taman Nasional Gunung Leuser** di Provinsi Aceh yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak di lebih dari satu provinsi, yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Utara; **Taman Nasional Kerinci Seblat** yang melindungi provinsi-provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Bengkulu. Sementara, contoh kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional antara lain **kawasan andalan Lhokseumawe** di Provinsi Aceh dengan sektor unggulan industri dan pertambangan, **kawasan andalan Bojonegara-Merak-Cilegon** di Provinsi Jawa Barat dengan sektor unggulan industri,pariwisata dan pertambangan. (Sumber: 4 dan 11)

Penjelasan Tambahan
Kriteria Penetapan Pusat Kegiatan

Kriteria penetapan pusat kegiatan menurut PP 26/2008 sebagai berikut :

1. Kriteria Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai (i) simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, (ii)pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan atau, (iii)simpul utama transportasi skala nasiona atau melayani beberapa provinsi. Sebagai contoh Medan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional karena memiliki bandara udara Polonia yang merupakan simpul transportasi yang melayani beberapa provinsi.
2. Kriteria Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai (i) simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN,(ii)pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan atau (iii)simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Sebagai contoh Pematang Siantar ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah karena mendukung fungsi Medan sebagai PKN dan memiliki simpul transportasi yang melayani kabupaten lainnya seperti Tebing Tinggi, Balige,Rantau Prapat, dll.
3. Kriteria Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau disingkat PKSN adalah pusat perkotaan yang (i)berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga, (ii) berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, (iii)merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau, (iv)merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. Sebagai contoh, Entikong, Jagoi Babang dan Nangabadau di Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan.

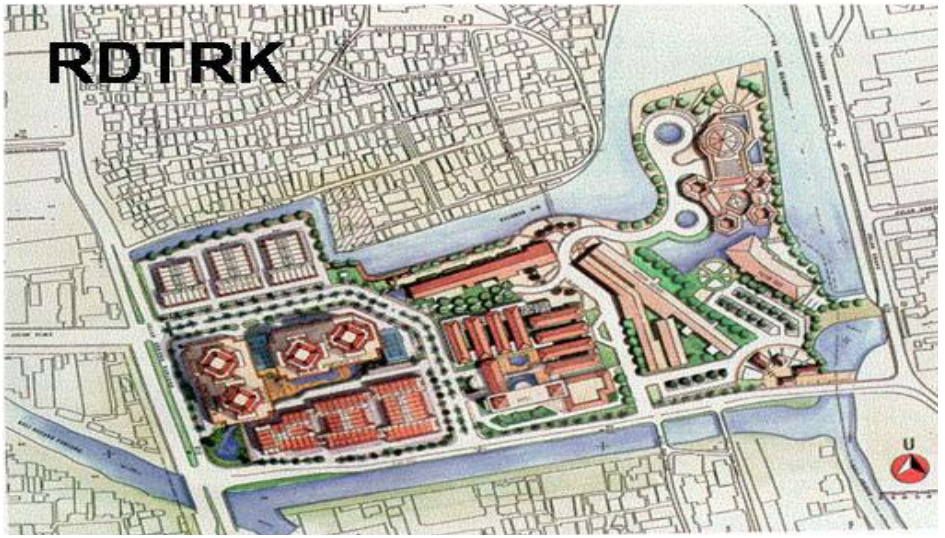

Gambar 4.05 RDTRK (Sumber : 28)

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi
- Merupakan salah satu muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRWP yang memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.
- Pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi apabila dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRWN. (Sumber: 4)

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten
- Merupakan salah satu muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau RTRWK yang memuat penetapan kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten.
- Pola ruang kawasan kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan

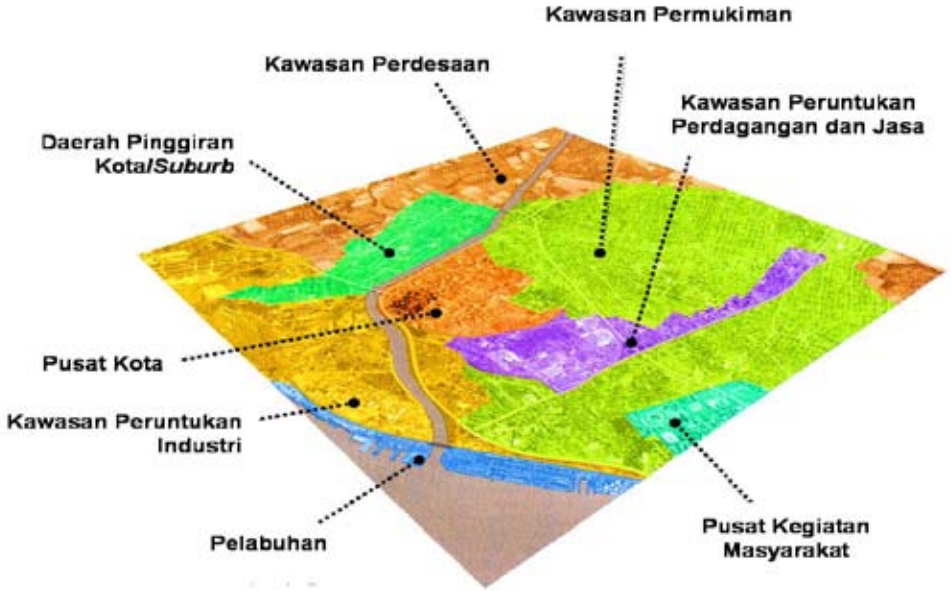

Gambar 4.06 **Pola Pemanfaatan Ruang (Sumber : 27)**

ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang belum ditetapkan dan dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan, dalam RTRWN dan RTRWP
(Sumber: 4)

Rencana Struktur Ruang
Merupakan salah satu muatan rencana tata ruang, disamping rencana pola ruang. Gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan. (Sumber: 11)

Rencana Rinci Tata Ruang
Penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup dalam rencana tata ruang wilayah. (Sumber: 4)

Rencana Tata Ruang
Merupakan hasil perencanaan tata ruang, yang dapat diklasifikasikan menjadi **rencana umum tata ruang** dan **rencana rinci tata ruang**. Rencana umum tata ruang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan karena kewenangan mengatur pemanfaatan ruang dibagi sesuai dengan pembagian administrasi pemerintahan, yakni Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRWP, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RTRWK. Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan atau disusun apabila rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pemanfaatan ruang/pengendalian pemanfaatan ruang.
(Sumber: 4)

Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan
Bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang dapat berbentuk kawasan agropolitan. (Sumber: 22)

Gambar 4.07 **Rencana Tata Ruang (Sumber: 4)**

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
Rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah provinsi. (Sumber: 4)

Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
Rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Sumber: 4)

Rencana Tata Ruang Wilayah
Hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional yang telah ditetapkan. (Sumber: 21)

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
Merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. RTRWN memuat (i) tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, (ii) rencana struktur ruang wilayah nasional, (iii) rencana pola ruang wilayah nasional, (iv) penetapan kawasan strategis nasional, (v) arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan (vi) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi. Jangka waktu RTRWN adalah 20 tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun, namun dalam kondisi strategis tertentu seperti karena bencana alam skala besar, perubahan batas negara dll, peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam lima tahun.
(Sumber: 11)

Revitalisasi Kota
Upaya peningkatan kembali fungsi kota; kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan kota, agar pendapatan kota meningkat (tujuan dan pengertiannya hampir-hampir sama dengan istilah pembaharuan kota atau peremajaan kota). (Sumber: 23)

Ruang
Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. (Sumber: 4)

Ruang Publik (*Public Space*)
Ruang bersama yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatan sehari-hari, baik yang sifatnya rutin atau periodik. (Sumber: 25)

Ruang Terbuka (*Open space*)
Secara teoritis ruang terbuka dapat didefinisikan sebagai setiap jengkal lahan yang bebas dari peruntukan untuk perumahan, perkantoran, perdagangan, industri dan lainnya atau lahan-lahan konservasi yang dilindungi atau ditetapkan oleh suatu peraturan perundangan, misal ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah memiliki kekuatan hukum. Dalam prakteknya di Indonesia berdasarkan Permendagri No. 1/2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka didefinisikan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. (Sumber: 17 dan 24)

Ruang Terbuka Hijau
Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Sumber: 4)

Ruang Terbuka Hijau Privat
Merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh orang, seperti misalnya kebun atau halaman rumah/ gedung miliki perseorangan atau koorporasi yang ditanami tumbuhan. (Sumber: 25)

Ruang Terbuka Hijau Publik
Ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. (Sumber: 4)

Ruang Udara untuk Penerbangan
Ruang yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional. (Sumber: 11)

S

Sabuk Hijau (*Greenbelt*)
Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/ kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. (Sumber: 20)

Satuan Wilayah Pengembangan
Suatu wilayah dengan semua kota di dalamnya mempunyai hubungan hierarkhi yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau yang terkait oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air. (Sumber: 23)

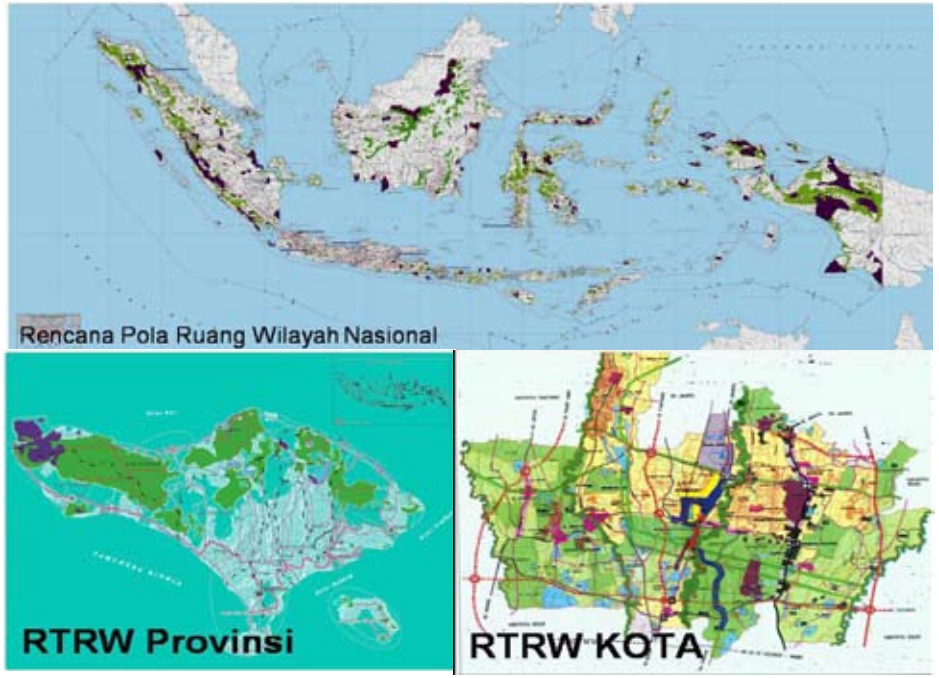

Gambar 4.08 Rencana Tata Ruang Wilayah (Sumber : 27)

Sektor Jasa Informal
Usaha pelayanan tidak resmi yang dilakukan perorangan dengan tujuan memperoleh imbalan terhadap jasa atau bantuan pelayanan yang diberikannya. (Sumber: 23)

Sempadan Sungai
Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. (Sumber: 13)

Sempadan Pantai
Kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi pantai. (Sumber: 13)

Sengketa Penataan Ruang
Perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. (Sumber: 4)

Sistem Informasi Geografi (SIG)
Sistem pangkalan data geografi terpadu; sistem ini mampu menyimpan, mengelola, menganalisa dan menyajikan informasi geografi, sehinga sangat berguna bagi perencanaan tata ruang, pengelolaan dan pengendalian sarana perkotaan secara umum. (Sumber: 23)

Sistem Internal Perkotaan
Struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. (Sumber: 4)

Sistem Jaringan Transportasi Nasional
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Nasional merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah nasional serta keterkaitannya denganjaringantransportasiinternasional. Di dalam RTRWN, pengembangan sistem jaringan transportasi nasional dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antar pulau serta kawasan perkotaan dengan kawasan produksi sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi serta pertahanan dan keamanan negara dalam rangka memantapkan kedaulatan wilayah nasional. (Sumber: 11)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (Sumber: 3)

Sistem Wilayah
Struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. (Sumber: 4)

Sosio Ekonomi
Sesuatu yang berkaitan/melibatkan

Penjelasan Tambahan
Sistem Jaringan Transportasi Nasional

1. Sistem Jaringan Transportasi Nasional meliputi sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara.
2. Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
   - Jaringan jalan nasional yakni jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional dan jalan tol
   - Jaringan jalur kereta api yakni jaringan jalur kereta api umum (baik antar kota dan perkotaan) dan khusus (yang dikembangkan oleh badan usaha tertentu untuk mendukung kegiatan pokok kegiatan badan usaha tersebut, seperti jalur kereta api perkebunan, batu bara, dll)
   - Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
3. Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
4. Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

kombinasi faktor-faktor sosial maupun ekonomi, seperti: angkatan kerja, tenaga kerja, pengangguran, mata pencaharian, gaji / upah. (Sumber: 23)

Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional
Langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang. (Sumber: 11)

Struktur Ruang
Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. (Sumber: 4)

T

Tanah Timbul
Daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara. (Sumber: 10)

Tatanan Lingkungan
1. Susunan komponen lingkungan secara alamiah atau hasil upaya manusia
2. Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen lingkungan, baik yang terjadi secara alami ataupun yang terjadi km hasil upaya manusia. (Sumber: 23)

Tatanan Kepelabuhan
Sistem kepelabuhan nasional yang memuat hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya. (Sumber: 11)

Tatanan Kebandarudaraan
Sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya. (Sumber: 11)

Tata Ruang
Wujud struktur ruang dan pola ruang. (Sumber: 4)

U

Urbanisasi
Perubahan secara keseluruhan atau transformasi tatanan masyarakat yang semula dominan perdesaan menjadi dominan perkotaan; dalam arti terbatas juga disebut pertambahan penduduk suatu kota sebagai akibat migrasi penduduk dari daerah perdesaan sekitamya atau km perpindahan penduduk dari kota lain. (Sumber: 23)

Urbanisme
1. Sikap dan cara atau perilaku hidup di kota;
2. Perkembangan daerah perkotaan; ;
3. Ilmu tentang kehidupan kota. (Sumber: 23)

W

Wilayah
Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. (Sumber: 4)

Z

Zona
Kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu. (Sumber: 13)

Zona Budi Daya (Zona B)
Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budi daya.
(Sumber: 13)

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE Indonesia)
Jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dan di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
(Sumber: 11)

Zona Non – Budi Daya (Zona N)
Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan lindung.
(Sumber: 13)

Zona Penyangga (Zona P)
Zona pada kawasan budi daya di perairan laut yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya untuk melindungi kawasan budi daya dan/atau kawasan lindung yang berada di daratan dari kerawanan terhadap abrasi pantai dan intrusi air laut. (Sumber: 13)

SUMBER

1. UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. UU No. 7/2004 tentang SDA
3. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
5. UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6. PP No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
7. PP 27/1999 tentang AMDAL
8. PP No. 80/1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri
9. PP 10/2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
10. PP 16/2003 tentang Penatagunaan Tanah
11. PP 26/2008 tentang RTRWN
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
13. Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek Punjur
14. Keppres RI No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
15. Keppres 103/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
16. Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional
17. Permendagri No. 1/2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
18. Permendagri No. 28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
19. Permen Agraria/Kepala BPN No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
20. Pedoman RTH
21. Pedoman Kawasan Budidaya
22. Ketentuan Pengaturan Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
23. Kamus Tata Ruang, Ditjen CK dan IAP, 1998
24. Buku Perancangan Kota Secara Terpadu, Markus Zahnd, 1999
25. Planning and Urban Design Standards, American Planning Association, 2006
26. Direktorat Jenderal Penataan Ruang

PENATAAN RUANG

GNKPA
RISHA
PED
CMBL
LDF
LCR
HAKI
HRD
RKSABMN
AAPH
UU
ZAMP
RKL
HWD
VAT
RPJP
KAPET
SINGKATAN

A

AAPH
Asian Association for Planning and Housing
Ikatan Perencanaan dan Perumahan di Wilayah Asean

ABPLP
Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
Water Supply and Environmental Sanitation

ABT
Anggaran Belanja Tambahan
Additional Budget

ADB
Asian Development Bank
Bank Pembangunan Asia

AFTA
Asian Free Trade Agreement
Persetujuan Perdagangan Bebas Asean

AIDA
Australia and Indonesia Development Area

AKPPI
Asosiasi Konsultan Pembangunan Pemukiman Indonesia
National Association of Development Consultant

ALKI
Alur Laut Kepulauan Indonesia

ALOS
Aggregate Level of Services

AMDAL
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Environmental Impact Analysis

ANDAL
Analisis Dampak lingkungan
Environmental Impact Analysis

APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Regional State Budget

APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
National Revenue and Expenditure Budget

APEC
Asian Pacific Economic Country
Negara-Negara Ekonomi Asia Pasifik

ASBUTON
Aspal Buton

ASEAN
Association for South East Asian Nations
Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

ASPEK
Asosiasi Permukiman Kooperatif
The Association Cooperative Human Settlements Development

B

BA 33
Bagian Anggaran 33

BA 69
Bagian Anggaran 69

BAKOSURTANAL
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
National Survey Coordination and Mapping Board

BAPEKAM
Badan Pembangunan Kampung/ Kelurahan/Desa

BAPPEDA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Regional Development Planning Board

BAPPEDAL
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Board for the Study of *Environmental Impacts*

BAPPEKOT / KAB
Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten
City/Regency Development Planning Board

BAPPENAS
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
National Development Planning Board

BAPPEPROP
Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi
Provincial Development Planning Board

B3
Bahan Berbahaya dan Beracun

BI
Bank Indonesia
Bank of Indonesia

BIC
Building Information Center
Pusat Informasi Teknik Bangunan (PITB)

BIMP-EAGA
Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area

BKM
Badan Keswadayaan Masyarakat

BKPN
Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional
National Housing Policy Board

BKP4N
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional

BKPRD
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

BKTRN
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

BLM
Bantuan Langsung Masyarakat

BLU
Badan Layanan Umum

BMN
Barang Milik Negara

BNA
Basic Needs Approach
Pendekatan Kebutuhan Dasar

BOD
Biochemical Oxygen Demand

BOO
Built Operate Own

BOT
Build Operate and Transfer

BPD
Badan Perwakilan Desa

BPJT
Badan Pengatur Jalan Tol

BPKP
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan

BPN
Badan Pertanahan Nasional
National Land Agency

BP4D
Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Daerah

BPPSPAM
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

BPS
Biro Pusat Statistik
Central Bureau for Statistics

BUILD
Breaktrough Urban Initiatives of Housing and Local Development
Prakarsa Kota Terobosan untuk Pembangunan Daerah

BUJT
Badan Usaha Jalan Tol

BUMD
Badan Usaha Milik Daerah
Locally Owned Public Enterprise

BUMN
Badan Usaha Milik Negara
State Owned Public Enterprise

BWS
Balai Wilayah Sungai

C

CBD
Community Based Development
Pembangunan Berbasis pada Komunitas

CBD
Central Business District
Daerah Pusat Kota

CBO
Community Based Organization
Organisasi Berbasis pada Masyarakat

CDC
Community Development Consultant
Konsultan Pembangunan

CDP
Community Development Plan

CMBL
Component and Budget Line
Komponen dan penganggaran

Co-BG
Co-BILD Group
Kelompok Co-BILD

Co-BILD
Community-Based Initiatives of Housing and Local Development
Penerapan Pembangunan Perumahan dan Daerah yang Berbasis pada Prakarsa Masyarakat

COD
Chemical Oxygen Demand

CSS
Community Self Survey

D

DADPD
Daftar Alokasi Dana Pembangunan Daerah

DAED
Detailed Architectural and Engineering Design
Perencanaan Arsitektur dan Teknis Terinci

DAS
Daerah Aliran Sungai

DED
Detailed Engineering Design
Perancangan Teknis Terinci

DIK
Daftar Isian Kegiatan

Diklat
Pendidikan dan Pelatihan

DIPA
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DKKK
Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota
Urban Street Cleaning Service

DSDP
Denpasar Sewerage Development Project

E

EAROPH
The Eastern Regional Organization for Planning and Housing
Organisasi Perencanaan clan Perumahan untuk Kawasan Asia Pasifik

EIRR
Economical Internal Rate of Return
Tingkat Pengembalian Ekonomi (Dalam Skala Internal)

ESCAP
Economic and Social Commission for Asia and pacific
Komisi dalam bidang Ekonomi dan Sosial untuk Kawasan Asia clan Pasifik

F

FGD
Focus Group Discussion, adalah teknik diskusi dengan meruncingkan suatu diskusi menuju suatu pokok persoalan yang menjadi tujuan diskusi.
Diskusi Kelompok Terarah

FIRR
Financial Internal Rate of Return
Tingkat Pengembalian Finansial (Dalam Skala Internal)

FK-BKM
Forum Komunikasi BKM Tingkat Kota/ Kabupaten

FMR
Financial Management Report
Laporan Pengelolaan Keuangan

FPK
Forum Pembangunan Kota
Local Development Forum

FS
Feasibility Study
Study Kelayakan

FWD
Failing Weight Deflectometer

G

GARDU-TASKIN
Gerakan Terpadu pengentasan Kemiskinan

GDP
Gross Domestic Product
Pendapatan Kotor Dalam Negeri

GERBANG KERTASUSILA
Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan *(Surabaya Metropolitan Area)*

GLD
Guided Land Development
Pengembangan Lahan Terkendali / Terarah (PLT) atau Program Pemukirnan Terarah

GMB
Garis Muka Bangunan

GNKPA
Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air

GNP
Gross National Product
Pendapatan Kotor Nasional

GOI
Government of Indonesia
Pemerintah Indonesia

H

HAKI
Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia
Indonesian Constructors Association

HC
House Connection
Sambungan Rumah (SR)

HGL
Housing Guarantee Loan
Dana Pinjaman Bagi Sektor Perumahan

HK
Hidran Kebakaran
Fire Hydrant

HOMI
Housing Market Indonesia
Pasar Perumahan Indonesia

HRD
Human Resources Development
Pengembangan Sumberdaya Manusia

HWD
Human Waste Disposal
Air Limbah

I

IAI
Ikatan Arsitek Indonesia
Indonesian Architects Association

IAP
Ikatan Ahli Perencana
Planners Association

IATPI
Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Indonesia
Indonesian Sanitary Engineers Association

IBRD
International Bank for Reconstruction Development

ICB
International Competitive Bidding

IDA
International Development Agency

IKMN
Inventarisasi Kekayaan Milik Negara

IMB
Izin Mendirikan Bangunan

IMS-GT
Indonesia – Malaysia – Singapore Growth Triangle

Infocom
Information and Communication
Informasi dan Komunikasi

Inkindo
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
Indonesian Consultants Association

IPA
Instalasi Pengolahan Air

IPAL
Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPLT
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

IPP
Intensifikasi Penyuluhan Perumahan
Intensification Integral Dissemination

IRI
International Roughness Index

IRR
Internal Rate of Return
Tingkat Pengembalian Setempat (Dalam Aspek Ekonomi)

IRSID
Integrated Rural Settlement Infrastructure Development
Pembangunan Prasarana Permukiman Perdesaan Terpadu

J

JABODETABEK
Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi *(Jakarta Metropolitan Area)*

Jabodetabek Punjur
Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur

JIAT
Jaringan Irigasi Air Tanah

JORR
Jakarta Outer Ring Road

Juklak
Petunjuk Pelaksanaan
Implementation Manual

Juknis
Petunjuk Teknis
Technical Guidelines

K

KAPET
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

KARTAMANTUL
Yogyakarta – Sleman – Bantul *(Yogyakarta Metropolitan Area)*

KASIBA
Kawasan Siap Bangun

KDB
Koefisien Dasar Bangunan

KLB
Koefisien Lantai Bangunan

KDF
Kelurahan Development Forum
Forum Pembangunan Kelurahan

KDP
Kecamatan Development Project

KEDUNGSEPUR
Kendal – Demak – Semarang – Ungaran – Purwodadi
(Semarang Metropolitan Area)

KEKI
Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia

Kepmen
Keputusan Menteri
Ministerial Decree

Keppres
Keputusan Presiden
Presidential Decree

KESR
Kerjasama Ekonomi Sub Regional

KIK
Kredit Investasi Kecil
Small Investment Credit

Kimpraswil
Permukiman dan Prasarana Wilayah
Ministry of Settlements and Regional Infrastructure

KIP
Kampung Improvement Programme
Program Perbaikan Kampung

KK
Kepala Keluarga
Head of Family

KKPPI
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

KME
Konsultan Monitoring dan Evaluasi

KMP
Konsultan Manajemen Pusat

KMW
Konsultan Manajemen Wilayah

KPKN
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

KPR
Kredit Pemilikan Rumah

KSM
Kelompok Swadaya Masyarakat
Community-Based Organization

KSO
Kerja Sama Operasi

KTM
Kota Terpadu Mandiri

KSNPP
Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman

KUR
Kredit Usaha Rakyat

L

LAPEN
Lapis Penetrasi Makadam

LASBUTAG
Lapis Asbuton Campuran Dingin

LASTON
Lapis Beton Aspal

LATASIR
Lapis Tipis Aspal Pasir

LCT
Local Counterpart Team
Tim Pendamping Daerah

LDF
Local Development Forum
Forum Pembangunan Kota

LISIBA
Lingkungan Siap Bangun

LJKI
Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia

LKJK
Lembaga Konsumen Jasa Konstruksi

LKMD
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
Village Community Residence Institution

LMD
Lembaga Masyarakat Desa
Village Community Institution

LOS
Level of Services
Tingkat Pelayanan

LPSM
Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat
Agency for the Promotion of Self-help Groups

LPJK
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

LPJKN
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

LSD
Lembaga Sosial Desa
Village Sodal Institution

LSM
Lembaga Swadaya Masyarakat
Non-Governmental Organization (NGO)

M

MAMINASATA
Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar *(Makassar Metropolitan Area)*

MCK
Mandi Cuci Kakus
Communal Sanitary Unit for Bathing, Washing, Lavatory

MEBIDANG
Medan - Binjai - Deli Serdang
(Medan Metropolitan Area)

MIIP
Market Infrastructure Improvement Programme
Program Perbaikan Prasarana Pasar

MIS
Management Information System
Sistem Informasi Tata laksana

MOU
Memorandum of Understanding
Naskah Kesepakatan Kerjasama

MSC
Maintenance Scheduling Chart

MST
Muatan Sumbu Terberat

Musbangdes
Musyawarah Pembangunan Desa
Consultative Meeting on Village Development

MUSRENBANG
Musyawarah Perencanaan Pembangunan

N

NGO
Non-Governmental Organization
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

NPV
Net Present Value

NSPM
Norma Standar Pedoman dan Manual

NUSSP
Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project

P

PAD
Pendapatan Asli Daerah
Local Revenues

PARUL
Poverty Alleviation through Rural-Urban Linkages Project
Proyek Pengentasan Kemiskinan melalui Hubungan Desa-Kota

PBB
Pajak Bumi dan Bangunan
Land and Property Tax

PBMC
Performance Based Maintenance Contract

PBME
Project Benefit Monitoring and Evaluation
Monitoring dan Evaluasi Manfaat Proyek

PDAL
Perusahaan Daerah Air Limbah
Regional Waste Water Enterprise

PDAM
Perusahaan Daerah Air Minum
Regional Water Enterprise

PDK
Perusahaan Daerah Kebersihan
Local Cleaning Service

PDMDKE
Program Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi

PDN
Pinjaman Dalam Negeri
Domestic Loan

PEL
Penyajian Evaluasi Lingkungan
Presentation of *Environmental Evaluation*

Pemda
Pemerintah Daerah
Local Government

Perda
Peraturan Daerah
Local Regulation

Perpamsi
Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia
Indonesian Water Enterprises Association

Perum
Perusahaan Umum
Public Corporation (providing public services but operating as an *autonomous business)*

Perum Perumnas
Perusahaan Umum Perumahan Nasional
National Housing Corporation

Perumtel
Perusahaan Umum Telekomunikasi
National Telecommunication Corporation

PF
Pre-Financing
Pembayaran Pendahuluan

PH
Public Hydrant
Hidran Umum

PIL
Penyajian Informasi Lingkungan
Presentation of Environmental Information

Pimbagpro
Pimpinan Bagian Proyek
Sub-project Manager

PISEW
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

PITB
Pusat Informasi Teknik Bangunan
Building Information Centre (BIC)

PIU
Project Implementation Unit
Unit Unit Pelaksana Proyek

PJM
Program Jangka Menengah
Multi-year Investment Programme

PJOK
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan

PKK
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

PKL
Pusat Kegiatan Lokal

PKN
Pusat Kegiatan Nasional

PKPD PU
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum

PKSN
Pusat Kegiatan Strategis Nasional

PKW
Pusat Kegiatan Wilayah

PLN
Pinjaman Luar negeri
Foreign Loan

PLPK
Perbaikan Lingkungan Permukiman Kota

PLPN
Perbaikan Lingkungan Permukiman Nelayan

PMN
Penyertaan Modal Negara

PMU
Project Management Unit
Unit Pengelola Proyek

PNPM
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

P2BPK
Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok

PPJT
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

PPK
Program Pengembangan Kecamatan

P2KP
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

P2KT
Program Pembangunan Kota Terpadu
Integrated Urban Development Programme

P2LDT
Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu
Integrated Rural Housing and Environment Programme

P2LKP
Perintis Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota Urban
Settlement Improvement Programme

P3A
Perkumpulan Petani Pemakai Air

P3KT
Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu *Integrated Urban Infrastructure Development Programme*

P5D
Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengendalian Pembangunan di Daerah
Guideline for the Formulation of Local Development Planning and Control

P2T
Panitia Pengadaan Tanah

Pokja
Kelompok Kerja
Working Group

POS
Prosedur Operasi Standard
Standard Operation Procedure (SOP)

PP
Peraturan Pemerintah
Government Law

PPh
Pajak Penghasilan
Income Tax

PPN
Pajak Penambahan Nilai
Value Added Tax *(VAT)*

PPLDT (P2LDT)
Program Pembangunan Lingkungan Desa Terpadu (Perumahan)

PQ
Pre-Qualification
Pra-Kualifikasi

PRONANGKIS
Program Penanggulangan Kemiskinan

PSL
Pusat Studi Lingkungan
Environmental Study Centre

PSP
Private Sector Participation

Protap
Prosedur Tetap
Fixed Procedure

PUM
Pembayaran Uang Muka
Advance Payment

Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat
Public Health Centre

R

Raker
Rapat Kerja
Working Meeting

Rakor
Rapat Koordinasi
Coordinating Meeting

Rakorbang
Rapat Koordinasi Pembangunan
Coordinating Meeting on Development Affairs

Rakorda
Rapat Koordinasi Daerah
Regional Coordinating Meeting

Rakorla
Rapat Koordinasi Pelaksanaan

Rakornas
Rapat Koordinasi Nasional
National Coordinating Meeting

RANDAL
Perencanaan dan Pengendalian
Planning and Controlling

RAP
Rencana Anggaran Proyek
Project Budget Plan

RAPBN
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *State Revenues and Expenditure Budget Plan*

RAT
Rencana Anggaran Tahunan
Annual Budget Plan

RDS
Real Demand Survey
Survei Kebutuhan Nyata

RDTR
Rencana Detail Tata Ruang

RDTRK
Rencana Detail Tata Ruang Kota
Detailed Urban Plan

Renja-KL
Rencana Kerja Kementrian Negara/ Lembaga

Renja-SKPD
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Renstra-KL
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Renstra-SKPD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Repelita
Rencana Pembangunan Lima Tahun
Five Years Plan

RISE (= PISEW)
Regional Infrastructure and Social Economic

RISHA
Rumah Instan Sederhana Sehat

RIT
Regional Implementation Team
Tim Pelaksanaan Regional

RK
Rekening Khusus

RKA-KL
Rencana Kerja dan Anggaran Kemiterian Negara/Lembaga

RKL
Rencana Pengelolaan Lingkungan

RKP
Rencana Kerja Pemerintah

RPJM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPL
Rencana Pemantauan Lingkungan

RP4D
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah

RS
Rumah Sederhana

RSS
Rumah Sangat Sederhana

RT
Rukun Tetangga

RTH
Ruang Terbuka Hijau

RTBL
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

RTR
Rencana Tata Ruang

RTRP
Rencana Tindak Revitalisasi Lingkungan Permukiman

RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah

RTRWN
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

RUMAJA
Ruang Manfaat Jalan

RUMIJA
Ruang Milik Jalan

Rusun
Rumah Susun

Rusuna
Rumah Susun Sederhana

Rusunawa
Rumah Susun Sederhana Sewa

RUWASJA
Ruang Pengawasan Jalan

RW
Rukun Warga
Group of Neighborhood Units (RTs)

S

SABMN
Sistem Akuntansi Barang Milik Negara

SAH
Saluran Air Hujan

SAI
Sistem Akuntansi Instansi

Sarusun
Satuan Rumah Susun

SARBAGITA
Denpasar – Badung – Gianyar – Tabanan
(Denpasar Metropolitan Area)

SARUT
Saringan Air Rumah Tangga

Satgas
Satuan tugas
Task Force

SBKBG
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung

SEL
Studi Evaluasi Lingkungan
Environmental Evaluation Study

SIAP
Sisa Anggaran Pembangunan
Unspent Development Budget

SIAR
Sisa Anggaran Rutin
Unspent Routine Budget

SIDLACOM
Survey, Investigation, Land Acquisition, Construction, Operation and *Maintenance*
Survai, Penelitian, Pembebasan Tanah, Pembangunan, Operasi dan Pembangunan

SIG
Sistem Informasi Geografi

SII
Standar Industri Indonesia
Indonesian Industrial Standard

SIJORI
Singapura – Johor – Riau Kepulauan

SIM
Sistem Informasi Manajemen

SK
Surat Keputusan
Decree

SKB
Surat Keputusan Bersama
Joint Decree

SKP
Satuan Kawasan Pengembangan
Development Area Unit (1SKP=20.000 ha=4SP)

SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah

SLF
Sertifikat Laik Fungsi

SMF
Secondary Mortgage Facilities

SNI
Standar Nasional Indonesia

SNVT
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu

SOP
Standard Operation Procedure
Prosedur Operasi Standar (POS)

SP
1. Surat Pengesahan
   Letter of *Authorization*
2. Satuan Pemukiman (lebih kurang 5000 ha)
   Settlement Unit (4SP=1 SKP)

SPAL
Sarana Pembuangan Air Limbah
Waste Water Disposal Facilities

SPAM
Sistem Penyediaan Air Minum

SPB
Surat Perjanjian Bersama

SPC
Saringan Pasir Cepat

SPL
Saringan Pasir Lambat

SPJ
Surat Pertanggungjawaban
Statement of *Account / Expenditures*

SPK
Surat Perintah Kerja
Instruction to Proceed

SPM
Standar Pelayanan Minimal

SPM
Surat Perintah Membayar

SPP
Semen Portland-Pozolan

SPPB
Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan

SP2LP
Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan

SPPN
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

SPPP
Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan

SS
Survey Swadaya

SRAH
Sumur Resapan Air Hujan

SRI
System of Rice Intensification

SWK
Satuan Wilayah Kerja

SWP
Satuan Wilayah Pengembangan

T

TA
Technical Assistance
Bantuan Teknik

TA
Tahun Anggaran
Fiscal Year

TAHU
Terminal Air dan Hidran Umum
Water Terminal and Public Hydrant

TKA
Tingkat Ketahanan Api

TKP
Tim Koordinasi Pusat

TKPP
Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek

TNA
Training Need Assessment
Perkiraan Kebutuhan Pelatihan

TOR
Terms of Reference
Kerangka Acuan

TOT
Training of Trainers

TPA
Tempat Pembuangan Akhir
Final Waste Dumping Site

TPS
Tempat Pembuangan Sampah

TPM
Tenaga Penyuluhan Masyarakat
Community Extension Workers

TP4D
Tim Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah

TSO
Technical Support Organization
Organisasi Bantuan Teknis

TIT(T3)
Tindak Turun Tangan
Next Policy Step

U

UDGL
Urban Design Guidelines
Panduan Rancang Kota

UDPK
Unit Daur Ulang dan Pengolahan Kompos

UKL
Upaya Pengelolaan Lingkungan

UMA
Urban Management Advisors
Penasehat Manajemen Kota

UMR
Upah Minimun Regional

UNCHS
United Nations Centre for Human Settlements (Habitat)
Pusat Permukiman Perserikatan Bangsa Bangsa

UNCRD
United Nations Centre for Regional Development Pusat Pembangunan Daerah Perserikatan Bangsa Bangsa

UNDP
United Nations Development Programme
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa

UNEP
United Nations Environmental Programme
Program Lingkungan Perserikatan Bangsa Bangsa

UNESCO
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa

UNHCR
United Nations High Commission for Refugees
Komisi tingkat Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa Bangsa

UNICEF
United Nations Children Fund
Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa Bangsa

UNIDO
United Nations Industrial Development Organization Organisasi Pembangunan Industri Perserikatan Bangsa Bangsa

UNO
United Nations Organization
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

UPK
Unit Pengelola Keuangan

UPL
Upaya Pemantauan Lingkungan

UPP
Urban Poverty Project
Proyek Kemiskinan Perkotaan

UPPKS
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

UPT
Unit Pelaksana Teknis

UR
Umur Rencana

URDI
Urban and Regional Development Institute

USD
United States Dollars

UU
Undang-undang
Law

V

VAT
Value Added Tax
Pajak Pertambahan Hilai (PPH)

W

WASDAL
Pengawasan dan Pengendalian

WASKAT
Pengawasan Melekat
Built in Control

WB
World Bank
Bank Dunia

WHO
World Health Organization
Organisasi Kesehatan Dunia

WP
Wilayah Pembangunan
Development Area

Z

ZAMP
Zona Air Minum Prima

ZEE
Zona Ekonomi Eksklusif

TIM PENYUSUN

November 2008,

PENERBIT

Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran baru
Jakarta Selatan 12 110
Indonesia
Telp. (021) 7251538
Website : http//www.pu.go.id

TIM PRODUKSI

Editor :
Amwazi Idrus, Benny Hermawan

Penulis :
Ade Syaiful R., Lisniari Munthe, Rani Charisma Dewi,
Agustina Budi Hartati, Mirah Nawangsari, Nur Fajri Arifiani, Eriswan Nur, Abdul Latief
Agung Y. Achmad, Sofwan D. Ardyanto & Tim Penulis

Desain & Tata Letak :
Dimas Rangga & Tim Desain

Fotografi:
Dokumentasi PUSKOM PU

KONTRIBUTOR

Sri Yumadiati (Pusdata, Setjen), Sumito (Biro PKLN, Setjen), Sundjoto (Pustra, Setjen), Ranto PR (Bintek BM), Julia Agustine (Bintek BM), Kuswaryuni (Setditjen CK), Purwanto (Setditjen CK), Anita Listyarini (Dit Bangkim, CK), Asri Indiyani (Dit PLP, CK), Ratna Dewi (Dit PAM, CK), Oloan MS (Dit PAM, CK), Bag. Hukum SDA, Perpustakaan Departemen PU.